



DIREKTORAT JENDERAL PEHUBUNGAN LAUT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini disusun sebagai upaya pemantauan dan monitoring berkala terhadap capaian kinerja secara periode triwulan untuk memperoleh data analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 34
D. Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi	I - 36
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis.....	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 17
BAB III CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	III - 1
A. Capaian Kinerja.....	III - 1
B. Kontribusi Terhadap Capaian Indikator Kegiatan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	III - 44
C. Realisasi Anggaran	III - 45
BAB IV PENUTUP	IV - 1
A. Kesimpulan	IV - 1
B. Langkah Kedepan	IV - 3

DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan...	I	-	34
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan.....	I	-	35
II.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 – 2024.....	II	-	4
II.1.2	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.....	II	-	6
II.1.3	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024.....	II	-	7
II.1.4	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	9
II.1.5	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024	II	-	13
II.1.6	Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network).....	II	-	15
II.1.7	Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024	II	-	16
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	II	-	18
II.2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut....	II	-	19
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III	-	4
III.1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	III	-	6
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1).....	III	-	8
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III	-	9
III.1.5	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur.....	III	-	9
III.1.6	Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2022	III	-	11
III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III	-	13
III.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III	-	13
III.1.9	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul....	III	-	14
III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III	-	16

III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III - 19
III.1.12	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 19
III.1.13	Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2022.....	III - 22
III.1.14	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2022.....	III - 22
III.1.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III - 25
III.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III - 26
III.1.17	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 26
III.1.18	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5).....	III - 29
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5).....	III - 30
III.1.20	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 30
III.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 33
III.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 34
III.1.23	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 34
III.1.24	Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar.....	III - 35
III.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 38
III.1.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 38
III.1.27	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan.....	III - 39
III.1.28	Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 41
III.1.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 42

III.1.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 43
III.2.1	Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022.....	III - 44
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2022....	III - 45
III.3.2	Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2022.....	III - 49
III.3.3	Rincian Anggaran Yang Tidak Terserap Tahun 2022.....	III - 50
III.3.4	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	III - 51
III.3.5	Realisasi Belanja Per Program.....	III - 51
III.3.6	Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022.....	III - 52

DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 7
III.1.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk (Loop) Secara Teratur	III - 10
III.1.3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama	III - 15
III.1.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 20
III.1.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 27
III.1.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 31
III.1.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 35
III.1.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 40

DAFTAR GAMBAR

I.1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I	-	4
I.2.1	Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	I	-	19
I.2.2	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama	I	-	21
I.2.3	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan	I	-	23
I.2.4	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....	I	-	25
I.2.5	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....	I	-	27
I.2.6	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)	I	-	28
I.2.7	Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi.....	I	-	31
I.2.8	Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.....	I	-	32
I.2.9	Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	I	-	33
II.1.1	Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	3



BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Capaian Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2022 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.

Selanjutnya ukuran kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ditelaah dan direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



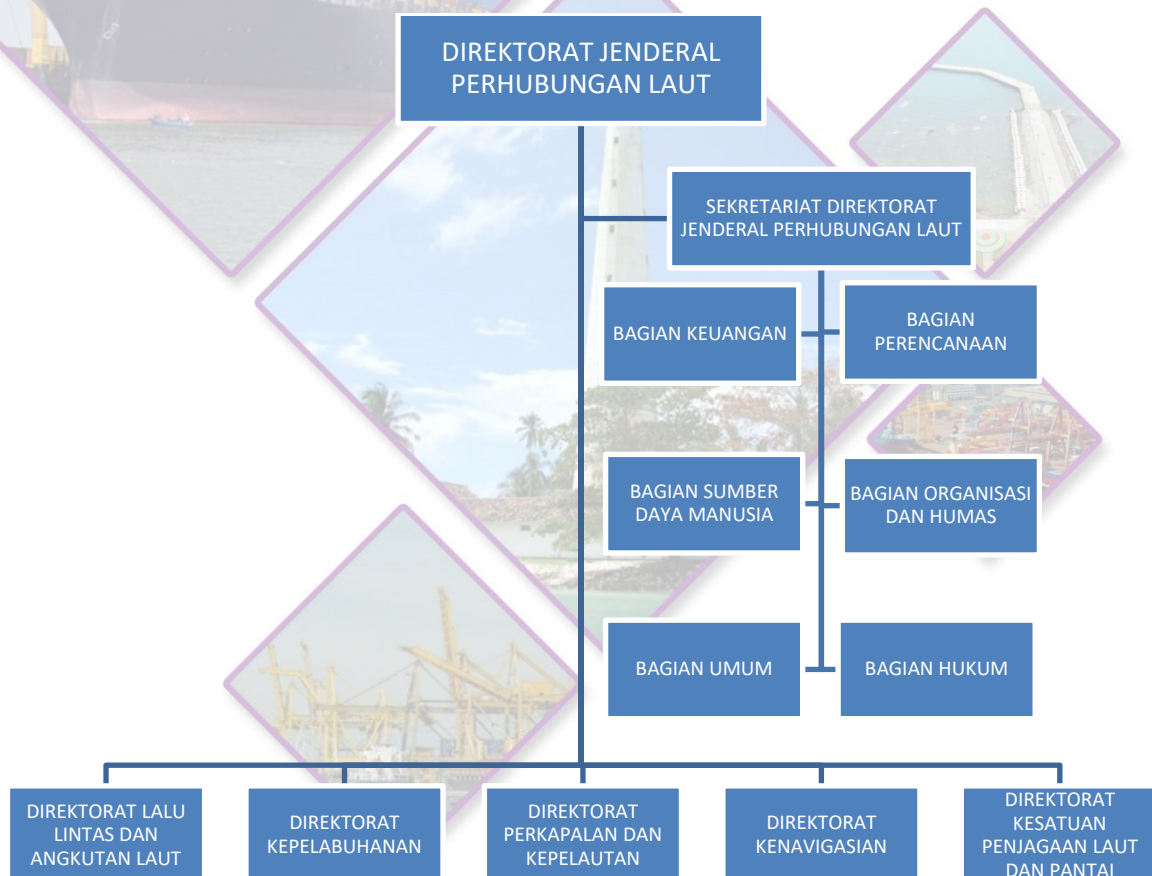
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- Direktorat Kepelabuhanan;
- Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- Direktorat Kenavigasian;
- Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



Gambar I.1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2. Tugas dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut; kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- d) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



b. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- i. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- ii. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- iii. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- iv. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- v. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- vi. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- i. Bagian Perencanaan;
- ii. Bagian Keuangan;
- iii. Bagian Sumber Daya Manusia;
- iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- v. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

i. Bagian Perencanaan

i). Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Perencanaan

- Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



ii. Bagian Keuangan

i) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii) Fungsi Bagian Keuangan

- Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan revidi laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil revidi laporan keuangan.



iii. Bagian Sumber Daya Manusia

i). Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

i). Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.



ii). Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

v. Bagian Umum dan Perlengkapan

i). Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan



- Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

i). Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;



- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- 6) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Kepelabuhanan

a. Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan



penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a. Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.



b. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 3) Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai



angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;

- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan 181 perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a. Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

b. Fungsi Direktorat Kenavigasian

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan



pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;

- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a. Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana.

b. Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, pelayaran di laut dan pantai,



penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;

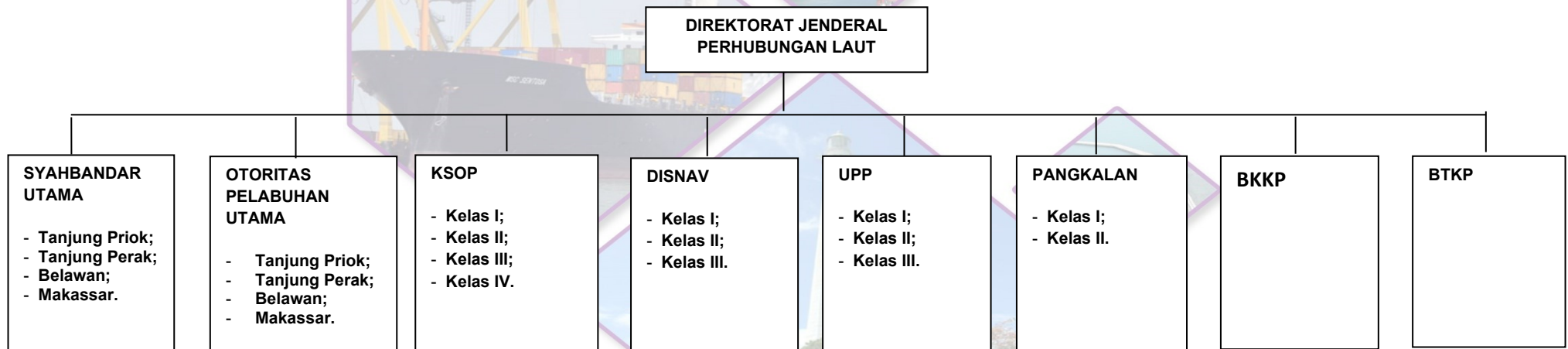
- 3) Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.





3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

MEKANISME KOORDINASI UNIT ESELON I DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)



Gambar I.2.1. Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

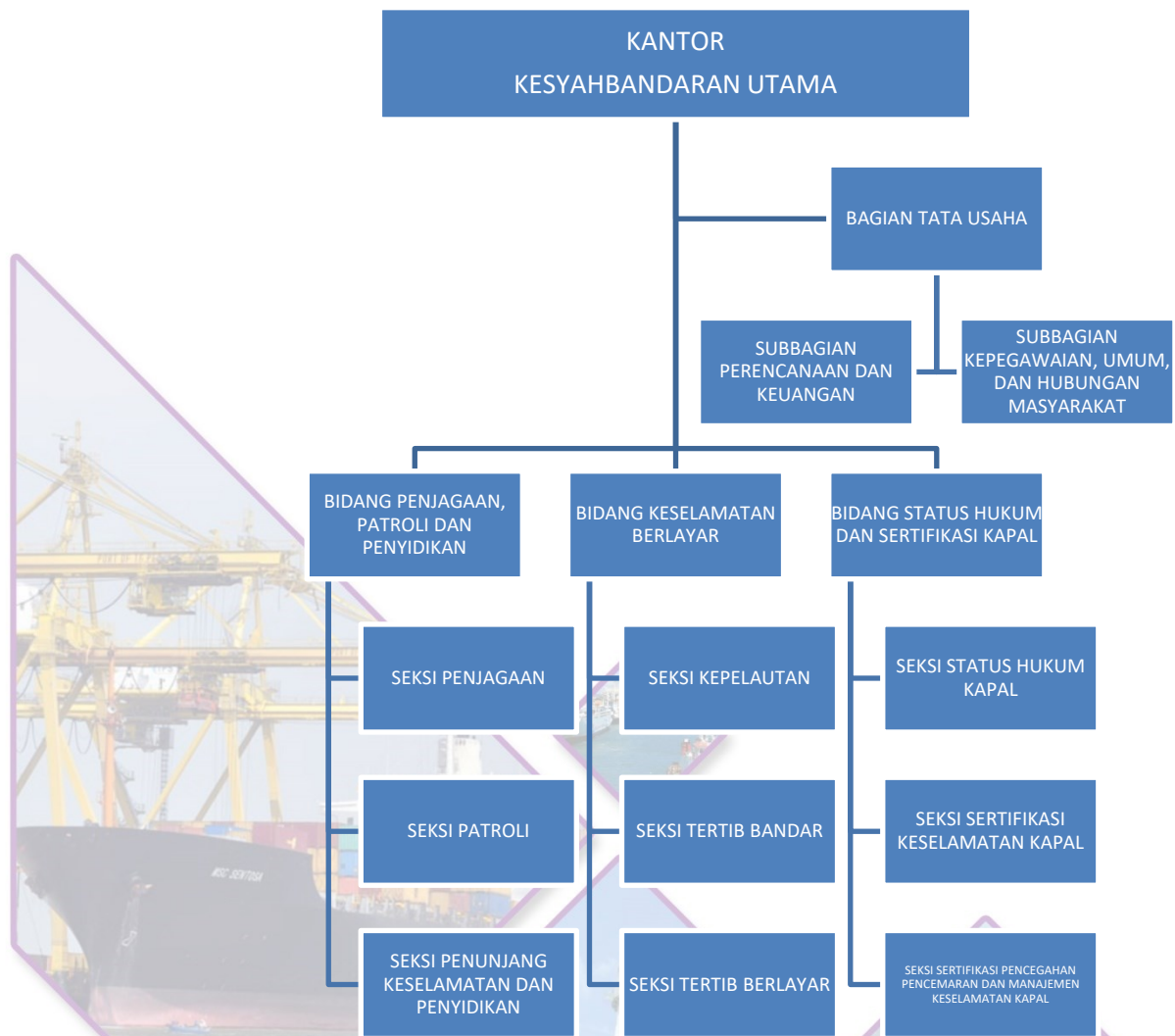


a. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen Hubla

1) Kantor Kesyahbandaran Utama

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta peneritan Surat Persetujuan Berlayar;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- d) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan disembarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/ SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar I.2.2. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama

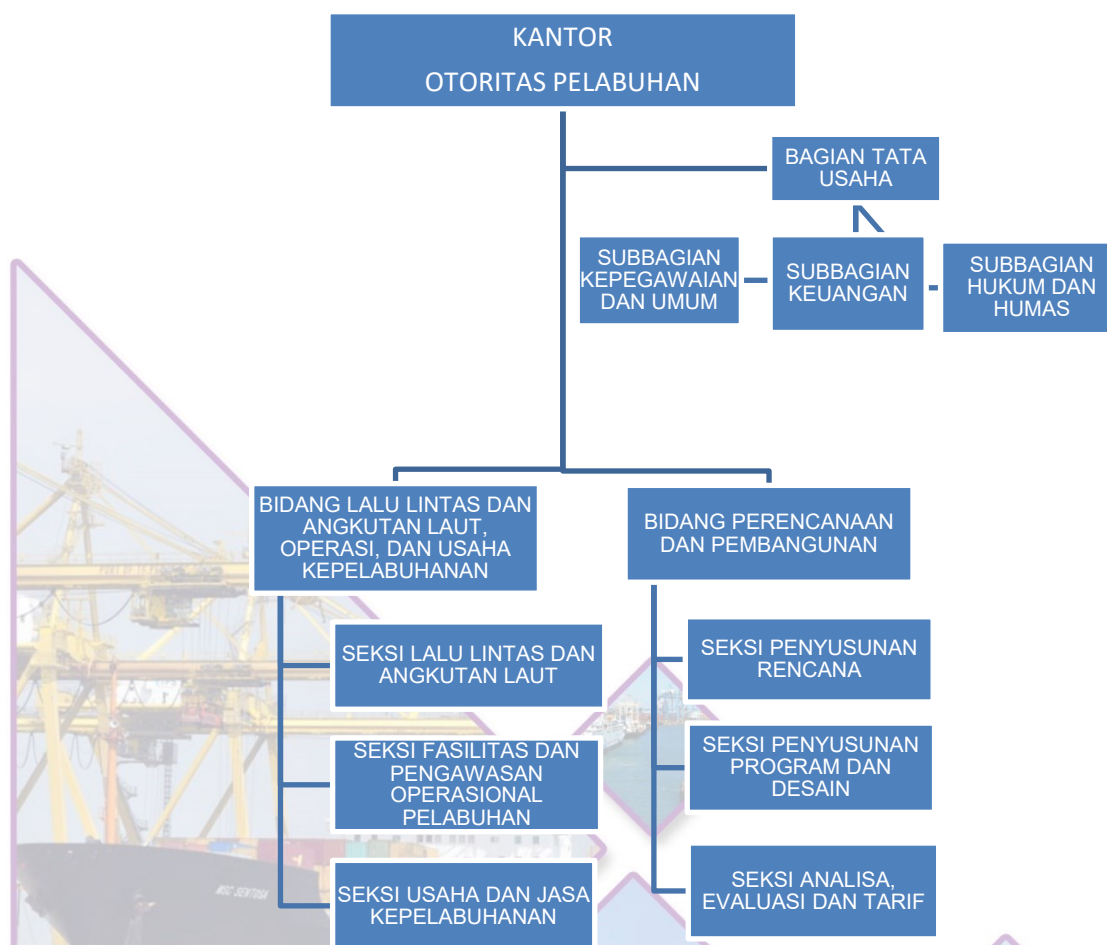
2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;



- b) Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c) Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- f) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- g) Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
- h) Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar I.2.3. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;



- c) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
- g) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.



Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



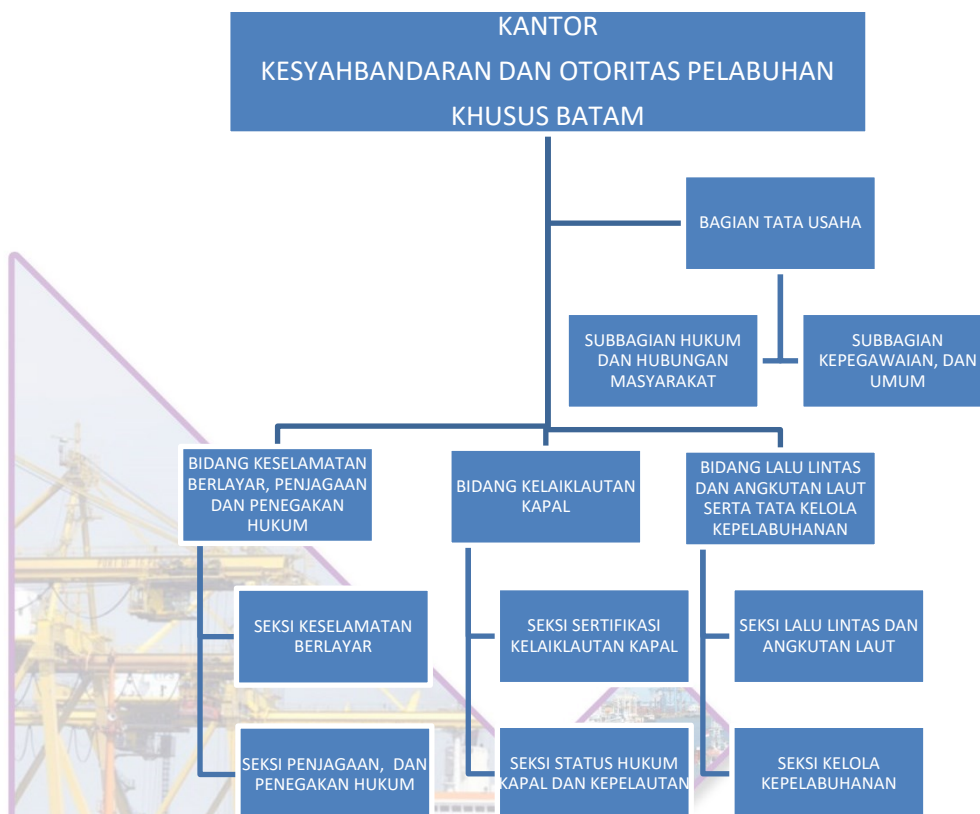
Gambar I.2.4. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:



- a) Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilaian, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar I.2.5. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

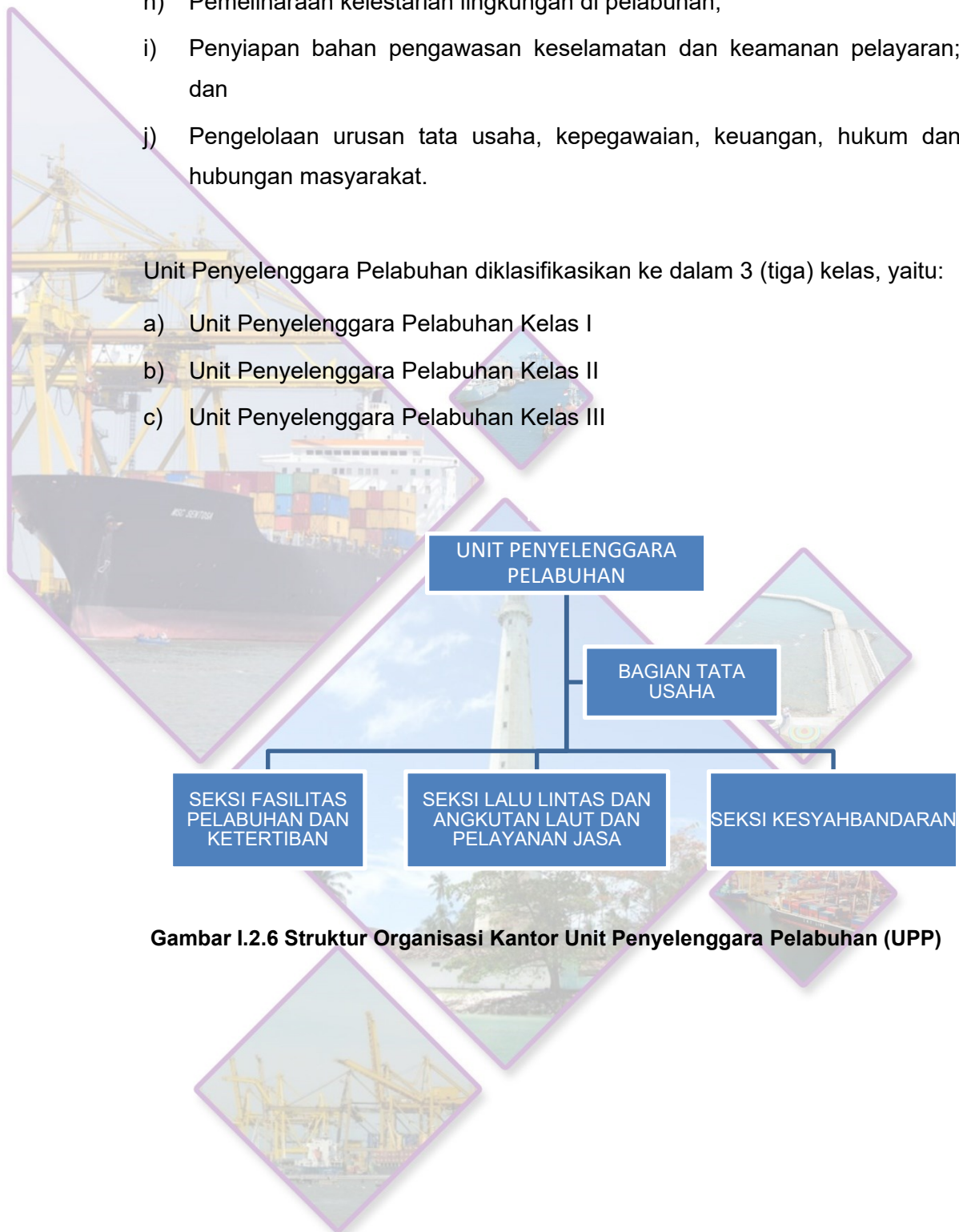
- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan;



- e) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- j) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Gambar I.2.6 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)



6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, melalui pelaksanaan fungsi berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air;
- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
- h) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic;
- i) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I;
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.



7) Distrik Navigasi

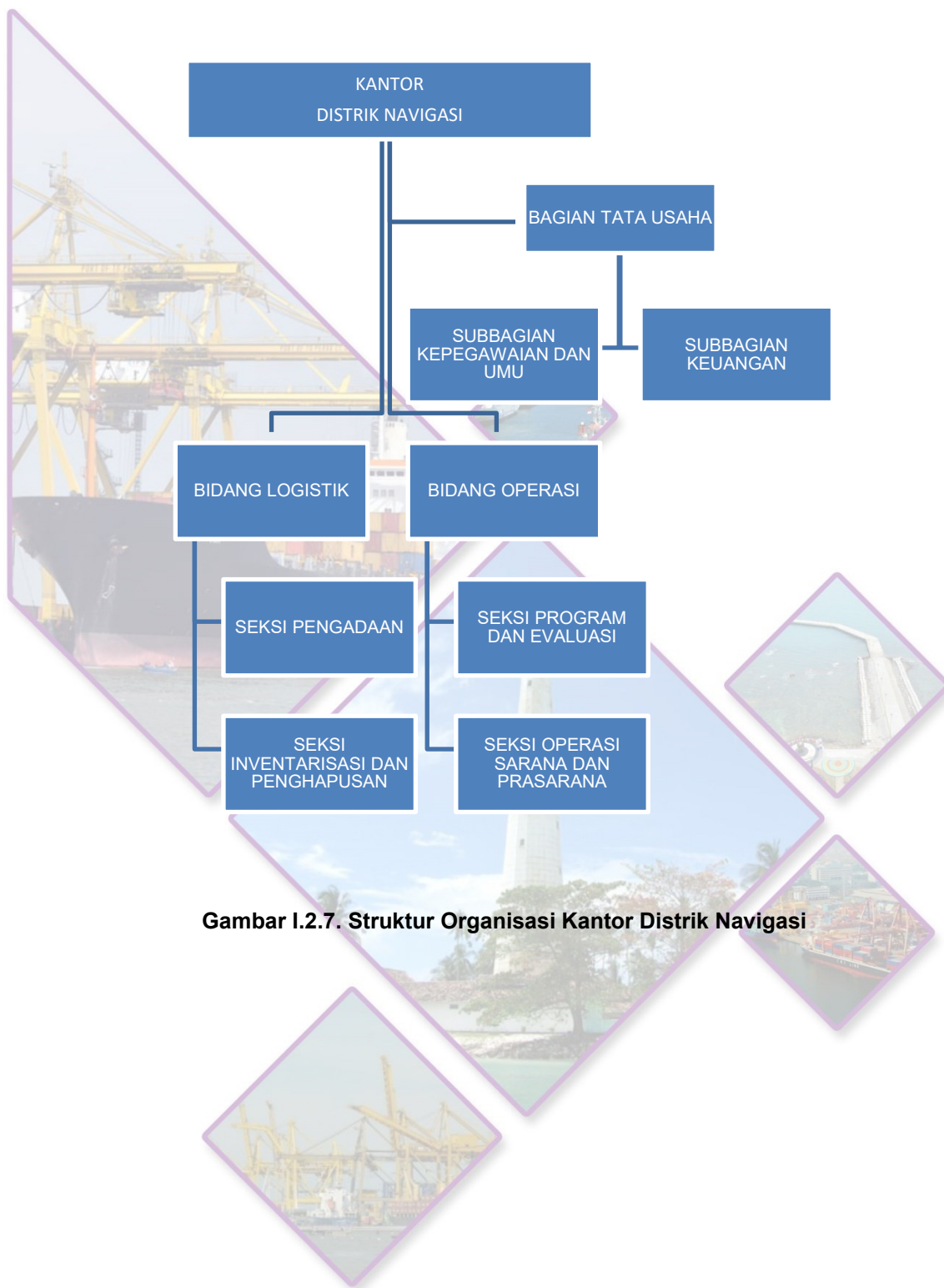
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- c) Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel;
- d) Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- e) Pelaksanaan urusan logistic;
- f) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- g) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.



Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



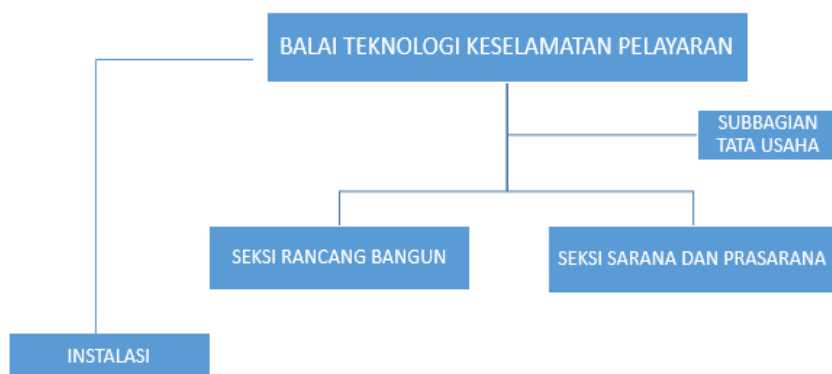
Gambar I.2.7. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi



8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- b) Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- c) Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- d) Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;
- e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



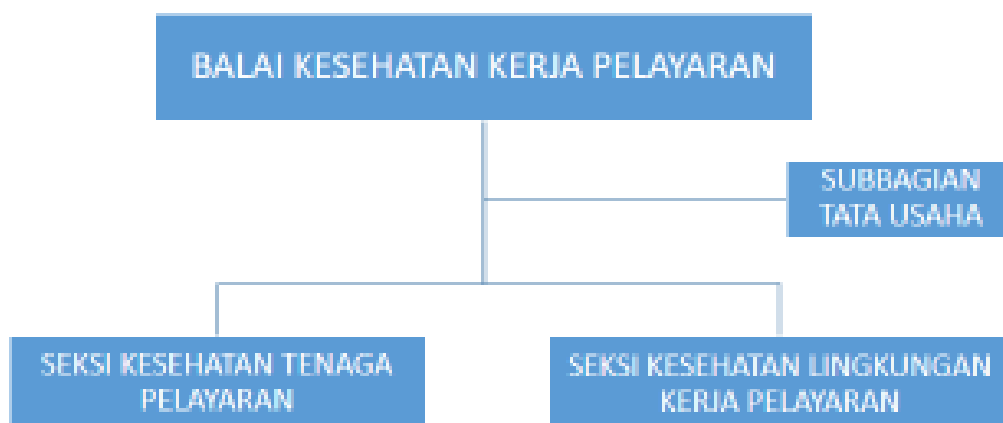
Gambar I.2.8. Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, ergonomic, hygiene dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;
- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.



Gambar I.2.9. Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2022 yaitu 13.167 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1
Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2021	2022
1.	S3	11	12
2.	Spesialis	9	1
3.	S2	1023	1.150
4.	S1	3732	3.908
5.	D4	177	219
6.	D3	1195	1.332
7.	D2	15	13
8.	D1	57	59
9.	SLTA atau Kurang	7091	6.473
TOTAL		13.310	13.167



2. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.2

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2021	2022
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	3	6
3.	IV/c	22	21
4.	IV/b	64	80
5.	IV/a	310	390
6.	III/d	1335	1.691
7.	III/c	1602	1.822
8.	III/b	3295	3.182
9.	III/a	2386	2.473
10.	II/d	1574	1.443
11.	II/c	1863	1.404
12.	II/b	399	299
13.	II/a	440	342
14.	I/d	12	11
15.	I/c	1	1
16.	I/b	4	2
17.	I/a	0	0
TOTAL		13.310	13.167



D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode Rencana Strategi (Renstra) 2020 - 2024 yang bertujuan mewujudkan terpenuhinya Konektivitas Transportasi Laut (Tahun 2021 sebesar 0,91 Rasio), serta mewujudkan layanan prima terhadap kebutuhan masyarakat seefektif dan seefisien mungkin guna menurunkan biaya logistik nasional dan digitalisasi layanan.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

1. Pembangunan Pelabuhan Patimban;
2. Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);
4. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
5. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
6. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
7. Program Pelayanan Pelayaran Perintis;
8. Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu *animal welfare*);
9. Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
10. Pengembangan Sistem Informasi Kepelautan;
11. Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu – Disnav Tarakan;
12. Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas III, IV dan V.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 – 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

1. Rencana Kinerja 5 (lima) Tahun

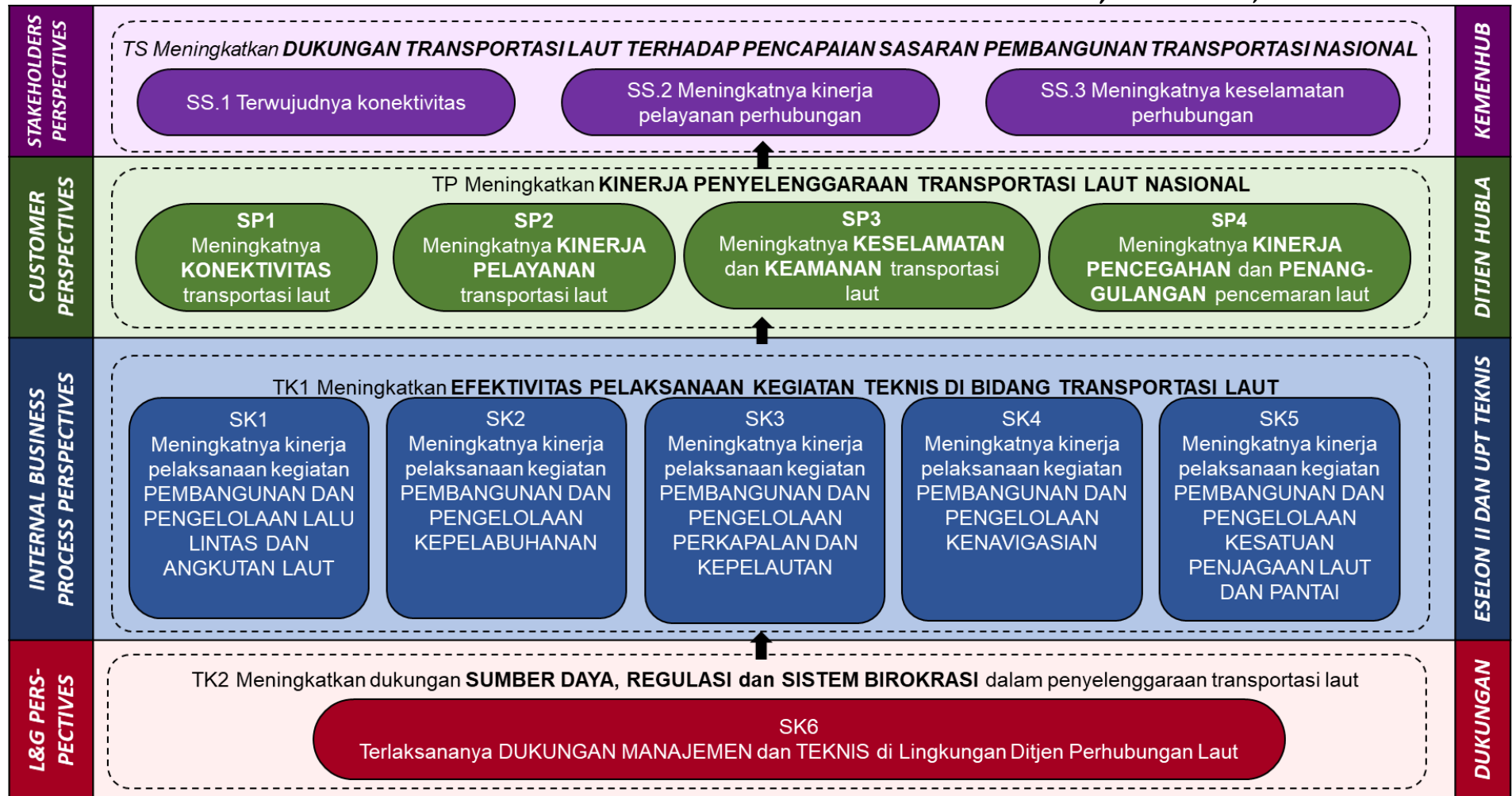
Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering juga disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi terukur dari Sasaran Strategis (SS). Secara hirarki target capaian IKSS merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena terkait dengan capaian sasaran prioritas Presiden.
- b. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) sebagai representasi terukur dari Sasaran Program (SP). Secara hirarki target capaian IKP merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberikan kewenangan untuk menjalankan Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
- c. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) sebagai representasi terukur dari Sasaran Kegiatan (SK). Secara hirarki target capaian IKK merupakan tanggung jawab dari Unit Eselon II/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di mana masing-masing merupakan pelaksana kegiatan yang tercakup di dalam Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

Adapun susunan dan rumusan tentang indikator kinerja program (IKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan penjelasan lebih lanjut tentang daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap kegiatan di yang termasuk ke dalam program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perhubungan Laut.



Gambar II.1.1 Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024



1) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

Tabel II.1.1. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
TP Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	Jumlah pelabuhan yang telah dilayati angkutan laut (tahun n0) ditambah dengan Jumlah Penambahan rute pelayaran atau pelabuhan yg disinggahi angkutan laut (tahun n) dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut. Keterangan: jumlah lokasi pelabuhan laut yang digunakan angkutan laut sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan dapat berubah jika terdapat Reviu RIPN.
		IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Persentase pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT)
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	Jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut per tahun dibandingkan jumlah SPB yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut dikali dengan 10.000 pelayaran
		IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Rasio	Persentase penurunan kejadian gangguan keamanan transportasi laut (di atas kapal dan di pelabuhan, terhadap wilayah pelabuhan, kapal, penumpang, barang) per tahun dibandingkan baseline 2019 dikali dengan 100.000 pelayaran
		IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	Rerata Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkat kehandalan Telkompel
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	Jumlah sertifikat IAPP yang diterbitkan setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kapal yang kapasitasnya lebih dari 400 GT



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

		IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal yang berhasil ditanggulangi
--	--	---	---	---

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2) Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

Tabel II.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

NO	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indikator Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	0,89	0,90	0,91	0,92
					Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	24	25	27	27	27
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi		Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	81	82	83	84	85
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi		Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	1,23 per 10000 pelayaran	1.21 per 10000 pelayaran	1.09 per 10000 pelayaran	0.97 per 10000 pelayaran	0.85 per 10000 pelayaran
					Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Rasio	0,30 per 10000 pelayaran	0,29 per 100000 pelayaran	0,28 per 100000 pelayaran	0,27 per 100000 pelayaran	0,26 10000 pelayaran
					Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	96,5	97,25	97,75	98,25	99

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024

Arahan kebijakan umum pembangunan nasional untuk ke-7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dirangkum pada berikut :

Tabel II.1.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing



4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	1) Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)



b. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Tabel II.1.4. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut								Rp10.956.672,747	Rp12.177.169,217	Rp13.587.856,481	Rp13.691.338,202	Rp13.814.963,353	
	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut												
	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional		0,89	0,89	0,90	0,91	0,92						Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur		24	25	27	27	27						Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut												
	IKP 3 Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul		81%	82%	83%	84%	85%						Direktorat Kepelabuhanan
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut												
	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut		1,23 per 10.00	1.21 per 10.000	1.09 per 10.000	0.97 per 10.000	0.85 per 10.000						Dit. KPLP



LKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			0 pelayaran	pelayaran	pelayaran	pelayaran	pelayaran						
	IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut		0,30 per 100.000 pelayaran	0,29 per 100.000 pelayaran	0,28 per 100.000 pelayaran	0,27 per 100.000 pelayaran	0,26 per 100.000 pelayaran						Dit. KPLP
	IKP 6 Tingkat kehandalan Kenavigasian		96,5%	97,25 %	97,75 %	98,25 %	99%						Dit. Kenavigasian
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut												
	IKP 7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)		0,2	0,4	0,6	0,8	1						Dit.Kappel
	IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. KPLP

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



c. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Secara keseluruhan untuk setiap kegiatan yang tercakup di dalam program penyelenggaraan transportasi laut tersebut diperlukan total pendanaan sekitar Rp 64.228.000.000,00 untuk 5 tahun dari Tahun 2020-2024, tercakup di dalamnya untuk jenis belanja modal maupun belanja barang, serta berbagai sumber pendanaan, baik Rupiah Murni, PHLN, SBSN, KPBU maupun swasta murni.

Sebagaimana diketahui bahwa pada periode Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Transportasi Laut yang terdiri dari 6 (enam) jenis kegiatan yang mencakup:

- 1) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 2) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan;
- 3) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan Kelautan;
- 4) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian;
- 5) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- 6) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis.

Secara terperinci 6 (enam) kegiatan tersebut dalam Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dokumen penganggaran dibagi menjadi Output dan Sub output.

Pada periode Tahun 2021-2024 terdapat Restrukturisasi Program dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Infrastruktur Konektivitas;
 - i. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut;
 - ii. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut;
 - iii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
 - iv. Kegiatan Pelayanan Transportasi Laut.
- 2) Program Dukungan Manajemen;
 - i. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Laut;



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

- ii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
- iii. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut;
- iv. Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut;
- v. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut;
- vi. Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut.



d. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Tabel II.1.5. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

No	Kegiatan/Program	Kebutuhan Pendanaan Per Tahun (dalam Juta)						Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
1	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Rp1.702.151,446	Rp2.220.5420,904	Rp2.805.738,123	Rp2.901.487,108	Rp3.108.440,099	Rp12.723.237,68	
2	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan	Rp4.154.641,670	Rp3.583.020,673	Rp4.169.467,299	Rp3.314.8714,334	Rp2.854.041,059	Rp17.909.885,035	
3	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan Kelautan	Rp53.162,035	Rp196.843,838	Rp158.638,538	Rp163.038,909	Rp167.561,994	Rp739.245,314	
4	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian	Rp493.728,073	Rp1.247.016,155	Rp1.074.683,076	Rp1.578.216,389	Rp1.705.355,953	Rp6.098.999,646	
5	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Rp286.810,522	Rp437.468,238	Rp654.159,138	Rp823.951,611	Rp706.072,545	Rp.2.908.462,054	
6	Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Program Penyelenggaraan Transportasi Laut	Rp4.2566.179,001	Rp4.507.399,409	Rp4.725.170,307	Rp5.098.950,816	Rp5.273.491,703	Rp23.848.170,271	
TOTAL		Rp10.956.672,747	Rp12.177.169,217	Rp13.587.856,481	Rp13.691.338,202	Rp13.814.963,353	Rp64.228.000,000	

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



**3. Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (*Integrated Port Network*)
(Major Project RPJMN No. 22)**

- a.** Pengembangan jaringan pelabuhan utama terpadu atau sering disebut sebagai Integrated Port Network (IPN) merupakan upaya dasar untuk mengurangi biaya logistik laut (khususnya untuk distribusi barang dalam negeri).
- b.** Dengan standarisasi teknis dan standarisasi pelayanan pada sejumlah pelabuhan utama (untuk periode 2020-2024 ini difokuskan pada 7 pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong) diharapkan rute utama antar pulau melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dilayani dengan kapal-kapal besar melalui rute loop yang lebih efisien. Pengembangan IPN ini juga mendukung highlight Program Prioritas berdasarkan Kepulauan 2020-2024.



c. Deskripsi umum mengenai MP 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (IPN) sebagaimana tertuang di dalam table berikut ini :

Tabel II.1.6. Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network)

Lokasi	Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong					
Latar Belakang	- Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi <i>port to port</i>, sedangkan rute <i>loop</i> hanya 23% - Belum adanya standardisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan utama <i>transshipment</i> domestik.					
Manfaat	- Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standardisasi pelabuhan utama (nilai <i>turn round time</i> maksimum 24 jam) - Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27% - Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan					
Durasi	Tahun 2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Indikasi Pendanaan
	1 pelabuhan utama	2 pelabuhan utama	4 pelabuhan utama	6 pelabuhan utama	7 pelabuhan utama	Rp 113 Triliun (BUMN/Swasta)
Pelaksana	Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta					
Highlight Proyek	- Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas) - Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan breakwater - Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs - Pengembangan Kawasan Industri					

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)



d. Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2020-2024

Pada Lampiran III RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan target pembangunan dan pendanaan Prioritas Nasional (PN) di bidang transportasi laut untuk periode 2020-2024. Adapun detail dari usulan proyek/kegiatan strategis lainnya di bidang Perhubungan Laut yang diusulkan di dalam Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 disampaikan di

**Tabel II.1.7 Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional
Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024**

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Target Tahunan					Total Target	Indikasi Belanja Non Operasional 2020-2024 (Rp Milyar)
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kenavigasian								2.570,8
	Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Unit	67	70	73	75	77	362	1.118,2
	Penyediaan kapal navigasi	Unit	10	14	18	22	25	89	1.000,0
	Penyediaan vessel traffic services terintegrasi (VTS)	Unit	15	20	25	30	35	125	452,6
2	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut								10.267,4
	Subsidi Tol Laut	Trayek	21	22	23	24	25	25	2.398,0
	Subsidi Angkutan Laut Perintis	Trayek	113	113	113	113	113	113	6.498,9
	Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	Lokasi	20	22	24	19	20	105	1.332,0
	Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Rute	1	1	1	1	1	5	38,5
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan								12.482,7
	Pembangunan pelabuhan (Selesai)	Lokasi	-	-	1	1	3	5	5.072,2
	Pengembangan pelabuhan (Selesai)	Lokasi	10	9	2	15	21	57	3.034,6
	Rekonstruksi pelabuhan (Selesai)	Lokasi	-	-	3	-	-	3	1.044,0
	Pengadaan peralatan bongkar muat	Lokasi	8	8	8	8	8	40	2.000,0
	Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran	Lokasi	20	22	24	19	20	105	1.332,0

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun setelah DIPA Tahun 2022 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel II.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,90
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	83
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,09
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,28
		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,6
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022



2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel II.2.2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,90
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	83
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,09
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,28
		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,6
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100

Sumber : Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$



Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang draft RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024.

Target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :





1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target PK Tahun 2022 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2022

Tabel III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM (3)		SATUAN (4)	TARGET 2022 (5)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	101
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27	27	26	27	27	27	100
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	83	69,87	76,70	86,75	79,00	79,00	95,18
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,09	0,91	1,10	0,98	0,99	0,99	109,17
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,28	0	0	0	0	0	200



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75	98,05	97,17	97,17	96,33	96,33	98,55
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,6	0,527	0,583	0,651	0,715	0,715	119,2
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100



a. SASARAN PROGRAM (1)

Sasaran Program **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut** dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah **“Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional”**
 - a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Tabel III.1.2. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	101

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2022 sebesar 0,90. Jumlah pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN sebanyak 636 pelabuhan.

Pada Triwulan I di bulan Januari tahun 2022 terdapat penambahan pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Indari di Halmahera Selatan. Kapal yang singgah di Indari adalah kapal angkutan laut perintis. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani menjadi 573 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari 2022 sebesar 0,90. Pada bulan Februari tahun 2022 terdapat penambahan pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Koititi di Kepulauan Halmahera. Kapal yang singgah di Koititi adalah kapal angkutan laut perintis. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani menjadi 573 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari sampai dengan Maret 2022 sebesar 0,90.

Pada Triwulan II terdapat jumlah pelabuhan yang disinggahi kapal laut menjadi 573 pelabuhan dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada April sampai dengan Juni 2022 sebesar 0,90 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%.

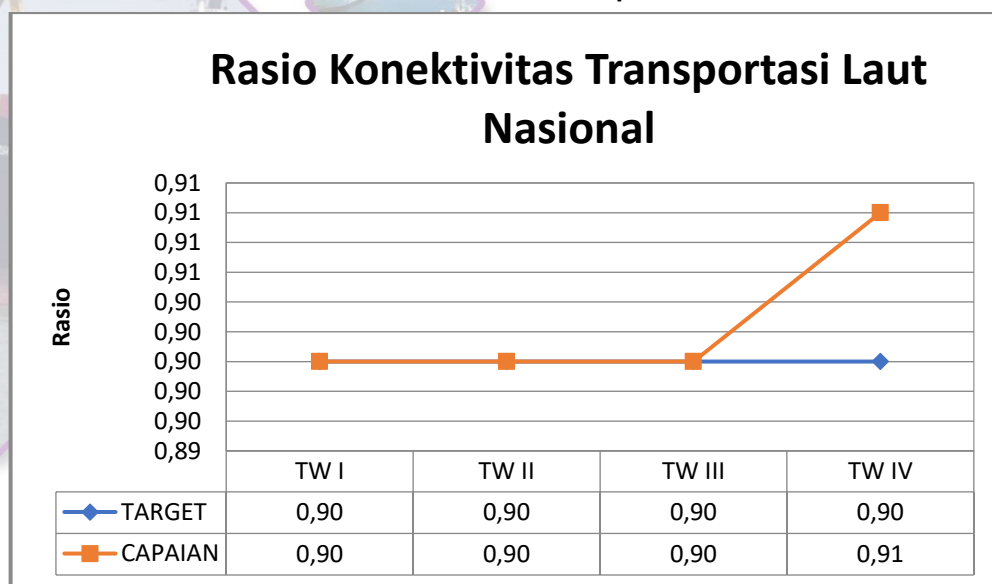
Pada Triwulan III terdapat jumlah pelabuhan yang disinggahi kapal laut menjadi 573 pelabuhan dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Juli sampai dengan



September 2022 sebesar 0,90 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100% dan terdapat jumlah pelabuhan yang disinggahi kapal laut menjadi 573 pelabuhan dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Juli sampai dengan September 2022 sebesar 0,90 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%.

Pada Triwulan IV terdapat penambahan 3 Pelabuhan yaitu Matasiri, Marabatuan dan Gudang Arang, sehingga jumlah pelabuhan yang disinggahi kapal laut menjadi 576 pelabuhan dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 0,91 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 101%.

Grafik III.1.1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional



Rasio konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang diperuntukkan sebagai layanan angkutan laut, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{\sum \text{jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut}}{\sum \text{jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut}}$$

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{576 \text{ trayek}}{636 \text{ trayek}} = 0,91$$

Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut Tahun 2022 pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 0,90 dan pada Triwulan IV sebesar 0,91 jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut sebanyak 576 pelabuhan sedangkan



jumlah pelabuhan yang dilayani kapal perintis 284 pelabuhan sehingga kontribusi kapal perintis terhadap konektivitas transportasi laut sebesar 49% masih terdapat 60 pelabuhan yang belum terlayani kapal angkutan laut. Terlampir daftar pelabuhan yang sudah dan belum terlayani oleh kapal angkutan laut. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas. Selain itu para pemilik barang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional, target yang ditetapkan pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,89 dengan realisasi rasio sebesar 0,89 (dari *benchmark* sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 571 pelabuhan) sedangkan target Tahun 2022 sebesar 0,90 dengan realisasi rasio sebesar 0,91 (dari *benchmark* sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 576 pelabuhan). Untuk Tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan karena terdapat penambahan 5 Pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Indari di Halmahera Selatan, Pelabuhan Koititi di Kepulauan Halmahera, Pelabuhan Matasiri dan Pelabuhan Marabatuan di Provinsi Kalimantan Selatan serta Pelabuhan Gudang Arang di Provinsi Maluku.

Tabel III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,89	0,90
				Realisasi	0,898	0,91
				Kinerja (%)	100,87	101

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut



- c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,91 dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,90 sehingga pencapaian kinerjanya 101% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,90	0,91	101

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

- 2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah **“Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur”**.

- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2):**

Tabel III.1.5. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	27	26	27	27	27	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.



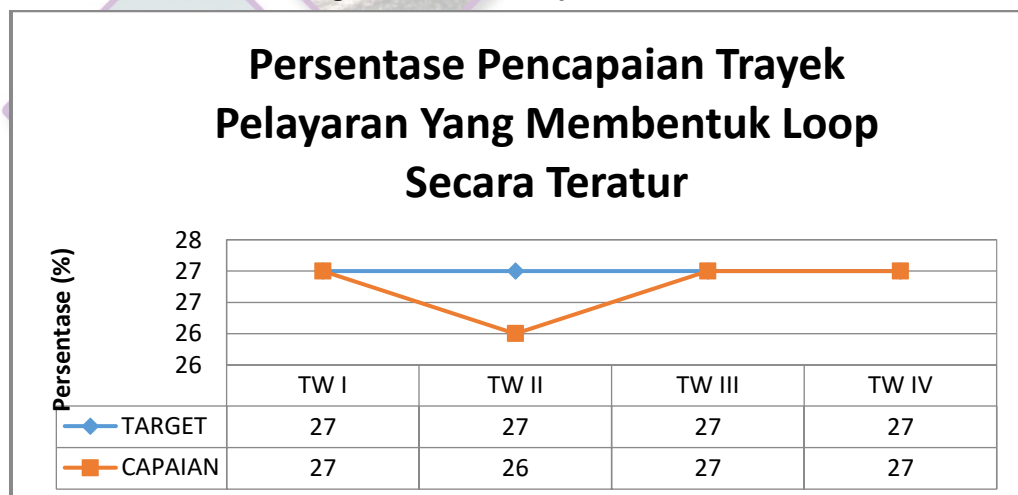
Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2022 sebesar 27% atau sebanyak 18 trayek dari 67 trayek tetap dan teratur. Pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2022 telah diinventarisasi sebanyak 13 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas membentuk loop service. Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur dalam periode tersebut mencapai 19%. Pada bulan Maret telah diinventarisasi sebanyak 138 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas sebanyak 37 trayek telah membentuk loop service, sehingga Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur pada bulan Maret mencapai 27 %.

Pada Triwulan II Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur sebesar 26% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 96,30% dan belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena terdapat trayek pelayaran yang mengalami perubahan sebagai berikut : trayek semula yaitu Tanjung Priok – Pekanbaru – Tanjung Priok menjadi Trayek perubahan yaitu Tanjung Priok – Batam – Pekanbaru – Sibolga – Tanjung Priok.

Pada Triwulan III Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur sebesar 27%. Pada bulan September telah diinventarisasi sebanyak 138 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas sebanyak 37 trayek telah membentuk loop service, sehingga Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur pada bulan September mencapai 27%.

Pada Triwulan IV Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur sebesar 27%, sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100%.

Grafik III.1.2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur





Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur diukur dengan menghitung jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner), atau dengan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop} = \frac{\sum \text{jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)}} \times 100\%$$

x = Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur

$$\% \text{ pencapaian trayek loop} = \frac{37 \text{ trayek}}{138 \text{ trayek}} = 27\%$$

Tabel III.1.6. Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2022

NO.	TRAYEK
1.	Bitung-Ulu Siau-Tagulandang-Tahuna-Marore-Mianga-Marampit-Lirung-Melangoane-Mangarang-Bitung
2.	Tanjung Perak-Wanci-Namrole-Pulau Obi-Tanjung Perak
3.	Tanjung Perak-Rote-Sabu-Tanjung Perak
4.	Tanjung Priok-Bengkalis-Meranti/Dorak-Belawan-Lhokseumawe/Krueng Geukeh-Malahayati/Krueng Raya-Tanjung Priok
5.	Teluk Bayur-Gunung Sitoli-Sinabang-Sikakap-Bengkulu/Pulau Baai-Teluk Bayur
6.	Tanjung Perak- Ilwaki-Kisar-Leti-Kaiwatu/Moa-Lelang/P. Sermat-Tepa-Larat-Tanjung Perak
7.	Makassar-Awerange/Barru-Garongkong-Tanjung Silopo/Polewali-Mamuju-Belang-Belang-Nunukan-Makassar
8.	Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
9.	Sorong-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Sorong
10.	Tanjung Perak-Piru-Wayaloar-Malbufa-Babang-Saketa-Gimea-Bula-Tanjung Perak
11.	Tanjung Perak-FakFak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak
13.	Tanjung Perak-Makassar-Jailolo-Daruba-Galela-Tanjung Perak
14.	Tanjung Priok-Kijang-Letung-Tarempa-Pulau Laut-Selat Lampa-Subi-Serasan-Midai-Tanjung Priok
15.	Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba-Galela-Buli-Maba Pura-Weda-Tanjung Perak
16.	Tanjung Perak-Makassar-Tahuna-Tanjung Perak
17.	Tanjung Perak-Bau-Bau/Murhum-Kendari/Bungkutoko-Tanjung Perak
18.	Tanjung Priok – Teluk Bayur - Tanjung Priok
19.	Tanjung Perak – Makassar – Bobong (Taliabu) – Luwuk – Tanjung Perak
20.	Tanjung Perak – Merauke – Agats – Timika (Pomako) – Tanjung Perak
21.	Tanjung Priok – Lhokseumawe – Malahayati – Sabang – Tanjung Priok
22.	Bitung – Luwuk – Pagimana – Bunta – Mantangisi – Ampana – Parigi/Tinombo – Tilamuta – Bitung
23.	Makassar - Bungku – Kolonodale – Makassar
24.	Makassar – Ereke – Raha – Sikeli – Selayar– Makassar
25.	Tanjung Perak - Tidore (Soasio) – Morotai – Galela – Maba/Buli – Weda – Tanjung Perak
26.	Tanjung Perak- Wetar -Kisar – Leti - Moa – Sermata - Tepa – Larat - Tanjung Perak
27.	Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak
28.	Tanjung Perak – Makassar – Jailolo – Morotai (Daruba) – Tanjung Perak
29.	Tanjung Perak – Saumlaki – Dobo – Tanjung Perak
30.	Tanjung Perak – Badas – Bima – Tanjung Perak
31.	Tanjung Perak – Tarakan – Nunukan – Tanjung Perak
32.	Tanjung Perak – Namlea – Tanjung Perak



33.	Merauke (Kelapa Lima) – Kimaam – Moor – Bade (Mapi) – Gantentiri (Bovendigul) – Merauke (Kelapa Lima)
34.	Tanjung Perak – Sorong – Tanjung Perak
35.	Tanjung Priok – Tanjung Perak – Tanjung Priok
36.	Tanjung Priok – Patimban – Kijang – Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa – Subi – Serasan – Midai – Tanjung Priok
37.	Tanjung Perak – Kupang – Tanjung Perak



: trayek tol laut



: trayek swasta

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh trayek tol laut sebanyak 29 trayek (78%) sedangkan kapal swasta hanya mencapai 9 trayek (22%). Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- Menghimbau kepada perusahaan pelayaran swasta melalui surat edaran kepada DPP INSA untuk meningkatkan jadwal pelayaran kapal-kapal petikemas secara lebih teratur;
- Melakukan evaluasi pada saat rapat koordinasi nasional penyelenggaraan angkutan barang tol laut dalam rangka meningkatkan persentase pencapaian indikator trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) kedua (2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur, yaitu pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 27% dengan realisasi sebesar 27% sedangkan Tahun 2021 target sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel III.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase	%	Persentase	%	Target	25	27
Pencapaian Trayek		Pencapaian Trayek		Realisasi	25	27
Pelayaran Yang		Pelayaran Yang		Kinerja	100	100
Membentuk Loop		Membentuk Loop		(%)		
secara Teratur		secara Teratur				

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.



- c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur, pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 27% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 27% sehingga persentase pencapaiannya 100% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	27	27	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

b. SASARAN PROGRAM (2)

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) adalah “**Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul**”
 - a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) :



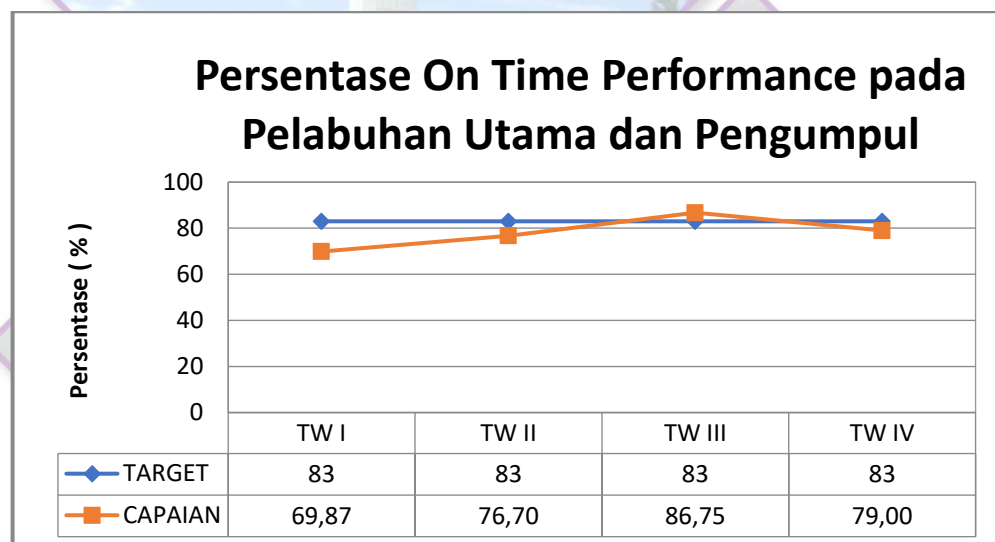
Tabel III.1.9. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83	69,87	76,70	86,75	79,00	79,00	95,18

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan dan Aplikasi SIRANI, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2022 sebesar 83%. Pencapaian pada Triwulan I sebesar 69.87 %, pada Triwulan II sebesar 76,70 %, pada Triwulan III sebesar 86.75%, dan pada Triwulan IV sebesar 79,00% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 95,18% sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan.

Grafik III.1.3. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul



Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan merupakan nilai rata-rata dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time: Berth Time* (BT) terhadap standar yang ditetapkan pada pelabuhan utama yang diusahakan



secara komersial di pelabuhan. Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian *Waiting Time* (WT) dan pencapaian *Approach Time* (AT)) serta pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)).

Kinerja di pelabuhan terdiri atas kinerja pelayanan kapal (*Waiting Time* (WT) dan *Approach Time* (AT)), untuk kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT).

i. Kinerja pelayanan kapal terdiri dari :

- ***Waiting Time* (WT)** merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) disajikan dalam satuan Jam.
- ***Approach Time* (AT)** merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time* (AT) disajikan dalam satuan Jam.

ii. Kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

- ***Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)** atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT) disajikan dalam satuan Persentase (%).

Pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach* (AT), dan *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT), merupakan perbandingan capaian kinerja di pelabuhan dengan standar yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk masing-masing unsur pencapaian kinerja sebagai berikut:

i. Pencapaian *Waiting Time* (WT)

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar WT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$



ii. Pencapaian *Approach Time* (AT)

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar AT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

iii. Pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

$$\text{Pencapaian (ET:BT)} = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, **Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan** merupakan rata-rata dari Capaian atas

Waiting Time (WT) + Approach Time (AT) + Effective Time : Berthing Time (ET:BT)

Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayanan yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET: BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET:BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas

kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan terdiri dari:

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{3}$$

Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Per Bulan (OTP) terdiri dari:

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{85\%}{83\%} \times 100\% = 102,41\%$$

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{67\%}{83\%} \times 100\% = 80,72\%$$

$$\text{Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{84\%}{83\%} \times 100\% = 101,20\%$$



Sehingga diperoleh:

$$\text{OTP Transportasi Laut} = \frac{85\% + 67\% + 84\%}{3} = 79\%$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Pencapaian} & = & \frac{102,41\% + 80,72\% +}{101,20\%} \\ \text{Standar Kinerja Pelayanan} & & 3 \\ \text{Pelabuhan} & & \end{array} = 95,18\%$$

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya dalam rangka meningkatkan Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelabuhan dimasa mendatang sebagai berikut :

- i. Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan untuk meningkatkan angka realisasi yang tercatat;
- ii. Menghimbau UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan;
- iii. Data diambil dari Aplikasi Sirani posisi 12 Januari 2023;
- iv. Melakukan penyesuaian terkait standarisasi layanan antar pelabuhan yang diberikan oleh pihak operator pelabuhan.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga (3) :

Untuk IKP 3 Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul, yaitu pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 79,00% sehingga persentase pencapaian sebesar 95,18 % sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan sedangkan Tahun 2021 target sebesar 82% dengan realisasi sebesar 104,19% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 127,06% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat.



Tabel III.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Target	82	83
				Realisasi	104,19	79,00
				Kinerja (%)	127,06	95,18

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga(3) :

Untuk IKP 3 Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar 79,00% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 83% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 95,18% sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi *Covid-19* yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan.

Tabel III.1.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83	79,00	95,18

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut



c. SASARAN PROGRAM (3)

Sasaran Program **Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah **“Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :**

Tabel III.1.12. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

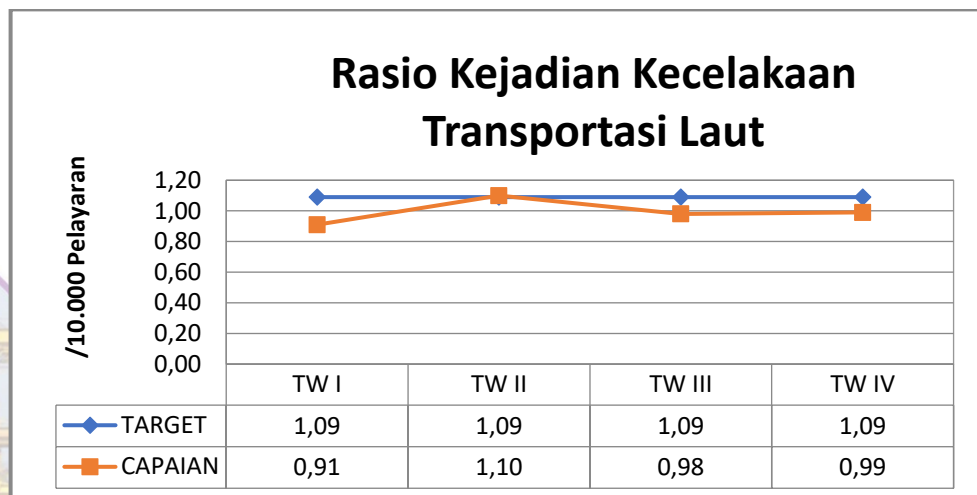
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,09	0,91	1,10	0,98	0,99	0,99	109,17

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2022 sebesar 1,09/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 0,91 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 18 orang), dan pada Triwulan II sebesar 1,10 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 42 orang) dan pada Triwulan III sebesar 0,98 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 9 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 110,1% dan pada Triwulan IV sebesar 0,99 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 13 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 109,17%.



Grafik III.1.4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut



Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut} = \frac{\Sigma \text{Kejadian Kecelakaan}}{\Sigma \text{SPB yang diterbitkan}} \times 10.000 \text{ Pelayaran}$$

$$\begin{aligned} \text{Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut} &= \frac{108}{1.085.515} \times 10.000 \text{ Pelayaran} \\ &= 0,99 \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(1,09 - (0,99 - 1,09))}{1,09} \times 100\% = 109,17$$

Pada tahun 2022 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan I sebanyak 262.000 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 13 kejadian, manusia sebesar 3 kejadian dan teknis 8 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,91 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 115,60%. Sedangkan pada Triwulan II dan Triwulan III sebanyak 566.133 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 26 kejadian, manusia sebesar 10 kejadian dan teknis 21 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,10 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 99,08%. Pada Triwulan IV sebanyak



1.141.758 dokumen dengan jumlah total kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 2 kejadian, manusia sebesar 2 kejadian, dan teknis 7 kejadian, sehingga untuk Total dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebanyak 1.085.515 dokumen dengan jumlah total kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 108 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,99 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 109,17%.

Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

- i. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
- ii. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
- iii. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
- iv. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
- v. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- vi. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- vii. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
- viii. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat



Tabel III.1.13. Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2022

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2022	
		ALAM	MANUSIA	TEKNIS		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	7	2	3	24	133.000	262.000
2	Februari	5	1	1		35.000	
3	Maret	2	0	3		94.000	
4	April	0	0	4	30	94.883	219.860
5	Mei	9	4	2		78.097	
6	Juni	6	1	4		46.880	
7	Juli	9	1	7	27	170.605	346.253
8	Agustus	2	1	3		91.996	
9	September	0	3	1		83.652	
10	Oktober	3	2	1	27	114.065	257.402
11	November	1	0	5		85.942	
12	Desember	1	0	14		57.395	
	TOTAL	45	15	48	108	1.085.515	1.085.515

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Tabel III.1.14. Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2022

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
1	Upp Tanjung Redeb	1	Alam	Januari
2	Upp Saumlaki	1	Alam	Januari
3	Upp Agats	1	Alam	Januari
4	Ksop Gresik	1	Manusia	Januari
5	Upp Sangkulirang	1	Manusia	Januari
6	Upp Sape	1	Alam	Januari
7	Ksop Patimban	1	Alam	Januari
8	Upp Labuhan	1	Alam	Januari
9	Upp Jampea	1	Alam	Januari
10	Ksop Samarinda	1	Teknis	Januari
11	Ksop Pare-Pare	1	Teknis	Januari
12	Ksop Tegal	1	Teknis	Januari
13	Ksop Tg Emas	1	Alam	Februari
14	Upp Lapuko	1	Alam	Februari
15	Ksop Selat Panjang	1	Teknis	Februari
16	Upp Raja Ampat	1	Alam	Februari
17	Ksop Merauke	1	Alam	Februari
18	Ksop Tarakan	1	Manusia	Februari
19	Upp Batang	1	Alam	Februari
20	Upp Manggar	1	Teknis	Maret
21	Ksop Bitung	1	Teknis	Maret
22	Upp Pangandaran	1	Teknis	Maret
23	Ksop Lembar	1	Teknis	Maret



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

24	Upp Geser	1	Alam	Maret
25	Ksop Toli-Toli	1	Teknis	April
26	Ksop Sabang	1	Teknis	April
27	Ksop Talang Dukuh	1	Teknis	April
28	Ksop Biak	1	Teknis	April
29	Ksop Badas	1	Teknis	Mei
30	Upp Sapeken	1	Alam	Mei
31	Upp Sape	1	Teknis	Mei
32	Upp Laiwui	1	Manusia	Mei
33	Ksop Tg Wangi	1	Alam	Mei
34	Upp Lewoleba	1	Manusia	Mei
35	Ksu Makassar	1	Alam	Mei
36	Upp Karimunjawa	1	Alam	Mei
37	Ksop Tg Balai Karimun	1	Alam	Mei
38	Upp Raha	1	Alam	Mei
39	Upp Tanjung Redeb	1	Alam	Mei
40	Ksop Kuala Langsa	1	Alam	Mei
41	Upp Kuala Gaung	1	Manusia	Mei
42	Ksop Bontang	1	Alam	Mei
43	Upp Sungai Lumpur	1	Manusia	Mei
44	Upp Satui	1	Teknis	Juni
45	Upp Branta	1	Manusia	Juni
46	Ksop Sukamara	1	Teknis	Juni
47	Ksop Khusus Batam	1	Teknis	Juni
48	Ksop Tg Balai Karimun	1	Teknis	Juni
49	Ksop Ambon	1	Alam	Juni
50	Upp Sapudi	1	Alam	Juni
51	Ksop Kotabaru-Batulicin	1	Alam	Juni
52	Ksop Marunda	1	Alam	Juni
53	Ksop Marunda	1	Alam	Juni
54	Ksop Labuhan Bajo	1	Alam	Juni
55	Upp Jampea	1	Alam	Juli
56	Ksop Kotabaru-Batulicin	1	Manusia	Juli
57	Upp Labuhan	1	Teknis	Juli
58	Ksop Padangbai	1	Alam	Juli
59	Ksop Padangbai	1	Alam	Juli
60	Upp Dobo	1	Teknis	Juli
61	Upp Sangkulirang	1	Teknis	Juli
62	Ksop Ternate	1	Alam	Juli
63	Upp Laiwui	1	Alam	Juli
64	Upp Masalembu	1	Alam	Juli
65	Upp Babang	1	Alam	Juli
66	Upp Wanci	1	Alam	Juli
67	Ksu Tg Priok	1	Teknis	Juli
68	Ksop Kumai	1	Teknis	Juli



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

69	Ksop Tg Balai Karimun	1	Teknis	Juli
70	Ksop Celukan Bawang	1	Alam	Juli
71	Ksop Bengkalis	1	Alam	Juli
72	Upp Laiwui	1	Teknis	Agustus
73	Ksop Kotabaru-Batulicin	1	Alam	Agustus
74	Upp Melonguane	1	Manusia	Agustus
75	Ksop Marunda	1	Alam	Agustus
76	Upp Babang	1	Teknis	Agustus
77	Ksop Kotabaru-Batulicin	1	Teknis	Agustus
78	Ksop Nunukan	1	Teknis	September
79	Upp Masalembu	1	Manusia	September
80	Upp Buli	1	Manusia	September
81	Upp Dobo	1	Manusia	September
82	KSU Tanjung Perak	1	Teknis	Oktober
83	UPP Belang-Belang	1	Alam	Oktober
84	Upp Ba'a	1	Manusia	Oktober
85	Ksop Kumai	1	Alam	Oktober
86	Upp Tulehu	1	Manusia	Oktober
87	Ksop Kupang	1	Alam	Oktober
88	Upp Dobo	1	Alam	November
89	UPP Dabo Singkep	1	Teknis	November
90	Upp Ranga Ilung	1	Teknis	November
91	Upp Labuhan	1	Teknis	November
92	Ksop Samarinda	1	Teknis	November
93	Upp Raha	1	Teknis	November
94	KSOP Muntok	2	Teknis	Desember
95	UPP Luwuk	1	Teknis	Desember
96	UPP Sungai Lumpur	1	Teknis	Desember
97	UPP Gilimanuk	3	Teknis	Desember
98	KSOP Kumai	2	Teknis	Desember
99	UPP Tanjung Silopo	1	Teknis	Desember
100	KSOP Kendari	2	Teknis	Desember
101	KSOP Palembang	1	Teknis	Desember
102	Ksop Sorong	1	Alam	Desember
103	Upp Brondong	1	Teknis	Desember
Total		108		

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :

- i. Faktor Manusia : Human Error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan
- ii. Faktor Alam : Cuaca Buruk
- iii. Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal



b) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4) :**

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 1,09/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 0,99/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 109,17% sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar 1,21/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 1,14/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 105,76% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2022 sebesar 108 kejadian sedangkan Tahun 2021 sebesar 100 kejadian).

Tabel III.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Target	1,21	1,09
				Realisasi	1,14	0,99
				Kinerja (%)	105,76	109,17

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4)**

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,99 /10.000 pelayaran dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 1,09/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaiannya sebesar 109,17% yang artinya melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2022 sebesar 108 kejadian).



Tabel III.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	1,09	0,99	109,17

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

5) Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) adalah **“Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :**

Tabel III.1.17. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

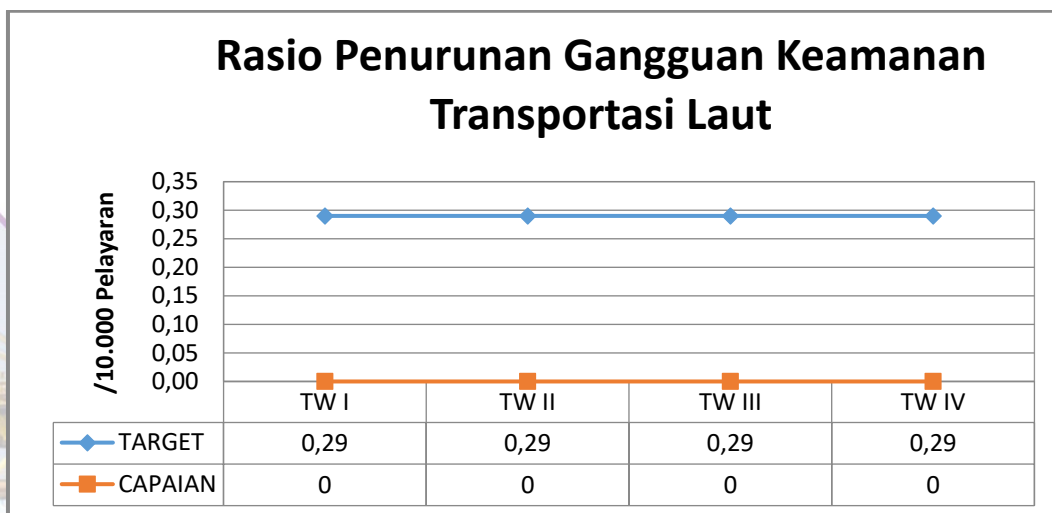
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,28	0	0	0	0	0	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 0,29/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan I sampai Triwulan IV tidak terdapat laporan gangguan keamanan sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Grafik III.1.5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut



Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tidak terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Belayar yang diterbitkan adalah berjumlah 1.085.515, sehingga realisasi mencapai 200%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{0 \text{ kejadian}}{1.085.515} \times 100.000 \text{ SPB} = 0$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(0,29 - (0 - 0,29))}{0,29} \times 100\% \\ &= 200 \end{aligned}$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan Maritime yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut :

- i. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
- ii. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;
- iii. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya, tempat penyimpanan kapal;



- iv. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
- v. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
- vi. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;
- vii. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
- viii. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;
- ix. Penyerangan ketika di laut.

Dalam rangka mengurangi gangguan keamanan transportasi laut langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yaitu:

- i. Melaksanakan verifikasi manajemen keamanan fasilitas pelabuhan setiap 2.5 tahun sekali;
- ii. Melaksanakan verifikasi keempat (tambahan) manajemen keamanan fasilitas pelabuhan yang dilaksanakan sewaktu-waktu;
- iii. Menginstruksikan UPT untuk melaksanakan inspeksi bulanan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No UM. 008/45/15/DJPL-14;
- iv. Menginstruksikan agar faspel melaksanakan training/ sosialisasi keamanan fasilitas pelabuhan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No. UM.003/17/14/DJPL-15.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Ditjen Perhubungan Laut dalam Pencegahan Gangguan Keamanan Pelayaran sebagai berikut :

- i. Patroli rutin yang dilaksanakan oleh unsur penegakan hukum oleh UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di wilayah pelabuhan maupun perairan;
- ii. Melakukan patroli gabungan dengan unsur penegakan hukum dari Institusi Polri dan TNI;
- iii. Pengadaan senjata api di atas Kapal Patroli;
- iv. *Exercise* penggunaan senjata api patroli;
- v. Pembangunan Kapal Patroli KPLP.



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 0,28/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentase pencapaian sebesar 200% sedangkan Tahun 2021 target sebesar 0,29/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentasenya sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.1.18. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	Target	0,29	0,28
				Realisasi	0	0
				Kinerja (%)	200	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, pada Tahun 2022 tidak terdapat realisasi yaitu 0/100.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,28/100.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian sebesar 200%, sedangkan Tahun 2021 target sebesar 0,29/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentasenya sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Tabel III.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 pelayaran	0,28	0	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

6) Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) adalah **“Tingkat Kehandalan Kenavigasian”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam:**

Tabel III.1.20. Tingkat Kehandalan Kenavigasian

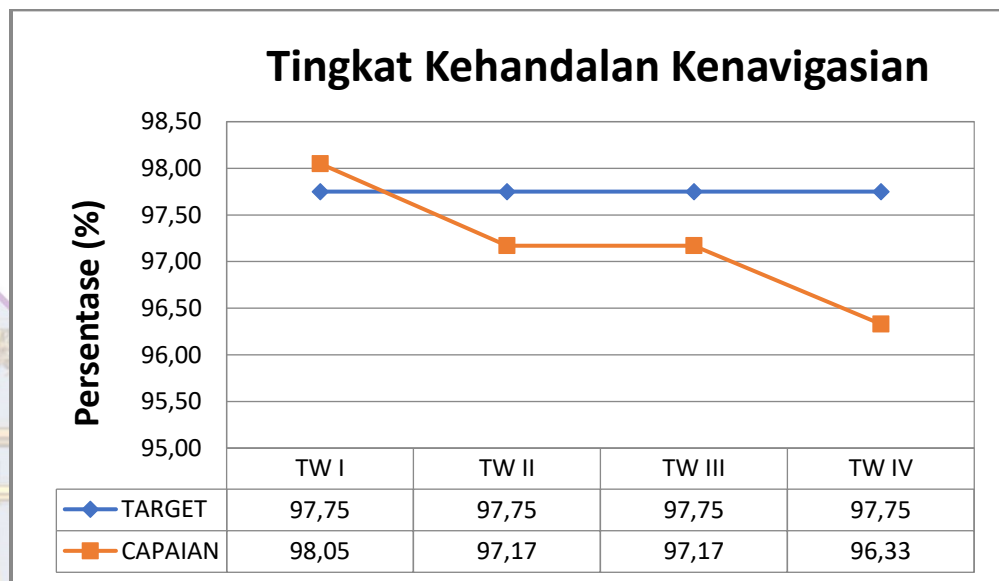
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	98,05	97,17	97,17	96,33	96,33	98,55

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 98,05% dan pada Triwulan II, Triwulan III sebesar 97,17 dan triwulan IV sebesar 96,33% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 98,55% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / *automatic adjustment* anggaran untuk biaya pemeliharaan.



Grafik III.1.6. Tingkat Keandalan Kenavigasian



Tingkat Keandalan Kenavigasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Keandalan Kenavigasian

$$= \frac{\text{Tingkat Keandalan SBNP} + \text{Tingkat Keandalan Telkompel}}{2}$$

$$= \frac{94,83 \% + 97,83\%}{2}$$

$$= 96,33 \%$$

Tingkat Keandalan SROP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{hari SROP yang berfungsi dalam 1 tahun}}{\sum \text{SROP eksisting} \times 365 \text{ hari}}$$

$$\text{Tingkat Keandalan SROP} = \frac{57.670}{158 \times 365} \times 100\% = \frac{57.670}{57.670} = 100\%$$

Tingkat Keandalan VTS dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\sum \text{hari VTS berfungsi dalam 1 Tahun}}{\sum \text{VTS eksisting} \times 365 \text{ hari}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Keandalan VTS} = \frac{8.030}{23 \times 365} \times 100\% = \frac{8.030}{8.395} = 95,65\%$$



Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan I tahun 2022 sebanyak 4.961 unit, terdiri dari 2.946 milik DJPL dan 2.021 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 14.555 hari. Pada jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan II tahun 2022 sebanyak 4.997 unit, terdiri dari 2.956 milik DJPL dan 2.041 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) = 28.701 hari. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan III tahun 2022 sebanyak 4.997 unit, terdiri dari 2.956 milik DJPL dan 2.041 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) = 47.427 hari. Sedangkan jumlah SBNP yang bersuar di triwulan IV tahun 2022 sebanyak 5.025 unit, terdiri dari 2.981 milik DJPL dan 2.044 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) = 94.740 hari. Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Hari Kelainan}}{365 \text{ hari} \times \sum \text{SBNP Bersuar}} \times 100 \% = \frac{94.740}{365 \text{ hari} \times 5.025} \times 100 \% = 5.17\%$$

Sehingga Tingkat Kehandalan SBNP adalah $100\% - 5,17\% = 94,83\%$.

Sedangkan Tingkat Kehandalan Telkompel dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kehandalan Telkompel} &= \frac{\text{Tingkat Kehandalan SROP} + \text{Tingkat Kehandalan VTS}}{2} \\ &= \frac{100 \% + 95,65 \%}{2} \\ &= 97,83 \% \end{aligned}$$

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian telah melakukan upaya – upaya untuk Peningkatkan Kehandalan Kenavigasian sebagai berikut :

- i. Direktorat Kenavigasian akan berkirin surat ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut terkait Pemeliharaan SBNP yang mengalami kerusakan;
- ii. Melakukan Pemeliharaan SBNP dari masing – masing UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut yang mengalami kerusakan;
- iii. Mengupayakan dipenuhinya kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kehandalan baik SBNP maupun Telekomunikasi Pelayaran.



b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam :

Untuk IKP 6 Tingkat Keandalan Kenavigasian, yaitu pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 97,75 % dengan realisasi sebesar 96,33% sehingga persentase pencapaian sebesar 98,55% sedangkan Tahun 2021 target sebesar 97,25% dengan realisasi sebesar 97,95% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100,72%. Pada Tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / *automatic adjustment* anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Tabel III.1.21. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Target	97,25	97,75
				Realisasi	97,95	96,33
				Kinerja (%)	100,72	98,55

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam (6) :

Untuk IKP 6 Tingkat Keandalan Kenavigasian, pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 96,33% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 97,75% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 98,55%. Pada Tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / *automatic adjustment* anggaran untuk biaya pemeliharaan



Tabel III.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,75	96,52	98,74

Sumber data : Direktorat Kenavigasian Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

d. SASARAN PROGRAM (4)

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 7) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) adalah **“Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)”**
- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh:**

Tabel III.1.23. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,6	0,527	0,583	0,651	0,715	0,715	119,2

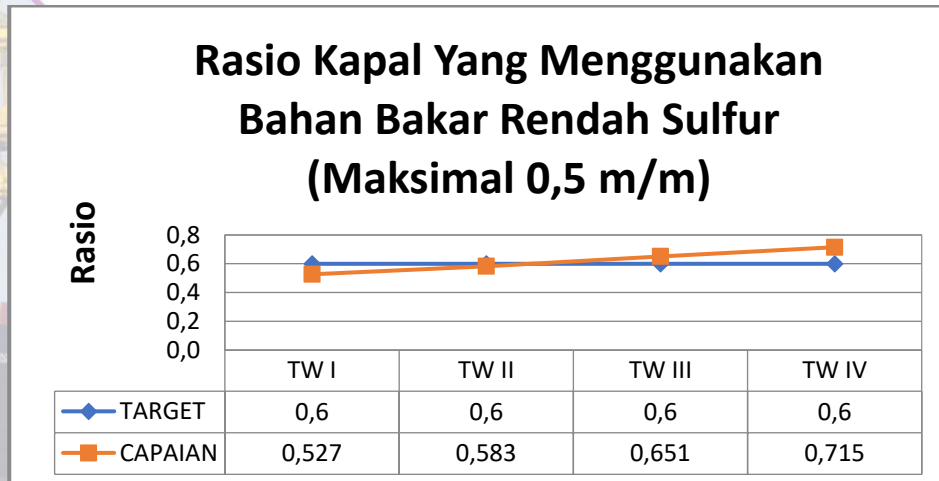
Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2022 Rasio sebesar 0,6. Pencapaian Triwulan I rasio sebesar 0,527 sehingga prosentase pencapaian terhadap target saat ini sebesar 87,8%,



sedangkan pada Triwulan II rasio tercapai sebesar 0,583, sehingga prosentase pencapaian terhadap target saat ini sebesar 97,17%, pada Triwulan III tercapai sebesar 0,651 dan pada triwulan ke IV tercapai sebesar 0,715 sehingga persentase capaian terhadap target telah tercapai 119,2%. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan karena merupakan akumulasi realisasi dari periode sebelumnya yang selalu melebihi target tahunan sehingga berdampak terhadap realisasi tahun berjalan.

Grafik III.1.7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)



Rumus perhitungan:

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

$$= \frac{\text{Jumlah sertifikat pencegahan pencemaran (IAPP dan SNPP)}}{\text{Jumlah kapal berbendera Indonesia > 400GT yang terdaftar}}$$

Tabel III.1.24. Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	TOTAL
Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	7.280	7.546	7.899	8.183	8.427	8.755	9.073	9.410	9.798	10.098	10.441	10.763	10.763
Jumlah kapal >400GT terdaftar	14.986	14.986	14.986	15.006	15.006	15.006	15.047	15.047	15.047	15.047	15.047	15.047	15.047

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Aplikasi kapal.dephub.go.id, Ditjen. Perhubungan Laut.

Note : Sertifikat pencegahan pencemaran merupakan bukti bahwa kapal yang bersangkutan memenuhi kriteria diantaranya menggunakan bahan bakar rendah sulfur.



Penerbitan sertifikat Pencegahan Pencemaran dilaporkan setiap bulan dengan memaparkan jumlah penerbitan sertifikat jenis Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) yang diperuntukkan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran >7 GT yang memiliki daerah pelayaran dalam negeri dan/atau Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (*International Air Pollution Prevention/IAPP*) untuk kapal berbendera Indonesia berukuran >400GT yang berlayar secara internasional. Dalam sertifikat tersebut terdapat klausul yang menyatakan kadar kandungan sulfur pada bahan bakar yang dipakai oleh sebuah kapal. Persyaratan penerbitan sertifikat ini adalah sebagai berikut:

- i. Surat Permohonan;
- ii. *Copy* Sertifikat IAPP/SNPP Sementara/Sebelumnya (untuk renewal);
- iii. Buku Laporan Pemeriksaan *Marine Inspector*;
- iv. *Copy* Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal;
- v. *Copy* Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut atau Pas Besar).

Informasi kadar sulfur diperoleh pada saat *Marine Inspector* melakukan pemeriksaan teknis kapal dibuktikan dengan nota kualitas BBM yang diperoleh dari suplier BBM saat pengisian. Apabila dirasa terdapat bias, *Marine Inspector* di lapangan dapat melakukan pengecekan langsung menggunakan alat *portable sulfur in fuel oil analyzer*. Setelah hal tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku sertifikat dapat diproses lebih lanjut. Pengecekan teknis lapangan dapat dibantu oleh *Marine Inspector* dari Unit Pelaksana Teknis DJPL di wilayah kapal tersebut bersandar dengan hasil berupa penerbitan sertifikat sementara, untuk selanjutnya perlu dilakukan penerbitan sertifikat permanen di Kantor Pusat DJPL (c.q. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan).

Selain dari sertifikat pencegahan pencemaran yang diterbitkan mulai tahun 2020, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tentang Batasan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal menyatakan bahwa semua pemilik/operator kapal yang memiliki/mengoperasikan kapal yang berukuran GT 5000 atau lebih wajib mengumpulkan data pemakaian bahan bakar kapalnya selama satu tahun melalui aplikasi dcs-ditkapel.dephub.go.id.



Kendala tim teknis pada saat melakukan penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

- i. Kurangnya jumlah tenaga fungsional teknis (*Marine Inspector*) pada Subdirektorat yang menangani. Banyaknya permohonan yang masuk sehingga *load* pekerjaan meningkat selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang mengalami promosi jabatan dan belum memiliki pelaksana pengganti;
- ii. Jumlah alat pemeriksa kadar sulfur saat ini masih terbatas. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan alat sebanyak 9 unit dengan penerima Kantor Pusat Ditkapel, KSU Tanjung Priok, KSU Tanjung Perak, KSU Makassar, KSU Belawan, KSOP Khusus Batam, KSOP Kelas I Dumai, KSOP Kelas I Banten, dan KSOP Kelas I Balikpapan serta pada tahun 2022 terdapat penambahan 4 unit dengan lokasi penerima KSOP Kelas I Ambon, KSOP Kelas I Panjang, KSOP Kelas I Tanjung Emas, dan KSOP Kelas I Sorong;
- iii. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyampaikan permohonan sekaligus pemrosesan penerbitan sertifikat masih perlu dikembangkan dengan menambah fitur-fitur yang memudahkan pengguna juga petugas dalam mengolah data. Proses penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara *online* dikarenakan output sertifikat masih menggunakan blanko cetak sehingga masih memerlukan kontak fisik dengan pengguna jasa untuk pengambilan sertifikat yang telah diterbitkan.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), yaitu pada Tahun 2022 terdapat target sebesar 0,6 Rasio dengan realisasi sebesar 0,715 rasio sehingga persentase pencapaian sebesar 119,2%, sedangkan Tahun 2021 target sebesar 0,4 rasio dengan realisasi sebesar 0,468 rasio sehingga persentase pencapaiannya sebesar 117% sehingga realisasinya melebihi target yang ditetapkan karena sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar *Low Sulfur* dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.



Tabel III.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Target	0,4	0,6
				Realisasi	0,468	0,715
				Kinerja (%)	117	119,2

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar 0,715 rasio dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,6 rasio sehingga persentase pencapaiannya sebesar 119,2 % dan melebihi target yang ditetapkan karena diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan tersebut.

Tabel III.1.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,6	0,715	119,2

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut



8) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) adalah “**Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan**”

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target PK Revisi Tahun 2022 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):**

Tabel III.1.27. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2022					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I belum terdapat laporan kejadian pencemaran sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% artinya pada Tahun 2022 sampai dengan posisi 30 Oktober 2022 tidak terdapat laporan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berhasil ditanggulangi. Sedangkan pada Triwulan II terdapat 1 laporan kejadian pencemaran di Teluk Penyu sekitar Dermaga Wijayapura Pelabuhan Cilacap yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%. Dan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat 3 laporan kejadian pencemaran di Wilayah Kerja PHE OSES Koordinat 05°12'515" S 106°12'335" E, Perairan KSU Belawan dan Perairan Tanjung Uncang Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%.



Grafik III.1.8. Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi



Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.58 Tahun 2013 bahwa Syahbandar mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, Tuks dan BUP di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \rightarrow \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi = Jumlah kejadian pencemaran yang berhasil ditanggulangi

Target = Jumlah kejadian pencemaran selama periode evaluasi



Tabel III.1.28. Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi

NO	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TANGGAL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
1.	28 Juni 2022	Teluk Penyu sekitar Dermaga Wijayapura dan Area 70	----	----	Terdapat kebocoran pipa di Pelabuhan PT. KPI demaga 4	Minyak Mentah	± Liter	a. PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit Cilacap melakukan pembersihan ceceran minyak di area perairan Cilacap sekitar Dermaga Wijayapura dan Area 70.
2.	5 Juli 2022	Pertamina OSES 05 12 515 S dan 106 12 335 E			Terdapat kebocoran pipa		± Liter	a. Pihak PHE OSES telah berkordinasi dengan KSOP terkait telah ditanggulangi menggunakan peralatan dan personil PHE OSES.
3.	7 Oktober 2022	PT. Pacific Palmino Industri (PT. PPI) dermaga 105 Pelabuhan Ujung Baru	MT. No. 2 Asean Pioner	Motor Tanker	Terdapat tumpahan minyak saat loading dari kapal	cpo		a. Pihak PT. PPI telah berkordinasi dengan KSU Belawan terkait telah ditanggulangi menggunakan peralatan dan personil PT. PPI; b. KSU Belawan, PT. PPI dan PFSO PT. Pelindo Cabang Belawan melakukan tinjauan di daerah sekitar tumpahan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tumpahan minyak yang terdapat di daerah terdampak.



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

4.	9 November 2022	Dermaga 3 PT. Sarana Citra Nusa Kabil	MV. KOGA REVOLUTION	Motor Tanker	Terdapat kebocoran di lambung sebelah kanan bagian buritan			a. pihak MV. Koga Revolution telah berkoordinasi dengan KSOP Khusus Batam terkait telah ditanggulangi menggunakan peralatan dan bahan; b. KSOP Khusus Batam, Wilker Kabil melakukan tinjauan di daerah sekitar tumpahan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tumpahan minyak yang terdapat di daerah terdampak.
5.	30 november 2022	PT. PAX OCEAN – TANJUNG UNCANG (BATAM)	-	-	Terdapat pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak di sekitar pertairan dermaga PT. Pax Ocean-Tanjung Uncang	Marine Fuel Oil (MFO)		a. Pihak PT. Pax Ocean-Tanjung Uncang telah berkoordinasi dengan KSOP Khusus Batam terkait telah ditanggulangi menggunakan peralatan dan bahan; c. KSOP Khusus Batam, Wilker Kabil melakukan tinjauan di daerah sekitar tumpahan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tumpahan minyak yang terdapat di daerah terdampak.

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 sama, yaitu terdapat target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase pencapaian sebesar 100% artinya pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.



Tabel III.1.29. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

IKU (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	IKP (TAHUN 2022)	SATUAN TAHUN 2022	KRITERIA	TAHUN	
					2021	2022
Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Target	100	100
				Realisasi	100	100
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan :

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh Kegiatan Kapal di Pelabuhan, pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 100% sehingga pencapaian kinerjanya 100% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan artinya pada Tahun 2022 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.

Tabel III.1.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut





B. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tabel III.2.1. Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET & Realisasi PK			PAGU Rp.	REALISASI		Capaian (%)
								Rp.	Fisik (%)	
				T	R	%				
1.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai	98,24	97,38		9.285.062.108.000	9.042.086.939.709		99,12

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diakses pada tanggal 31 Desember 2022 yang diakses tanggal 25 Januari 2023



C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2022 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3.1. Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	1.983.592.432.000	1.803.175.538.000	1.750.658.742.049
2.	Belanja Barang	3.626.586.132.000	4.070.950.641.000	4.017.116.319.788
	Rupiah murni (RM)	1.946.208.964.000	2.112.317.065.000	2.087.878.792.946
	PNBP	1.676.198.072.000	1.950.275.278.000	1.921.945.893.327
	Pinjaman LN	-		
	Badan Layanan Umum (BLU)	4.179.096.000	4.816.415.000	3.750.850.515
	Hibah LN	-	3.541.883.000	3.540.783.000
3.	Belanja Modal	3.344.725.932.000	3.410.935.929.000	3.274.311.877.872
	Rupiah murni (RM)	1.150.938.953.000	965.933.686.000	951.649.439.902
	PNBP	476.155.260.000	473.257.957.000	471.170.750.568
	Pinjaman LN	954.179.120.000	1.194.744.637.000	1.145.058.251.821
	Badan Layanan Umum (BLU)	4.295.904.000	3.658.585.000	2.146.344.460
	Hibah LN	-	14.109.983.000	14.109.982.954
	SBSN	759.156.695.000	759.231.081.000	690.177.108.167
	TOTAL PAGU	8.954.904.496.000	9.285.062.108.000	
	TOTAL REALISASI			9.042.086.939.709
	TOTAL SISA DANA			242.975.168.291

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
(Posisi dan diakses pada tanggal 31 Desember 2022 yang diakses tanggal 25 Januari 2023)



Selama tahun 2022 Revisi Anggaran telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

- a. Revisi 1 (pengesahan Nomor S-959/AG/AG.3/2021 tanggal 14 Desember 2021)
Revisi anggaran berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara tetap dengan merevisi proses blokir *automatic adjustment* belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp256.082.370.000,00, *automatic adjustment* yang bersumber dari belanja pegawai (sumber dana RM) sebesar Rp193.556.366.000,00, *automatic adjustment* yang bersumber dari belanja barang dan modal (sumber dana RM) sebesar Rp62.526.004.000,00 dengan pertimbangan perubahan prioritas anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, mempercepat pencapaian kinerja kementerian, dan volume *output* tetap.
- b. Revisi 2 (pengesahan Nomor S-85/AG/AG.3/2022 tanggal 23 Februari 2022)
Revisi anggaran berupa penambahan pagu lanjutan kegiatan penggunaan sisa anggaran SBSN yang tidak terserap tahun 2021 pada satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinjai sebesar Rp74.386.000,00 dengan pertimbangan perubahan prioritas anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, mempercepat pencapaian kinerja kementerian, dan volume *output* tetap.
- c. Revisi 3 (pengesahan Nomor S-121/AG/AG.3/2022 tanggal 17 Maret 2022)
Revisi anggaran berupa ralat administratif perubahan Catatan Halaman IV.B DIPA TA 2022 pada 3 (tiga) satker Ditjen Perhubungan Laut, Perubahan/penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (blokir) TA 2022 pada kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Tana Paser, sumber dana Rupiah Murni (RM), sebesar Rp19.500.000.000,00 Selanjutnya mengganti kegiatan *automatic adjustment* (blokir 5%) dari kegiatan/item Tunjangan Kinerja (belanja pegawai) pada Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut dengan jumlah yang sama, dan Pergeseran/relokasi anggaran antar satker sebesar Rp65.007.538.000,00, terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp26.800.838.000,00 dan sumber PNBPNP sebesar Rp38.206.700.000,00.
- d. Revisi 4 (usulan revisi)
Revisi anggaran berupa realokasi/pergeseran anggaran antar program T.A. 2022 sebesar Rp4.626.648.000 (sumber dana RM), revisi pencantuman catatan halaman IV.B DIPA T.A. 2022 dalam rangka pembayaran tunggakan sebesar Rp185.000,00 dan realokasi/pergeseran anggaran antar satker T.A. 2022 dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan di bidang keperintisan sebesar Rp58.351.309.000 (sumber dana PNBPNP).
- e. Revisi 5 (Pengesahan Nomor S-184/AG/AG.3/2022)
Revisi anggaran berupa revisi pergeseran/relokasi anggaran antar satker sebesar Rp11.663.012.000,00, guna mendukung kegiatan Penyelenggaraan Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut TA 2022.
- f. Revisi 6 (Usulan Revisi Anggaran)
Mengusulkan penambahan blokir anggaran *automatic adjustment* belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp257.744.320.000,00 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dikarenakan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.
- g. Revisi 7 (Pengesahan Nomor S-327/AG/AG.3/2022)
Penambahan blokir anggaran *automatic adjustment* belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp257.744.320.000,00 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dikarenakan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.



h. Revisi 8 (Usulan Revisi Anggaran)

Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar satuan kerja T.A. 2022 dalam rangka memenuhi kekurangan pembayaran tunggakan dan kebutuhan anggaran di bidang keperintisan serta kegiatan prioritas lainnya sebesar Rp26.634.723.000,00 dengan sumber dana RM sebesar Rp13.732.575.000,00 dan sumber dana PNPB sebesar Rp12.902.148.000,00, selain itu terdapat buka blokir sebesar Rp10.000.000.000,00 yang bersumber dari PNPB serta Rp7.848.952.000,00 yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) terkait kegiatan TIK yang telah mendapatkan *clearance* dan adanya revisi realokasi/pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) satuan kerja T.A. 2022 sebesar Rp17.596.502.000,00 yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM).

i. Revisi 9 (Pengesahan Nomor S-430/AG/AG.3/2022)

Revisi dalam rangka perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara berubah karena adanya perubahan prioritas penggunaan anggaran dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, mempercepat pencapaian kinerja K/L dengan volume output yang tetap. Penambahan pagu penggunaan PNPB Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp271.179.903.000,00 dan penambahan target PNPB di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.073.742.923.000,00

j. Revisi 10 (Pengesahan Nomor S-509/AG/AG.3/2022)

Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) *automatic adjustment* guna memenuhi kekurangan belanja pegawai, sebesar Rp58.507.470.000,00, Pergeseran/relokasi anggaran belanja pegawai antar satker sebesar Rp23.643.873.000,00, dan Pergeseran/relokasi anggaran antar satker sebesar Rp17.853.985.000,00, yang terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp6.971.808.000,00; dan PNPB sebesar Rp10.882.177.000,00

k. Revisi 11 (Pengesahan Nomor S-547/AG/AG.3/2022)

Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) *automatic adjustment* guna memenuhi pengadaan pelampung suar pada Distrik Navigasi Benoa dan penyelenggaraan angkutan laut perintis, sebesar Rp24.430.700.000,00, Pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN pada proyek strategis nasional (PSN) Pembangunan Pelabuhan Patimban sebesar Rp71.681.239.747,00, (dalam aplikasi RKA-KL dibulatkan Rp71.681.240.000,00) dan Penambahan pagu anggaran PLN Loan No.3792-INO:EARR dalam rangka percepatan pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Teluk Palu, sebesar Rp94.351.105.026,00

l. Revisi 12 (Pengesahan Nomor S-557/AG/AG.3/2022)

Pergeseran/relokasi pemanfaatan sisa anggaran kontraktual sumber dana SBSN antar satker dalam program yang sama sebesar Rp22.643.203.000,00, telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

m. Revisi 13 (Usulan Revisi)

Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA (buka blokir) *automatic adjustment* dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran sebesar Rp62.872.843.000,00 (sumber dana RM) dengan rincian penyelenggaraan layanan angkutan laut perintis mekanisme penugasan sebesar Rp42.532.673.000,00 dan BBM kapal kenavigasian dan patroli sebesar Rp20.340.170.000,00.

n. Revisi 14 (Pengesahan Nomor S-644/AG/AG.3/2022)

Revisi anggaran berupa penyesuaian/pemotongan pagu belanja pegawai yang berasal dari blokir *automatic adjustment* TA. 2022 (sumber dana RM) sebesar Rp 154.119.889.000,-.



- o. Revisi 15 (Pengesahan Nomor S-749/AG/AG.3/2022)
1. Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2022 dalam rangka memenuhi kekurangan pembayaran tunggakan dan kebutuhan anggaran di bidang keperintisan serta kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 33.432.906.000,- dengan rincian:
 - a) Sumber dana RM sebesar Rp 15.061.632.000,-;
 - b) Sumber dana PNBPNP sebesar Rp 18.371.274.000,-.
 2. Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai (sumber dana RM) sebesar Rp 22.265.073.000,
 3. Perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA TA. 2022 untuk kegiatan teknologi informasi sebesar Rp 2.000.000.000,- yang bersumber dari dana RM.
 4. Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam 1 (satu) Satker TA. 2022 sebesar Rp 8.000.000.000,- yang bersumber dari dana RM.
- p. Revisi 16 (Pengesahan Nomor S-791/AG/AG.3/2022)
- Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA (buka blokir) automatic adjustment tahap IV Ditjen Perhubungan Laut TA. 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran subsidi kapal perintis penugasan dan pelelangan umum, pengoperasian kapal rede serta kebutuhan prioritas lainnya terkait operasi kapal kenavigasian dan kapal patroli (sumber dana RM) sebesar Rp 97.678.773.000,-. Realokasi/pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker TA. 2022 (sumber dana RM) dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran subsidi kapal perintis penugasan sebesar Rp 3.461.956.000,-.
- q. Revisi 17 dan 18 (Pengesahan Nomor S-821/AG/AG.3/2022)
1. Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran di bidang keperintisan serta kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (sumber dana PNBPNP) sebesar Rp 12.556.468.000,-.
 2. Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai (sumber dana RM) sebesar Rp 848.006.000,-.
- r. Revisi 19 (Pengesahan Nomor S-888/AG/AG.3/2022)
- a. Penyesuaian/pemotongan pagu belanja Ditjen Perhubungan Laut yang berasal dari sisa blokir automatic adjustment TA. 2022 (sumber dana RM) sebesar Rp 116.217.015.000,-.
 - b. Revisi realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (sumber dana PNBPNP) sebesar Rp 1.460.772.000,-.



1. Realisasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2022

Tabel III.3.2. Realisasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2022
akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	31.656.770.000	28.843.364.000	28.749.239.489
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	3.151.613.336.000	2.953.521.969.000	2.885.272.432.447
3	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	27.872.417.000	30.538.618.000	30.426.354.421
4	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	7.906.893.000	8.537.104.000	8.493.813.310
5	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	743.328.628.000	862.194.065.000	797.144.029.405
6	Pelayanan Transportasi Laut	1.534.865.666.000	1.887.472.323.000	1.873.726.048.385
7	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	2.844.268.757.000	2.961.174.328.000	2.885.936.116.980
8	Penunjang Teknis Transportasi Laut	613.392.029.000	552.787.537.000	532.353.936.298
TOTAL		8.954.904.496.000	9.285.062.108.000	9.042.086.939.709

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal. Perhubungan Laut
(Posisi dan diakses pada tanggal 31 Desember 2022 yang diakses tanggal 25 Januari 2023)



Tabel III.3.3. Rincian Anggaran Yang Tidak Terserap Tahun 2022

NO.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	52.516.795.951	Sisa Belanja Pegawai akibat dari tunjangan kinerja yang semula dihitung full namun realisasinya dihitung sesuai kehadiran dan ketepatan laporan kinerja
2.	Belanja Barang (rupiah murni)	24.438.272.054	Sisa Belanja Barang Operasional (Perjadin, Pemeliharaan, ATK, DII) tersebar di 302 satker
3.	Belanja Barang (PNBP)	28.329.384.673	Sisa Belanja Barang non Operasional (Kegiatan keperintisan, Perawatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin DII) tersebar di 302 satker
	Belanja Barang (BLU)	1.065.564.485	
	Belanja Barang (Hibah Langsung Luar Negeri)	1.100.000	
	Belanja Modal (rupiah murni)	14.284.246.098	Kapal Patroli kelas IV sebesar Rp. 9 Miliar dan Sisa Belanja Modal Tersebar di 302 Satker
	Belanja Modal (PHLN)	49.686.385.179	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban Phase 1-2 tidak terserap sebesar 39,7 Miliar, Phase 1-1 sebesar Rp. 8,3 Miliar
	Belanja Modal (PNBP)	2.087.206.432	Sisa Belanja Modal Tersebar di 302 Satker
	Belanja Modal (SBSN)	69.053.972.833	Sisa Kontrak kegiatan pembangunan kapal patroli 46 Miliar, SBSN Ksop patimban 11 Miliar, SBSN Container Yard Tual Rp. 4,4 Miliar dan kegiatan pembangunan fasilitas dermaga tanjung ular 2,3 Miliar
	Belanja Modal (BLU)	1.512.240.540	
	Belanja Modal (Hibah Langsung Luar Negeri)	46	
TOTAL		242.975.168.291	



Tabel III.3.4. Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Indikator Kegiatan Program	Target	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	98,24%	9.285.062.108.000	9.042.086.939.709	97,38	
TOTAL						

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
(Posisi 31 Desember 2022 dan diakses pada tanggal 25 Januari 2023).

Tabel III.3.5 Realisasi Belanja Per Program

NO.	Kode		Kode	Pagu	Real	%	Sisa
1.	022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.263.621.053.000	6.089.160.131.068	97,21%	174.460.921.932	174.460.921.932
2.	022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.021.441.055.000	2.952.926.808.641	97,73%	68.514.246.359	68.514.246.359
			9.285.062.108.000	9.042.086.939.709	97,38%	242.975.168.291	242.975.168.291

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
(Posisi 31 Desember 2022 dan diakses pada tanggal 25 Januari 2023).



Tabel III.3.6. Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,90	0,91	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Pagu Awal = 35.000.000.000 Pagu Revisi = 41.589.102.000	41.589.102.000	0	Layanan telah dilaksanakan dengan 16 Kapal Rede sbb : KM Gandha Nusantara 4 Karimun Jawa, 5 Kwandang, 6 Daruba, 7 Tg.Balai Karimun, 8 Tg.Balai Karimun, 9 Bima, 10 Karimun Jawa, 12 Maumere, 13 Likupang, 14 Lewoleba, 15 P. Yefman, 16 Liana Banggai, 17 Soasiu, 18 Manado, 19 Raha, 20 Labuan Bajo
						Layanan angkutan perintis prioritas	Pagu Awal = 84.942.275.000 Pagu Revisi = 143.395.162.000	524.047.613.000	0	Layanan telah dilaksanakan dengan 44 Kapal Perintis melalui mekanisme



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
						nasional (PEN) (44 layanan)	Pagu Revisi = 199.996.375.000 Pagu Revisi = 418.182.417.000 Pagu Revisi = 524.047.613.000			penugasan kepada BUMN PT. PELNI. Lokasi : Sinabang, Teluk Bayur, Bengkulu, Tanjung Pinang, Kijang, Kotabaru, Surabaya, Kupang, Bitung, Tahuna, Kwandang, Kendari, Makassar, Ternate, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong
						Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Pagu Awal = 825.293.622.300 Pagu Revisi = 799.971.905.093 Pagu Revisi = 725.525.569.734 Pagu Revisi =	712.339.098.537	2	Layanan telah dilaksanakan dengan 73 Kapal Perintis melalui mekanisme pelelangan kepada perusahaan Pelayaran Swasta. Lokasi : Calang, Teluk



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
							723.703.581.764 Pagu Revisi = 733.595.754.719			Bayur, Sintete, Pontianak, Kotabaru, Tarakan, Semarang, Kalianget, Bima, Kupang, Maumere, Waingapu, Gorontalo, Tilamuta, Mamuju, Poso, Wani, Pagimana, Kolonedale, Parigi, Ampana, Kendari, Ternate, Babang, Sanana, Ambon, Tual, Saumlaki, Jayapura, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong
						Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Pagu Awal = 435.818.087.000 Pagu Revisi = 420.839.409.000	420.831.757.116	10	Layanan telah dilaksanakan dengan menggunakan 33 Kapal Tol Laut, baik milik Ditjen Hubla maupun milik Perusahaan



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	27					Pelayaran Swasta. Lokasi : Tanjung Perak, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Makassar, Bitung, Sorong, Biak, Merauke, Timika, Kupang
							Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Pagu Awal = 63.426.377.000 Pagu Revisi = 61.542.008.000	61.539.526.513	20	Layanan angkutan ternak 6 kapal milik Ditjen Hubla. Lokasi : Kupang dan Kwandang
							Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	-	-	.-	



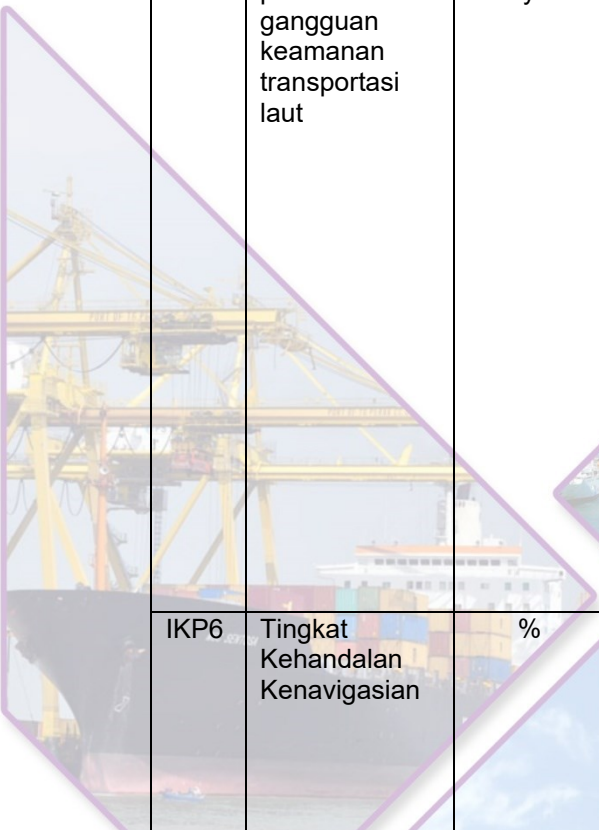
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83	79,00	Evaluasi Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	359.150.000	346.877.000		
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,09	0,92	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Pagu Awal : 196.074.000 Pagu Akhir : 100.000.000	100.000.000		
							Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Pagu Awal : 100.000.000 Pagu Akhir : 30.000.000	30.000.000		
							Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Pagu Awal : 100.000.000 Pagu Akhir : 30.000.000	25.078.062	-	
							Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal	Pagu Awal : 100.000.000 Pagu Akhir :	54.255.836	-	



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
						berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional	64.000.000			
						Sosialisasi keselamatan pelayaran	Pagu Awal : 1.134.560.000 Pagu Akhir : 512.500.000	434.899.998		
						Pembangunan Kapal Patroli	Pagu Awal 128.274.000.000 Pagu Akhir : 123.468.505.000	67.502.130.156		Kapal Kls III MYC (2022-2023) persiapan kontrak, Kapal Kls IV (MYC 21-22) selesai, Kapal Kls IV MYC 22-23 proses tender ulang
						Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	7.450.000.000	0		Automatic Adjustment



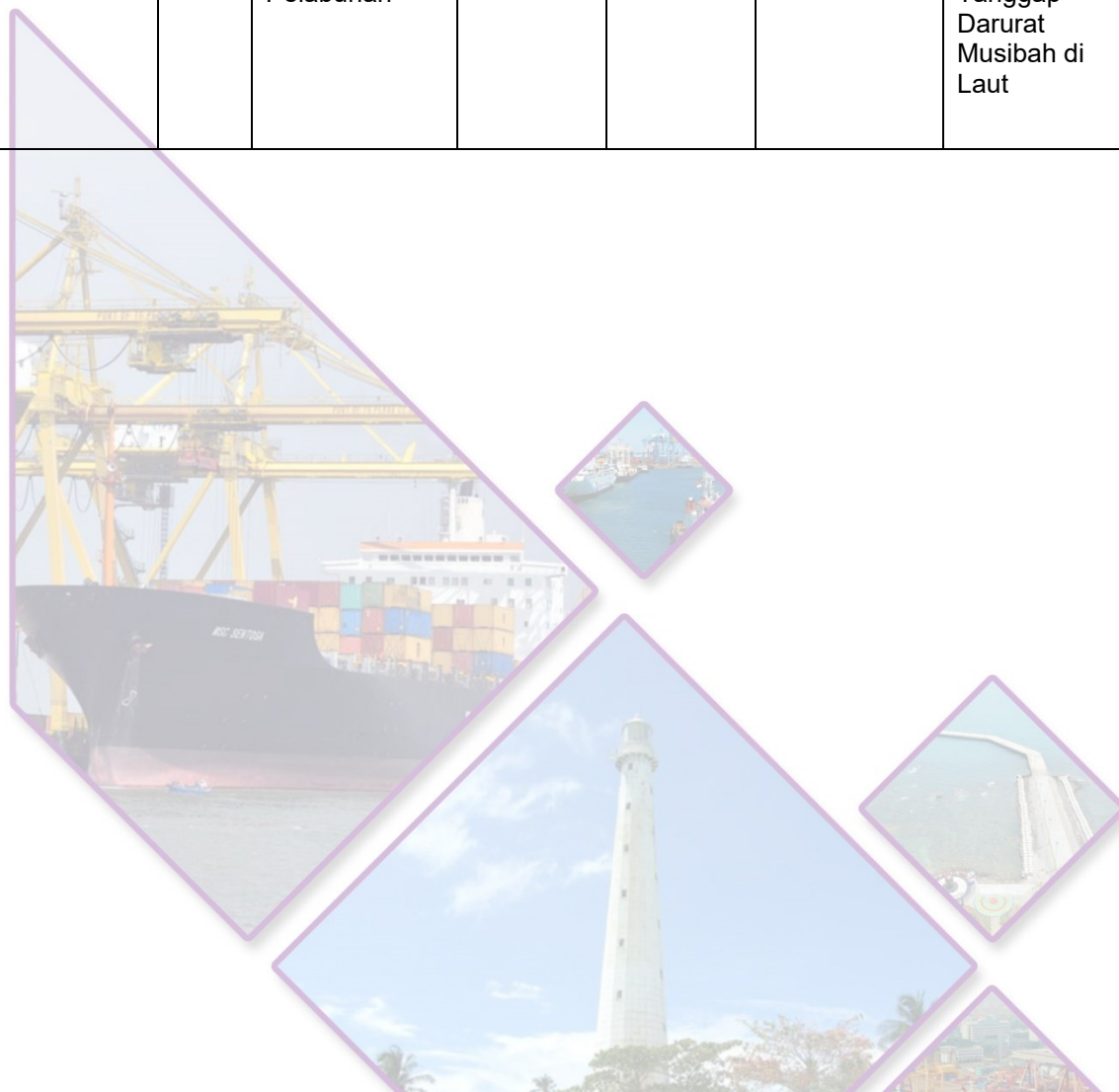
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	0	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	230.000.000	226.635.900		Selesai
							Penguatan Auditor ISPS Code	Pagu Awal : 222.000.000 Pagu Akhir : 429.800.000	429.399.170		Selesai
							Fourth Verification ISPS Code	91.574.000	91.550.000	-	Selesai
							Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	8.000.000.000	7.972.108.800	-	Pembayaran 100% di bulan Desember 2022
							Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Pagu Awal : 208.000.000 Pagu Akhir : 0	0	-	realokasi
		IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,75	96,33	Rehab/ Replacement Menara Suar Rehap/ Replacement Rambu Suar	24.017.473.000	23.340.352.675	-	
							Upgrade GMDSS Dan Upgrade VTS	-	-	-	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,6	0,715	Penerbitan Sertifikat pencegahan pencemaran	-	-	-	
							Monitoring aplikasi pelaporan konsumsi bahan bakar kapal	-	-	-	Melalui Aplikasi <i>dcs-ditkapel.dephub.go.id</i>
							Pengadaan alat <i>portable sulfur in fuel oil analyzer</i>	2. 802.800.000	2.802.800.000	0	4 Unit untuk lokasi KSOP Ambon, KSOP Panjang, KSOP Tanjung Emas, KSOP Sorong
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan	%	100	100	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Pagu Awal : 1.800.000.000 Pagu Akhir : 2.380.000.000	2.090.724.000		Sudah selesai



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
			Kapal Di Pelabuhan				Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	180.000.000	170.654.260		Dilaksanakan Sepanjang tahun, proses pencairan







BAB IV

Penutup

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Evaluasi angkutan berdasarkan Sistem Informasi Angkutan Laut (SIMLALA) menyimpulkan bahwa Target rasio konektivitas transportasi laut tahun 2022 sebesar 0,90 rasio dan sampai dengan Triwulan IV terdapat penambahan 3 Pelabuhan yaitu Matasiri, Marabatuan dan Gudang Arang, sehingga jumlah pelabuhan yang disinggahi kapal laut menjadi 576 pelabuhan dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 0,91 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 101%.

2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

Sesuai target persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur tahun 2022 sebesar 27%. Adapun pencapaian triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 27% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

Adapun target Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2022 sebesar 83%. Pencapaian pada Triwulan I sebesar 69.87 %, pada Triwulan II sebesar 76,70 %, pada Triwulan III sebesar 86.75%, dan pada Triwulan IV sebesar 79,00% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 95,18% sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi *Covid-19* yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan.



4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2022 sebesar 1,09/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 0,91 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 18 orang), dan pada Triwulan II sebesar 1,10 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 42 orang) dan pada Triwulan III sebesar 0,98 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 9 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 110,1% dan pada Triwulan IV sebesar 0,99 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 13 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 109,17%.

5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

Sesuai dengan target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 0,29/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan I sampai Triwulan IV tidak terdapat laporan gangguan keamanan sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 200% yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di atas kapal dan tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

6. Tingkat Keandalan Kenavigasian

Adapun sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 98,05% dan pada Triwulan II, Triwulan III sebesar 97,17 dan triwulan IV sebesar 96,33% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 98,55% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / *automatic adjustment* anggaran untuk biaya pemeliharaan.

7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

Sesuai dengan target Tahun 2022 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2022 Rasio sebesar 0,6. Pencapaian Triwulan I rasio sebesar 0,527 sehingga prosentase pencapaian terhadap target saat ini sebesar 87,8%, sedangkan pada Triwulan II rasio tercapai sebesar 0,583, sehingga prosentase pencapaian terhadap target saat ini sebesar 97,17%, pada Triwulan III tercapai sebesar 0,651 dan pada triwulan ke IV tercapai sebesar 0,715 sehingga persentase capaian terhadap target telah tercapai 119,2%. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan karena merupakan akumulasi realisasi dari periode sebelumnya yang selalu melebihi target tahunan sehingga berdampak terhadap realisasi tahun berjalan.



8. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

Sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I belum terdapat laporan kejadian pencemaran sehingga persentasenya sebesar 100% artinya pada Tahun 2022 sampai dengan posisi 30 Oktober 2022 tidak terdapat laporan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berhasil ditanggulangi. Sedangkan pada Triwulan II terdapat 1 laporan kejadian pencemaran di Teluk Penyu sekitar Dermaga Wijayapura Pelabuhan Cilacap yang berhasil ditanggulangi sehingga persentasenya sebesar 100%. Dan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat 3 laporan kejadian pencemaran di Wilayah Kerja PHE OSES Koordinat 05°12'515" S 106°12'335" E, Perairan KSU Belawan dan Perairan KSOP Khusus Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentasenya sebesar 100%.

B. Langkah ke depan

Masih menunggu pelaksanaan Reviu Renstra 2020-2024 Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2021**



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

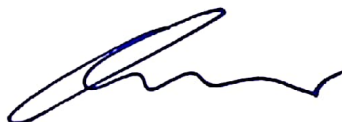
Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan memuat beberapa indikator kinerja serta target yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.

Jakarta, Desember 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

NIP. 19670320 199203 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,90	Layanan angkutan rede (16 layanan)	35.000.000.000	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
						Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	84.942.275.000	
						Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	825.293.622.300	
						Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	435.818.087.000	
						Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	63.426.377.000	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	-	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	29.957.125.000	Direktorat Kepelabuhanan
						Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	4.158.373.000	
						Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	350.000.000	
						Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	350.000.000	
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Asistensi Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	196.074.000	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
						Monitoring permasalahan terkait Surat Persetujuan Berlayar	100.000.000	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	100.000.000	
						Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional	100.000.000	
						Bimbingan teknis Petugas Kesyahbandaran	200.000.000	
						Sosialisasi keselamatan pelayaran	1.134.560.000	
						Pembangunan Kapal Patroli	137.694.000.000	
						Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	7.450.000.000	
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Peningkatan keterampilan ISPS Code	230.000.000	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
						Penguatan Auditor ISPS Code	230.000.000	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fourth Verification ISPS Code	91.574.000	
						Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	8.000.000.000	
						Kegiatan operasi patroli terpadu	200.000.000	
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Lanjutan replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi beton bertulang dan fasilitas penunjangnya	5.543.165.000	Direktorat Kenavigasian
						Lanjutan replacement rambu suar 10 m di Sane-Sane, dan pelabuhan laut Selayar konstruksi single pipe	1.432.576.000	
						Rehab Menara Suar Klirong, Kebumen	3.500.000.000	
						Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI. 180 di Kuala Langsa	1.500.000.000	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	1.500.000.000	
						Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m konstruksi GRP lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibelua	2.818.726.000	
						Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	1.200.000.000	
						Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	4.500.000.000	
						Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	1.850.000.000	
						Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulabuh T. 20 M Darat Beton DSI. 2940	2.697.385.000	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	2.936.360.000	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
						Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	-	
						Memonitor pelaporan konsumsi bahan bakar kapal melalui Data Collecting System (DCS)	-	
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	1.800.000.000	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
						Pembekalan personil penanggulangan pencemaran Tingkat Administrator	200.000.000	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Anggaran Usulan * (Rp)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembekalan personil Search and Rescue (SAR) di perairan dan pelabuhan	180.000.000	
						Penanganan tanggap darurat musibah di laut	180.000.000	

Keterangan:

* PAGU INDIKATIF

Jakarta, Desember 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
*djpl@dephub.go.id***

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2022. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, Januari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670320 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Toha

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Karya Sumadi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

Menteri Perhubungan

Pihak Pertama

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

BUDI KARYA SUMADI

ARIF TOHA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,90
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	27
		IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan**Anggaran**

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp.	31.656.770.000
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp.	3.151.613.336.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp.	27.872.417.000
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp.	7.906.893.000
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Rp.	743.328.628.000
6. Pelayanan Transportasi Laut	Rp.	1.534.865.666.000
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Rp.	2.844.268.757.000
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp.	613.392.029.000

Disetujui,

Jakarta, Januari 2022

Menteri Perhubungan

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut



BUDI KARYA SUMADI



ARIF TOHA



REVIU PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
djpl@dephub.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022. Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2022. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan reviu perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta,

2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

NIP. 19670320 199203 1 003



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Toha
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2022

Pihak Kedua
Menteri Perhubungan


BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


ARIF TOHA

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,90
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
6. Pelayanan Transportasi Laut
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 31.656.770.000,-
Rp. 3.151.613.336.000,-
Rp. 27.872.417.000,-
Rp. 7.906.893.000,-
Rp. 743.328.628.000,-
Rp. 1.534.865.666.000,-
Rp. 2.844.268.757.000,-
Rp. 613.392.029.000,-

Disetujui,
Menteri Perhubungan


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 2022
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


ARIF TOHA



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

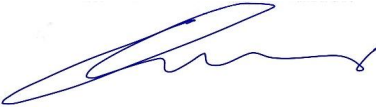
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab		
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0.9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. LALA		
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	16												35,000,000,000	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	44												84,942,275,000	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	73												825,293,622,300	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	35												435,818,087,000	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
		5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	6												63,426,377,000	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait				
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. LALA		
1	Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur					1													Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83.00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kepelabuhan		
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton			1	1	1	1	1	1					29,957,125,000	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer			1	1	1	1	1	1					4,158,373,000	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional		1	1	1	1	1	1	1	1	1		350,000,000	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan			1			1			1			350,000,000	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	TARGET	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97.75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kenavigasian
						1 Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya								1	1	1	1	1	5,543,165,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						2 Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe								1	1	1	1	1	1,432,576,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						3 Rehab Menara Suar Klorong, Kebumen							1	1	1	1	1	1	3,500,000,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						4 Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI.180 di Kuala Langsa										1	1	1	1,500,000,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						5 Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan											1	1	1,500,000,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						6 Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibelua											1	1	2,818,726,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						7 Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati										1	1	1	1,200,000,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						8 Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M												1	4,500,000,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						9 Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut											1	1	1,850,000,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						10 Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI. 2940										1	1	1	2,697,385,000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab		
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0.6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL	
						1. Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer							6							6,602,300,000	
						2. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						3. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP	
						1 Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)					1									1,800,000,000	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
						2 Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator			1											200,000,000	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
						3 Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan					1									180,000,000	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
						4 Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		180,000,000	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	

Jakarta,

Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :			Januari		TAHUN :		2022																
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan	Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran							
									Volume	%	Volume	%					Volume				Volume	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	2.916.666.667	8	16	0	100	0	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	7.078.522.917	8	44	0	100	0	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	68.774.468.525	8	73	0	100	0	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	36.318.173.917	8	33	0	94	0	Trayek T-11 dan T-30 masih proses lelang	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
		5	Layanan angkutan temak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan temak	6	6	100	5.285.531.417	8	6	0	100	0%	-	-	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait							
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	18	18	100	-		13	-	72		Trayek : H1, H3, H4, H6, T5, T9, T10, T11, T13, T17, T18, T20,T21	Monitor dan koordinasi data trayek kapal petikemas komersial	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan				29.957.125.000		-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan				4.158.373.000		-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional					Laporan				350.000.000		-	-	-	-	Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja dengan Monitoring Ke UPT dimulai pada Bulan Februari 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan					
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kepelabuhan					
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan				29.957.125.000		-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan				4.158.373.000		-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan				350.000.000		-	-	-	-	Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja dengan Monitoring Ke UPT dimulai pada Bulan Februari 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan				350.000.000		-	-	-	-	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Maret, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
		5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1			0		1	0	1	0	Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan							
		SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP			
								1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	9	9	100	196.074.000		0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Terb
								2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	5	5	100	100.000.000		0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Terb
								3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	5	5	100	100.000.000		0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Terb
4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan							Laporan	5	5	100	100.000.000		0	0	0	0	diaksanakan Maret-September 2022		Subdirektorat Berlayar	Terb		
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP					
						5.	Bimbingan teknis Petugas Kesyahbandaran	Laporan	1	1	100	200.000.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan Juni 2022		Subdirektorat Berlayar	Terb		
						6.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6	100	1.134.560.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei, Juli, September, Oktober, November 2022		Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Terb		
						7.	Pembangunan Kapal Patroli	Unit	9	9	100	137.694.000.000		0	0	0	0	10 Unit Kapal Patroli Kelas V dan 4 Unit Kapal Patroli Kelas IV (MYC 21-22)	sedang dilaksanakan	Subdirektorat Berlayar	Terb		
						8.	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20	20	100	7.450.000.000		0	0	0	0	proses tender		Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Terb		
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP				
						1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	230.000.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan Maret 2022		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb		
						2.	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	1	1	100	230.000.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei 2022		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb		
						3.	Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	5	100	91.574.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan September-November 2021		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb		
						4.	Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	1	100	8.000.000.000		0	0	0	0	proses verifikasi internal		Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Terb		
IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kenavigasian						
				1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit		0	0	5.543.165.000	0	0	0	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
				2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit		0	0	1.432.576.000	0	0	0	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
				3	Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Unit		0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
				4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI.180 di Kuala Langsa	Unit		0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kenavigasian					
						5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit		0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		Subdit Perambuan dan Perbengkelan			

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibelua	Unit		0	0	2.818.726.000	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Unit		0	0	1.200.000.000	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit		0	0	4.500.000.000	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit		0	0	1.850.000.000	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI. 2940	Unit		0	0	2.697.385.000	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
																		Dir. KAPPEL	
			1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1		6.602.300.000	0	0	0	0		Proses Lelang	Menyegerakan Proses Lelang sesuai Jawal yang Ditentukan	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan			
			2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1			1	-	100	-		Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code			
			3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1			1	-	100	-		Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran			
																		Dir. KPLP	
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100		Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal													Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
				1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	1.800.000.000	0	0	0	0		diaksanakan bulan Juni 2022		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
				2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	1	1	100	200.000.000	0	0	0	0		diaksanakan bulan Maret 2022		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
				3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	1	1	100	180.000.000	0	0	0	0		diaksanakan bulan Mei 2022		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
	4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000	0	0	0	0		diaksanakan sepanjang tahun		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air				

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :			FEBRUARI		TAHUN :		2022															
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan FEBRUARI				Realisasi Bulan FEBRUARI		% Capaian Bulan FEBRUARI		Evaluasi		Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
										Volume	%	Volume	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	5.833.333.333	17	16	0	100	0	Layanan angkutan rede telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	14.157.045.833	17	44	0	100	0	Layanan angkutan perintis (PEN) telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	137.548.937.050	17	73	185.971.801.260	100	23	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	72.636.347.833	17	33	0	94	0	Trayek T-11 dan T-30 masih proses lelang. Layanan angkutan ternak telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	10.571.062.833	17	6	0	100	0	Layanan angkutan ternak telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait						
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
							Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	18	18	100	-	13	-	72			Trayek : H1, H3, H4, H6, T5, T9, T10, T11, T13, T17, T18, T20,T21	Monitor dan koordinasi data trayek kapal petikemas komersial	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kepelabuhan		
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	-	-		29.957.125.000	-	-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	-	-		4.158.373.000	-	-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	-	-		350.000.000	-	-	-	-	-	Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja dengan Monitoring Ke UPT dimulai pada Bulan Februari 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-	-		350.000.000	-	-	-	-	-	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Mei, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0		0	1	0	1	0	0	Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP		
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemerkasaan Kecelakaan Kapal	Laporan	9	9	100	196.074.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Tertib	
						2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Tertib	
						3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Tertib	
						4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan Maret-September 2022		Subdirektorat Berlayar	Tertib	
						5	Bimbingan teknis Pelugas Kesyahbandaran	Laporan	1	1	100	200.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Juni 2022		Subdirektorat Berlayar	Tertib	
						6	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6	100	1.134.560.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Mei, Juli, September, Oktober, November 2022		Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Tertib	
						7	Pembangunan Kapal Patroli	Unit	9	9	100	137.894.000.000	0	0	0	0	0	10 Unit Kapal Patroli kelas V dan 4 Unit Kapal Patroli kelas IV (MYC 21-22).	sedang dilaksanakan	Subdirektorat Berlayar	Tertib	
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Maret 2022		Subdirektorat Pengamanan	Patroli dan Pengamanan	
						2.	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Mei 2022		Subdirektorat Pengamanan	Patroli dan Pengamanan	
						3.	Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	5	100	91.574.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan September-November 2021		Subdirektorat Pengamanan	Patroli dan Pengamanan	
						4.	Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	1	100	8.000.000.000	0	0	0	0	0	proses verifikasi internal		Subdirektorat Pengamanan	Patroli dan Pengamanan	
		5.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan	1	1	100	200.000.000	0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan April		Subdirektorat Pengamanan	Patroli dan Pengamanan					
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. Kenavigasian	
						1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit	0	0	0	5.543.165.000	0	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
						2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit	0	0	0	1.432.576.000	0	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
						3	Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Unit	0	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
						4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI.180 di Kuala Langsa	Unit	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan								

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan FEBRUARI				Realisasi Bulan FEBRUARI				% Capaian Bulan FEBRUARI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran	
										Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan			
						1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer					6.602.300.000		0		0	0	0	Telah selesai kontrak, proses pengadaan	Memonitor progres pekerjaan	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan		
						2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1					1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code				
						3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1					1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran				
						Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai															Dir. KPLP			
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	1.800.000.000		0		0	0	0	0	dilaksanakan bulan Juni 2022		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
						2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	1	1	100	200.000.000		0		0	0	0	0	dilaksanakan bulan Maret 2022		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
						3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	1	1	100	180.000.000		0		0	0	0	0	dilaksanakan bulan Mei 2022		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
						4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000		0		0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :		MARET		TAHUN :		2022																				
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan MARET				Realisasi Bulan MARET		% Capaian Bulan MARET		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab						
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran									
										Volume	%	Volume	%								Volume	Volume	%	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																					
					1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	8.750.000.000	25	16	0	100	0	Layanan angkutan rede telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
					2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	35.848.790.500	25	44	0	100	0	Layanan angkutan perintis (PEN) telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
					3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	199.992.976.273	25	73	214.313.443.174	100	26	-	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
					4 Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	108.954.521.750	25	33	0	94	0	Trayek T-11 dan T-30 masih proses lelang. Layanan angkutan temak telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait								
		5 Layanan angkutan temak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan temak	6	6	15.856.594.250	25	6	0	100	0	Layanan angkutan temak telah terlaksana, namun belum ada pencairan anggaran, karena belum ada permintaan tagihan dari kontraktor.	Monitor dan koordinasi	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait											
		IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																					
					Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	-	37	-	100	-	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peti kemas = 138 try * Jumlah trayek	-	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																					
					1 Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	1		29.957.125.000	-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022	Rencana Revisi Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan										
					2 Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	1		4.158.373.000	1	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022	proses lelang 1 Paket belum ada anggaran yang dikeluarkan	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan										
					3 Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	-		350.000.000	-	-	-	-	Kegiatan Evaluasi Standar Kinerja dengan Monitoring Ke UPT dimulai pada Bulan Februari 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan										
					4 Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-		350.000.000	-	-	-	-	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Mei, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan										
5 Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1		0	1	0	1	0	Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan															
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP								
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar									
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Penetapan Berlayar	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar									
					3. Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar									
					4. Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	diaksanakan Maret-September 2022	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar									
					5. Bimbingan teknis Petugas Kesyahbandaran	Laporan	0	0	0	-	0	0	0	0	direvisi	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar									
					6. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6	100	1.134.560.000	0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei, Juli, September, Oktober, November 2022	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Tertib Berlayar									
					7. Pembangunan Kapal Patroli	Unit	9	9	100	137.694.000.000	0	26.353.716.744	0	19,14	10 Unit Kapal Patroli Kelas V dan 4 Unit Kapal Patroli Kelas IV (MYC 21-22)	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar									
		8. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20	20	7.450.000.000	0	0	0	0	proses tender	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Tertib Berlayar													
		IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																					
					1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	1	226.635.900	100	98,54	selesai	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan									
					2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei 2022	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan									
					3. Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	5	100	91.574.000	0	0	0	0	diaksanakan bulan September-November 2021	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan									
					4. Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	1	100	8.000.000.000	0	0	0	0	proses pi di bulan April	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Tertib Berlayar									
					5. Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan	1	1	100	200.000.000	0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Tertib Berlayar									
5. Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan				1	1	100	200.000.000	0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Tertib Berlayar											
IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kenavigasian									
			1 Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit	0	0	5.543.165.000	0	0,00%	1.537.161.600	0	27,73%	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
			2 Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit	0	0	1.432.576.000	0	0	-	0	0	Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
			3 Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Unit	0	0	3.500.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
			4 Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI 180 di Kuala Langsa	Unit	0	0	1.500.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
			5 Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit	0	0	1.500.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
			5 Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit	0	0	1.500.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan MARET				Realisasi Bulan MARET		% Capaian Bulan	MARET		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume		%	%			
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakat 1' Unit dan Tg. Sibelaia	Unit		0	0	2.818.726.000	0	0	0	0		Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg. Jati	Unit		0	0	1.200.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						8	Replacement Rambu Suar Karang Balaun, Karang Tenumbu Manggai, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit		0	0	4.500.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit		0	0	1.850.000.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI. 2940	Unit		0	0	2.697.385.000	0	0	-	0	0	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KAPPEL
						1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1			6.602.300.000	0,08	560.560.000	8%	8%	Pembayaran UM 1	Memonitor progres pekerjaan	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
						2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1				1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code
						3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1				1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran
						Menunjuk Dir. KPUP untuk melakukan hal-hal													Dir. KPUP
						1.	Lathan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.380.000.000		0	0	0	0	dilaksanakan bulan Juni 2022	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
						2.	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	direvisi ke marpolex	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
						3.	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	direvisi ke marpolex	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
						4.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000		0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :			APRIL		TAHUN :		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan APRIL				Realisasi Bulan APRIL		% Capaian Bulan APRIL		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab							
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Target Kinerja		Target Anggaran				Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran														
						Volume	%	Volume				%	Volume	Volume	%	%													
																	(9)	(10)	(11)				(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)											
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																						
							1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	11.666.666.667	33	16	2.579.988.657	100	7	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
							2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	24.999.546.875	13	44	75.911.188.237	100	38	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
							3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	177.771.534.465	22	73	232.609.778.172	100	29	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri								
							4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	145.272.695.667	33	33	45.309.639.126	94	10	Trayek T-11 dan T-30 masih proses lelang.	Monitor dan koordinasi	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait								
							5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	21.142.125.667	33	6	8.625.495.390	100	14	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait								
					IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																				
										Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-		36	-	100	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peti kemas = 138 try * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek. * Shg trayek pelayaran yg membentuk loop secara teratur telah mencapai 27%.	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
	SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kepelabuhanan								
							1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	0	-									Penghematan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Surat Dirjen Hubla No. KU.002/34/IV/DP.2022 tgl. 6 April 2022	Notadinas Direktur Keleluabuhanan Nomor KU.002/34/IV/ND/DP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan							
							2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	1	4.158.373.000		1	-					Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022	proses lelang 1 Paket belum ada anggaran yang dikeluarkan	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
							3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1	285.892.000		0	-					monitoring dilaksanakan melalui aplikasi sirani		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
							4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-	350.000.000		-	-					Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Mei, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
							5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0		1	0	1	0			Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
										IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP			
														1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	100.000.000		0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Tertib
														2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	5	5	100	100.000.000		0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Tertib
														3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	5	5	100	100.000.000		0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Tertib
4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	5	5	100	100.000.000									0	0	0	0	diaksanakan Maret-September 2022		Subdirektorat Berlayar	Tertib							
				IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																					
								1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	230.000.000		1	226.635.900	100	98,54	selesai		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan							
								2.	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	1	1	100	230.000.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei 2022		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan							
								3.	Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	5	100	91.574.000		0	0	0	0	diaksanakan bulan September-November 2021		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan							
								4.	Pengadaan, percizinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	1	100	8.000.000.000		0	0	0	0	proses pi di bulan April		Subdirektorat Sarana dan Prasarana							
					IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kenavigasian								
									1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit	0	0	5.543.165.000	0	0	2.792.510.240	0	50,38%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan							
									2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit	0	0	1.432.576.000	0	0	628.342.445	0	43,86%		Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan							

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan APRIL				Realisasi Bulan APRIL		% Capaian Bulan	APRIL		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab					
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran									
										Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%									
						3	Rehab Menara Suar Kilorong, Kebumen	Unit		0	0	3.500.000.000	0	0	1.727.586.500	0	49,36%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI.180 di Kuala Langsa	Unit		0	0	1.500.000.000	0	0	385.566.920	0	25,70%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit		0	0	1.500.000.000	0	0	390.365.912	0	26,02%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibelua	Unit		0	0	2.818.726.000	0	0	783.762.000	0	27,81%		Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Unit		0	0	1.200.000.000	0	0	564.736.394	0	47,06%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit		0	0	4.500.000.000	0	0	1.007.428.151	0	22,39%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit		0	0	1.850.000.000	0	0	399.322.607	0	21,59%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI. 2940	Unit		0	0	2.697.385.000	0	0	701.229.300	0	26,00%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
						SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL
												1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1			6.602.300.000		0,08	560.560.000	8%	8%	Pembayaran UM 1	Memonitor progres pekerjaan	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Auditor ISM Code
2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1											1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target							
3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1											1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran						
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal																				Dir. KPLP		
				1.	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.380.000.000		0	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Juni 2022	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
				2.	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	direvisi ke marpolex	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
				3.	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	direvisi ke marpolex	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
						4.	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000		0	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air						

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :			MEI		TAHUN :		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan MEI				Realisasi Bulan MEI		% Capaian Bulan MEI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Target Kinerja		Target Anggaran					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran							
					Volume	%	Volume	%				Volume	Volume	%	%							
					(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	14.583.333.333	42	16	6.216.722.001	100	18	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	24.999.546.875	13	44	75.911.188.237	100	38	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	266.657.301.698	33	73	285.119.647.139	100	36	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	181.590.869.583	42	33	82.840.151.793	94	19	Trayek T-11 dan T-30 masih proses lelang.	Monitor dan koordinasi	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
						5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	26.427.657.083	42	6	10.307.269.250	100	16	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
							Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	36	-	100	-	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peti kemas = 138 try * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek. * Shg trayek pelayaran yg membentuk loop secara teratur telah mencapai 27%.	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. Kepelabuhanan	
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Penghematan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Surat Dirjen Hubla No. KU.002/34/DJPL/2022 tgl. 6 April 2022	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.002/34/IV/IND/DP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	1	4.158.373.000	1	-	-	-	-	-	-	Proses Lelang dimulai pada Bulan Maret 2022	proses lelang 1 Paket belum ada anggaran yang dikeluarkan	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1	285.892.000	1	48.062.000	100%	17%						Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Mei, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0	1	0	1	0	1	0		Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. KPLP	
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	100.000.000	1,0	14.756.000	20	14,76	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Terb		
						2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Terb	
						3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	0	diaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Berlayar	Terb	
						4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	5	5	100	100.000.000	0	0	0	0	0	diaksanakan Maret-September 2022		Subdirektorat Berlayar	Terb	
						5	Bimbingan teknis Pelugas Keselamatan	Laporan	0	0	0	-	0	0	0	0	0	direvisi		Subdirektorat Berlayar	Terb	
						6	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6	100	1.134.560.000	0	0	0	0	0	diaksanakan bulan Juli, September, Oktober, November 2022		Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Terb	
						7	Pembangunan Kapal Patroli	Unit	9	9	100	137.694.000.000	0	26.353.716.744	0	19,14	10 Unit Kapal Patroli Kelas V dan 4 Unit Kapal Patroli Kelas IV (MYC 21-23)	sedang dilaksanakan proses tender	Subdirektorat Berlayar	Terb		
						8	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20	20	100	7.450.000.000	0	0	0	0	0			Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Terb	
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. KPLP	
						1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	1	226.635.900	100	98,54	selesai		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb		
						2.	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	0	0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei 2022		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb	
						3.	Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	5	100	91.574.000	0	0	0	0	0	diaksanakan bulan September-November 2021		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb	
						4.	Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	1	100	8.000.000.000	0	0	0	0	0	proses pl di bulan April		Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Terb	
						5.	Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan	1	1	100	200.000.000	0	0	0	0	0	diaksanakan bulan Mei		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan	Terb	
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. Kenavigasian	
						1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit	0	0	5.543.165.000	0	0	2.792.510.240	0	50,38%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembongkaran			
						2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit	0	0	1.432.576.000	0	0	628.342.445	0	43,86%		Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembongkaran			

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan MEI				Realisasi Bulan MEI		% Capaian Bulan MEI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab						
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran									
										Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%									
						3	Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Unit			0	0	3.500.000.000	0	0	1.727.586.500	0	49,36%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI 160 di Kuala Langka	Unit			0	0	1.500.000.000	0	0	385.566.920	0	25,70%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit			0	0	1.500.000.000	0	0	390.365.912	0	26,02%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibulau	Unit			0	0	2.818.726.000	0	0	783.762.000	0	27,81%		Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg. Jati	Unit			0	0	1.200.000.000	0	0	564.736.394	0	47,06%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						8	Replacement Rambu Suar Karang Bakau, Karang Tenumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit			0	0	4.500.000.000	0	0	1.007.428.151	0	22,39%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit			0	0	1.850.000.000	0	0	399.322.607	0	21,59%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI 2940	Unit			0	0	2.697.385.000	0	0	701.229.300	0	26,00%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL
												1. Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1			6.602.300.000	0,08		560.560.000	8%	8%	Pembayaran UM 1	Memonitor progres pekerjaan	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan	
2. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1										1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code								
3. Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1										1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran								
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal																					Dir. KPLP	
				1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.380.000.000		0	0	0	0	dilaksanakan bulan Juni 2022	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air									
				2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat		0	0	0	0		0	0	0	0	direvisi ke marpolex	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
				3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat		0	0	0	0		0	0	0	0	direvisi ke marpolex	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
				4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan		9		100	180.000.000		0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN :			JUNI		TAHUN :		2022													
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JUNI				Realisasi Bulan JUNI		% Capaian Bulan JUNI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	100	17.500.000.000	16	9.725.978.704	100	28	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	100	49.999.093.750	44	117.852.355.877	100	59	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis priortas nasional	73	100	120.920.928.289	73	312.477.476.697	100	43	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					4 Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	100	217.909.043.500	33	115.443.481.618	94	26	Trayek T-11 dan T-30 masih proses lelang.	Monitor dan koordinasi	Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait				
		5 Layanan angkutan temak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan temak	6	100	31.713.188.500	6	14.977.118.573	100	24	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait							
		IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	100	-	36	-	100	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peli kemas = 138 try * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek. * Shg trayek pelayaran yg membentuk loop secara teratur telah mencapai 27%.	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kepelabuhanan		
					1 Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	Penghematan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Surat Ditjen Hubla No. KU.002/34/DJPL/2022 tgl. 6 April 2022	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.002/34/IV/NDOP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan					
					2 Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	Terdampak tambahan Automatic Adjustment Belanja di Lingkungan Kementerian TA. 2022 berdasarkan Surat No. KU.002/4/5/DJPL/2022 tgl. 30 Mei 2022	Surat KPA Satker Kepelabuhanan Pusat No. 03/BATAL-LELANG/PPKPIV/2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan					
					3 Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1		237.830.000	0	-	0%	0%	monitoring dilaksanakan melalui aplikasi sirani		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
					4 Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-		350.000.000	-	-	-	-	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Mei, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
					5 Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1		0	1	0	1	0	Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPPLP		
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	100	100.000.000	2,0	36.499.800	40	36,50	dilaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Tertib Berlayar				
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	5	100	100.000.000	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Tertib Berlayar				
					3. Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	5	100	100.000.000	1	6768000	20	6,768	dilaksanakan sepanjang tahun		Subdirektorat Tertib Berlayar				
					4. Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	5	100	100.000.000	0	0	0	0	aksanakan Maret-September 2022		Subdirektorat Tertib Berlayar				
					5. Bimbingan teknis Petugas Kesyahbandaran	Laporan	0	0	-	0	0	0	0	direvisi		Subdirektorat Tertib Berlayar				
					6. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	100	1.134.560.000	0	0	0	0	dilaksanakan bulan Juli, September, Oktober, November 2022		Subdirektorat Sarana dan Prasarana				
					7. Pembangunan Kapal Patroli	Unit		100	137.694.000.000	10	31.771.153.232	71,4	23,07	Kapal Kls III persiapan tender, Kapal, Kapal Kls IV (MYC 21-22) fisk 80%, kapal Kls IV MYC 22-23 Tender Bulan September, Kapal Kls V Proses pembayaran termin terakhir	sedang dilaksanakan	Subdirektorat Tertib Berlayar				
		IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					8. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20	100	7.450.000.000	0	0	0	0	Automatic Adjustmnet		Subdirektorat Sarana dan Prasarana Dir. KPPLP				
					1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	100	230.000.000	1	226.635.900	100	98,54	selesai		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan				
					2. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	1	100	230.000.000	1	220.128.300	100,00	95,71	selesai		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan				
					3. Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	100	91.574.000	0	0	0	0	dilaksanakan bulan September-November 2021		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan				
					4. Pengadaan, perzinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	100	8.000.000.000	0	0	0	0	pelaksanaan pekerjaan		Subdirektorat Sarana dan Prasarana				
					5. Kegiatan Operasi Patroli Terpadu	Laporan	1	100	200.000.000	0	0	0	0	direvisi menjadi bimtek menembak		Subdirektorat Patroli dan Pengamanan				

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JUNI				Realisasi Bulan JUNI		% Capaian Bulan JUNI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%								
		IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kenavigasian		
					1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit			0	0	5.543.165.000	0	0	2.792.510.240	0	50,38%	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit			0	0	1.432.576.000	0	0	628.342.445	0	43,86%	Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					3	Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Unit			0	0	3.500.000.000	0	0	1.727.586.500	0	49,36%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI 180 di Kuala Langsa	Unit			0	0	1.500.000.000	0	0	385.566.920	0	25,70%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit			0	0	1.500.000.000	0	0	390.365.912	0	26,02%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibelua	Unit			0	0	2.818.726.000	0	0	783.762.000	0	27,81%	Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Unit			0	0	1.200.000.000	0	0	564.736.394	0	47,06%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Tenumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit			0	0	4.500.000.000	0	0	1.007.428.151	0	22,39%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
					9	Replacement Rambu Suar Karang Takar T 10 M Laut	Unit			0	0	1.850.000.000	0	0	399.322.607	0	21,59%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI 2940	Unit			0	0	2.697.385.000	0	0	701.229.300	0	26,00%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KAPPEL		
					1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1		1		6.602.300.000	0,08		560.560.000	8%	8%	Pembayaran UM 1	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan	
					2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1		1			1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code	
		3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1		1			1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran				
		IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP	
					1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1		1		100	2.380.000.000	1		2.090.724.000,00	100	87,85	Selesai	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat			0		0	0	0		-	0	0	direvisi ke marpox	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan				Sertifikat			0		0	0	0		-	0	0	direvisi ke marpox	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9		9		100	180.000.000		3		40.521.800,00	33,33	22,51	diaksanakan sepanjang tahun	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air				

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :		JULI		TAHUN :		2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------	--	------	--	---------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JULI				Realisasi Bulan JULI		% Capaian Bulan JULI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran								
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%								
					4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI. 180 di Kuala Langsa	Unit	1	0	0	875.000.000	0	0	385.566.920	0	44,06%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit	1	0	0	875.000.000	0	0	390.365.912	0	44,61%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibela	Unit	2	0	0	1.644.256.833	0	0	783.762.000	0	47,57%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Unit	1	0	0	700.000.000	0	0	564.736.394	0	80,68%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit	3	0	0	2.625.000.000	0	0	1.007.428.151	0	38,38%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit	1	0	0	1.079.166.667	0	0	399.322.607	0	37,00%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI. 2940	Unit	1	0	0	1.573.474.583	0	0	701.229.300	0	44,57%		Pelapaaan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan				
					SP4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dr. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
										1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1	1	100	2.813.360.000	0,199	560.560.000	20%	20%	Pembayaran UM 1	Memonitor progres pekerjaan	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
										2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	1	100	-	1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code
					3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	1	100	-	1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran					
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dr. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP					
					1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.380.000.000	1	2.090.724.000,00	100	87,85	Selesai		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air					
					2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	0	0	0	0	0	-	0	0	direvisi ke marpolex		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air					
					3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	0	0	0	0	0	-	0	0	direvisi ke marpolex		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air					
					4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000	3	40.521.800,00	33,33	22,51	dilaksanakan sepanjang tahun		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air					

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan AGUSTUS				Realisasi Bulan AGUSTUS		% Capaian Bulan AGUSTUS		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab							
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran										
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
	SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																			
							1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16		16	100	23.333.333.333	67	16	19.452.336.424	100	56	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
							2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44		44	100	174.573.181.877	44	44	190.144.770.237	100	48	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
							3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73		73	100	647.882.432.006	89	73	417.376.690.704	100	58	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
							4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35		35	100	290.545.391.333	67	35	204.078.052.603	100	47	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait				
			5	Layanan angkutan temak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan temak	6		6	100	42.284.251.333	67	6	27.498.146.627	100	43	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait								
			IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																			
							Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37		37	100	-	37	-	100	-	-	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
	SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											Dir. Kepelabuhan								
							1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	0		0	-	-	-	-	-	-	Pengamatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung pembangunan kawasan pelabuhan	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.00234/VI/NDOP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan					
							2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	0		0	-	-	-	-	-	-	Surat KPA Satter Kepelabuhanan Pusat No. 03/BATAL-LELANG/PPKP-V/2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
							3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1		350.000.000	0	-	0%	0%	monitoring dilaksanakan melalui aplikasi sirani		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan							
							4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-		750.000.000	1	652.153.000	100%	86,95%	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 3 Tahap pada Bulan Mei, Juni dan September 2022		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan							
							5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1		0	1	0	1	0	Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan							
							SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											Dir. KPLP		
													1.	Aistemi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	100.000.000	2,0	47.859.800	40	47,86	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektoral Berlayar	Terbimbing
													2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	2	2	100	30.000.000	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektoral Berlayar	Terbimbing
													3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	2	2	100	30.000.000	1	11914000	50	39,71	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektoral Berlayar	Terbimbing
4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	4	4	100	64.000.000							0	13590000	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektoral Berlayar	Terbimbing							
5	Bimbingan teknis Petugas Keselamatan	Laporan	0	0	0	-	0	0	0	0	direvisi	Subdirektoral Berlayar	Terbimbing													
6	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6	6	100	619.800.000	0	81387309	0	0	dilaksanakan bulan Juli, September, Oktober, November 2022	Subdirektoral Sarana dan Prasarana	Terbimbing													
7	Pembangunan Kapal Patroli	Unit		100	133.573.505.000	10	38.603.803.016	71,4	28,90	Kapal Kls III persiapan tender, Kapal Kls IV (MNC 22-23) Rias 80%, kapal Kls IV MNC 22-23 Tender Bulan September, Kapal Kls V Proses pembayaran termin terakhir	sedang dilaksanakan	Subdirektoral Berlayar	Terbimbing													
8	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20	20	100	7.450.000.000	0	0	0	0	Automatic Adjustment	Subdirektoral Sarana dan Prasarana	Terbimbing													
			IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:										Dir. KPLP									
							1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	100	230.000.000	1	226.635.900	100										

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan AGUSTUS				Realisasi Bulan AGUSTUS		% Capaian Bulan AGUSTUS		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
						1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit	1	0	0	3.695.443.333	0	0	2.792.510.240	0	75,57%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit	2	0	0	955.050.667	0	0	1.091.331.615	0	114,27%		Sudah Kontrak, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						3	Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Unit	1	0	0	2.333.333.333	0	0	2.360.703.500	0	101,17%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI 180 di Kuala Langsa	Unit	1	0	0	1.000.000.000	0	0	385.566.920	0	38,56%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit	1	0	0	1.000.000.000	0	0	390.365.912	0	39,04%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibela	Unit	2	0	0	1.879.150.667	0	0	783.762.000	0	41,71%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Unit	1	0	0	800.000.000	0	0	564.736.394	0	70,59%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit	3	0	0	3.000.000.000	0	0	1.007.428.151	0	33,58%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit	1	0	0	1.233.333.333	0	0	1.331.075.358	0	107,93%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
						10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI 2940	Unit	1	0	0	1.798.256.667	0	0	701.229.300	0	38,99%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1	1	100	2.813.360.000	1	2.802.800.000	100%	100%	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan	
						2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	1	100	-	1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code	
						3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	1	100	-	1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran	
						Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP
						1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.380.000.000	1	2.090.724.000,00	100	87,85	Selesai		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
						2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	1	1	100	219.000.000	0	-	0	0			Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
						3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	1	1	100	319.600.000	0	-	0	0			Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
						4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000	3	40.521.800,00	33,33	22,51	dilaksanakan sepanjang tahun		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan SEPTEMBER				Realisasi Bulan SEPTEMBER		% Capaian Bulan SEPTEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	26.250.000.000	75	16	23.341.402.776	100	67	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	222.397.960.127	53	44	274.861.145.948	100	66	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	466.045.542.580	64	73	435.478.036.818	100	60	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	326.608.527.614	75	33	221.228.564.878	94	51	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
		5	Layanan angkutan temak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan temak	6	6	100	47.569.782.750	75	6	28.945.448.160	100	46		-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait					
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
							Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	37	-	100	-	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peli kemas = 138 ty * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek. * Shg trayek pelayaran yg mem-bentuk loop se-cara teratur te-lah mencapai 27%.	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negen		
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kepelabuhan			
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	-	-	Pengamatan osasi rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.002/34/IV/ND/DP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	-	rehabilitasi tahanan Automatic Adjustment Belanja di Lingkungan Kemenhub TA. 2022	Surat KPA Satker Kepelabuhan Pusat No. 03/BATAL-LELANG/PFKP/VI/2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1	350.000.000	0	-	0%	0%	monitoring dilaksanakan melalui aplikasi sirani		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-	750.000.000	0	-	0%	0%	Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 (1 Tahap)	realisasi agustus 86,95%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
		5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0	1	0	1	0	Pelaksanaan Rekapitulasi Laporan Capaian Kinerja melalui Aplikasi SIRANI		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan								
		SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayara n	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											Dir. KPLP		
								1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	100.000.000	2,0	47.859.800	40	47,86	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Terbitt
								2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	2	2	100	30.000.000	0	0	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Terbitt
								3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	2	2	100	30.000.000	1	11914000	50	39,71	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Terbitt
4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan							Laporan	4	4	100	64.000.000	0	13590000	0	0	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Terbitt		
5	Bimbingan teknis Petugas Keselamatan	Laporan	0		0	0	-	0	0	0	0	direvisi	Subdirektorat Berlayar	Terbitt							
6	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	6		6	100	619.800.000	0	81.387.309	0	0	dilaksanakan bulan juli, September, Oktober, November 2022	Subdirektorat Berlayar	Sarana dan Prasarana							
7	Pembangunan Kapal Patroli	Unit			100	133.573.505.000	10	56.007.660.578	71,4	41,93	Kapal Kls III persiapan tender, Kapal, Kapal Kls IV (MYC 21-22) fisa 80%, Kapal Kls IV MYC 22-23 Tender Bulan September, Kapal Kls V Proses pembayaran termin terakhir	sedang dilaksanakan	Subdirektorat Berlayar	Terbitt							
14	14																				
8	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20		20	100	7.450.000.000	0	0	0	0	Automatic Adjustment	Subdirektorat Berlayar	Sarana dan Prasarana							
IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayara n	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP				
				1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	1	10												

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan SEPTEMBER				Realisasi Bulan SEPTEMBER		% Capaian Bulan SEPTEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
										Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
										Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%					
						1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Unit		1	0	0	4.157.373.750	0	0	2.792.510.240	0	67,17%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Unit		2	0	0	1.074.432.000	0	0	1.091.331.615	0	101,57%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						1	Rehab Menara Suar Kilrong, Kebumen	Unit		1	0	0	2.625.000.000	0	0	2.360.703.500	0	89,93%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						1	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI 180 di Kuala Langsa	Unit		1	0	0	1.125.000.000	0	0	385.566.920	0	34,27%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						1	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Unit		1	0	0	1.125.000.000	0	0	390.365.912	0	34,70%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						2	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibelua	Unit		2	0	0	2.114.044.500	0	0	1.698.151.000	0	80,33%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						1	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg. Jati	Unit		1	0	0	900.000.000	0	0	564.736.394	0	62,75%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						3	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Unit		3	0	0	3.375.000.000	0	0	1.721.786.006	0	51,02%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						1	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Unit		1	0	0	1.387.500.000	0	0	1.331.075.358	0	95,93%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
						1	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI 2940	Unit		1	0	0	2.023.038.750	0	0	701.229.300	0	34,66%		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Pembengkelan	
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6		Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
						1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer														
									1	100	2.813.360.000	1	2.802.800.000	100%	100%	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan				
						2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	100	-	1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code				
						3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	100	-	1	-	100	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran				
							Menunjuk Dir. KPUP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
					1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	100	2.380.000.000	1	2.090.724.000,00	100	87,85	Selesai		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air					
					2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	1	100	219.000.000		0	0	0		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air						
					3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	1	100	319.600.000	1	263.101.640,00	100,00	82,32		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air						
					4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	100	180.000.000	3	40.521.800,00	33,33	22,51	dilaksanakan sepanjang tahun	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air						

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : OKTOBER			TAHUN : 2022			Target Bulan OKTOBER								Realisasi Bulan OKTOBER				% Capaian Bulan OKTOBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
								Volume		%		Volume	%					Volume	Volume			
								(9)	(10)	(11)	(12)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)															
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	29.166.666,667	83,33	16	27.428.997.036	100	78	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	326.943.564.377	78,18	44	323.490.088.444	100	77	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	526.819.012.220	73	73	517.574.118.329	100	71	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	363.181.739.167	83,33	33	272.261.627.906	94	62	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	52.855.314.167	83,33	6	35.750.886.130	100	56	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait						
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	37	-	100	-	-	-	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peti kemas = 138 try * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek. * Shg trayek pelayaran yg membentuk loop secara teratur telah mencapai 27%.	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kepelabuhan		
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penghematan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Surat Dirjen Hubla No. KU.002/34/IV/ND/DP-22 tgl. 6 April 2022	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.002/34/IV/ND/DP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terdampak tambahan Automatic Adjustment Belanja di Lingkungan Kemenhub TA. 2022 berdasarkan Surat No. KU.002/4/5/DJPL/2022 tgl. 30 Mei 2022	Surat KPA Satker Kepelabuhan Pusat No. 03/BATAL-LELANG/PFKP/VI/2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1	350.000.000	1	91.223.000	0%	26%	realisasi sd okt : 47.99%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-	750.000.000	0	-	0%	0%	Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 (1 Tahap)	realisasi agustus 86.95%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan					
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP		
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	5	100	100.000.000	2,0	47.859.800	40	47,86	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar			
						2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	2	2	100	30.000.000	1	791000	50	2,64	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar			
						3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	2	2	100	30.000.000	1	11914000	50	39,71	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar			
						4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Laporan	4	4	100	64.000.000	1	13590000	25	21,23	diaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar			
						5	Bimbingan teknis Petugas Keselamatan pelayaran	Laporan	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	direvisi	Subdirektorat Berlayar	Tertib Berlayar	
						6	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	5	5	100	512.500.000	1	81.387.309	20	15,88	diaksanakan bulan Juli, September, Oktober, November 2022	on proses TUP	Subdirektorat Sarana dan Prasarana			
						7	Pembangunan Kapal Patroli	Unit	14	14	100	123.468.505.000	10	52.897.666.403	71,4	42,84	Kapal Kis III persiapan tender, Kapal, Kapal Kis IV (MYC 21-22) fisik 80%, Kapal Kis IV MYC 22-23 Tender Bulan November	sedang dilaksanakan	Subdirektorat Sarana dan Prasarana			
		8	Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Unit	20	20	100	7.450.000.000	0	0	0,0	0	Automatic Adjustment	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Dir. KPLP							
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE					Sertifikat	1	1	100	230.000.000	1	226.635.900	100,0	98,54	selesai	Subdirektorat Patroli dan Pengamanan						

NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan OKTOBER				Realisasi Bulan OKTOBER		% Capaian Bulan OKTOBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
									Volume	%	Volume	%									
			IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kenavigasian		
						1	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	4.157.373.750	0	0	2.792.510.240	0	67,17%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2	0	0	1.322.826.200	0	0	1.322.826.200	0	100,00%		Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						3	Rehab Menara Suar Klorong, Kebumen	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	3.249.558.400	0	0	3.249.558.400	0	100,00%		Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI.180 di Kuala Langsa	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.125.000.000	0	0	385.566.920	0	34,27%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI.390 di Alur Pelabuhan Belawan	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.125.000.000	0	0	390.365.912	0	34,70%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibela	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2	0	0	2.712.255.000	0	0	2.712.255.000	0	100,00%		Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.107.326.262	0	0	1.107.326.262	0	100,00%		Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	3	0	0	3.375.000.000	0	0	1.721.786.006	0	51,02%		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
						9	Replacement Rambu Suar Karang Takat T 10 M Laut	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.331.075.358	0	0	1.331.075.358	0	100,00%		Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1	1	100	2.813.360.000	1	2.802.800.000	100%	100%		Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan		
					2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	1	100	-	1	-	100	-		Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code		
					3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	1	100	-	1	-	100	-		Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran		
					Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																Direktur KPPLP
					1	Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.115.888.000	1	2.090.724.000,00	100	98,81		Selesai		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
					2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	1	1	100	314.600.000	0	-	0	0		Proses TUP		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
					3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	1	1	100	278.800.000	1	263.101.640,00	100,00	94,37		Selesai		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
					4	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000	3	40.521.800,00	33,33	22,51	diaksanakan sepanjang tahun		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :			NOVEMBER		TAHUN :		2022															
NO	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan NOVEMBER				Realisasi Bulan NOVEMBER		% Capaian Bulan NOVEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
									Volume	%	Volume	%								Volume	Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	30.328.997.036	75,82	16	31.367.124.958	100	78	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	379.876.162.377	72,49	44	385.646.986.905	100	74	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	550.196.816.039	75	73	565.020.057.471	100	78	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	35	35	100	294.587.586.300	70	33	292.523.573.123	94	70	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		5	Layanan angkutan temak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan temak	6	6	100	40.002.305.200	65,00	6	40.695.255.672	100	66	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait						
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
							Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	37	-	100	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peti kemas = 138 try * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek. * Shg trayek pelayaran yg membentuk loop secara teratur telah mencapai 27%.	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kepelabuhan				
						1	Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 26 Ton	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	-	-	Pengamatan asam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEK) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.002/34/IV/NDOP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2	Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan	0	-	-	-	-	-	-	-	Terdapatnya informasi Automatic Adjustment Belanja di Lingkungan Kementerian TA. 2022	Surat KPA Satker Kepelabuhan Pusat No. 03/BATAL-LELANG/PPKP/IV/2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						3	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1	350.000.000	1	178.920.000	100%	51%	realisasi sd November : 99.11%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
						4	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	-	750.000.000	1	114.108.000	100%	15%	realisasi s.d November 98.93%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
						5	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0	1	0	1	0		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP				
						1.	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemerkasaan Kecelakaan Kapal	Laporan	5	100.000.000	3,0	61.400.240	60	61,40	diaksanakan sepanjang tahun			Subdirektorat Berlayar	Tertib			
						2.	Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Laporan	2	30.000.000	1	11244197	50	37,48	diaksanakan sepanjang tahun			Subdirektorat Berlayar	Tertib			
						3.	Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Laporan	2	30.000.000	1	13422000	50	44,74	diaksanakan sepanjang tahun			Subdirektorat Berlayar	Tertib			
						4.	Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbandera Indonesia yang akan Kesyahbandaran	Laporan	4	64.000.000	3	54255836	75	84,77	diaksanakan sepanjang tahun			Subdirektorat Berlayar	Tertib			
						5.	Bimbingan teknis Petugas Kesyahbandaran	Laporan	0	0	0	0	0	0	direvisi			Subdirektorat Berlayar	Tertib			
						6.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	5	512.500.000	4	352.373.829	80	68,76	diaksanakan bulan Juli, September, Oktober, November 2022.	on proses TUP		Subdirektorat Sarana dan Prasarana				
						7.	Pembangunan Kapal Patroli	Unit	14	123.468.505.000	10	52.897.666.403	71,4	42,84	Kapal Kls III MYC (2022-2023) persiapan kontrak, Kapal Kls IV (MYC 21-22) selesa, Kapal Kls IV MYC 22-23 proses tender ulang	sedang dilaksanakan		Subdirektorat Sarana dan Prasarana				
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP			
						1.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	1	100	230.000.000	1	226.635.900	100,0	98,54	selesai			Subdirektorat Patroli dan Pengamanan			
						2.	Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	2	100	429.399.170	2	429.399.170	100,0	99,91	selesai			Subdirektorat Patroli dan Pengamanan			
						3.	Fourth Verification ISPS Code	Sertifikat	5	100	91.574.000	5	91.550.000	100,0	99,97	selesai			Subdirektorat Patroli dan Pengamanan			
						4.	Pengadaan, perizinan dan distribusi senjata api lainnya	Sertifikat	1	100	8.000.000.000	0	0	0	0	pelaksanaan pekerjaan	Pembayaran 100% di bulan Desember 2022		Subdirektorat Sarana dan Prasarana			
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. Kenavigasian			
						1.	Lanjutan Replacement MS. Pasangkayu 40 M Darat Konstruksi Beton Bertulang dan Fasilitas Penunjangnya	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	4.157.373.750	0	0	2.792.510.240	0	67,17%	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdi Perambuan dan Perbengkelan			

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan NOVEMBER				Realisasi Bulan NOVEMBER		% Capaian Bulan NOVEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%					
					2	Lanjutan Replacement Rambu Suar 10 m laut di Sane-Sane, dan Pelabuhan Laut Selayar konstruksi single pipe	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2	0	0	1.322.826.200	0	0	1.322.826.200	0	100,00%	Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					3	Rehab Menara Suar Kilong, Kebumen	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	3.249.558.400	0	0	3.249.558.400	0	100,00%	Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					4	Replace Rambu Suar Tuntun Depan DSI 180 di Kuala Langsa	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.125.000.000	0	0	385.566.920	0	34,27%	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					5	Replace Rambu Suar Tuntun Laut No. III DSI 390 di Alur Pelabuhan Belawan	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.125.000.000	0	0	390.365.912	0	34,70%	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					6	Replacement 2 Unit SBNP Laut Tinggi 10 m Konstruksi GRP Lokasi Gosong Sipakal 1 Unit dan Tg. Sibellua	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	2	0	0	2.712.255.000	0	0	2.712.255.000	0	100,00%	Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					7	Replacement Rambu Suar 10 M Laut Tg Jati	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.107.326.262	0	0	1.107.326.262	0	100,00%	Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					8	Replacement Rambu Suar Karang Batuan, Karang Terumbu Manggar, Karang Abadi Reef Single Pipe 10 M	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	3	0	0	3.375.000.000	0	0	1.721.786.006	0	51,02%	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					9	Replacement Rambu Suar Karang Takut T 10 M Laut	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	1.331.075.358	0	0	1.331.075.358	0	100,00%	Pekerjaan telah selesai	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					10	Replacement Rambu Suar Ujung Karang Meulaboh T. 20 M Darat Beton DSI 2940	Meningkatnya Kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1	0	0	2.023.038.750	0	0	701.229.300	0	34,66%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
					SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:									
1.	Pengadaan Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	Jumlah Portable Sulfur in Fuel Oil Analyzer	1	1							100	2.813.360.000	1		2.802.800.000	100%	100%	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Kasubdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
2.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	1							100	-	1	-	100	-	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Auditor ISM Code
3.	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	Jumlah Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	1							100	-	1	-	100	-	-	Telah Terlaksana	Telah sesuai dengan target	Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. KPLP	
				1			Lathian Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (MARPOLEX NATIONAL 2022)	Laporan	1	1	100	2.115.888.000	1		2.090.724.000,00	100,0	98,81	Selesai	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
				2			Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Administrator	Sertifikat	2	2	100	348.208.000	2		309.425.980,00	100,0	88,86	Selesai	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
				3			Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	1	1	100	278.800.000	1		263.101.640,00	100,0	94,37	Selesai	Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
				4			Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	Laporan	9	9	100	180.000.000	5		91.431.860,00	55,6	50,80	dilaksanakan sepanjang tahun		Sundirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan DESEMBER				Realisasi Bulan DESEMBER		% Capaian Bulan DESEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut	0,9	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Direktur LALA	
					1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	41.589.102.000	100,00	16	41.589.102.000	100	100	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
					2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (44 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	44	44	100	524.047.613.000	100,00	44	524.047.613.000	100	100	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
					3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (73 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	73	73	100	748.481.081.237	100	73	740.142.824.968	100	99	-	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
					4 Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (35 layanan)	Jumlah trayek tol laut	33	33	100	420.839.409.000	100	33	420.831.717.116	100	100	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
					5 Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	61.542.008.000	100	6	61.539.526.513	100	100	-	-	Penyusun Data Dan Laporan Angkutan Laut Khusus Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
		IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Direktur LALA
					Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	37	-	100	-	-	* Jumlah trayek tetap teratur angkutan peti kemas = 138 try * Jumlah trayek yg membentuk loop service = 37 trayek * Shg trayek pelayaran yg membentuk loop secara teratur telah mencapai 27%.	-	Penyusun Jaringan Dan Penempatan Kapal Liner Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. Kepelabuhan		
					1 Pengadaan peralatan bongkar muat Forklift 28 Ton	Jumlah Peralatan		0	-	-	-	-	-	-	-	Pengamatan osasi rangka pemenuhan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPELN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 2022	Notadinas Direktur Kepelabuhanan Nomor KU.002/24/IV/ND/DP-22 tgl. 7 April 2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
					2 Pengadaan peralatan bongkar muat truk kontainer	Jumlah Peralatan		0	-	-	-	-	-	-	-	terdampak tambahan Automatic Adjustment Belanja di Lingkungan Kemenhub TA. 2022 berdasarkan Surat No. KU.002/24/IV/ND/DP-22 tgl. 7 April 2022	Surat KPA Satker Kepelabuhan Pusat No. 03/BATAL-LELANG/PPK/IV/2022	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
					3 Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Laporan	1		350.000.000	-	-	-	0%	-	realisasi sd November : 99.11%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
					4 Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Laporan	1		750.000.000	-	-	0%	-	-	Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 (Tahap 1) November (Tahap 2)	realisasi s.d November 98.93%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
					5 Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1		0	1	0	100%	0	-	-	-	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP		
					1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	5	5	100	100.000.000		5,0	100.000.000	100	100,00	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib	
					2. Monitoring terkait permasalahan Surat Persetujuan Berlayar	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	2	2	100	30.000.000		2	30.000.000	100	100,00	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib	
					3. Monitoring terkait kegiatan kapal di Pelabuhan	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	2	2	100	30.000.000		2	25.078.062	100	83,59	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib	
					4. Monitoring dan Evaluasi pengawasan kapal berbendera Indonesia yang akan	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	4	4	100	64.000.000		3	54.255.836	75	84,77	dilaksanakan sepanjang tahun	Subdirektorat Berlayar	Tertib	
					5. Bimbingan teknis Peluang Keselamatan pelayaran	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	0	0	0	-		0	0	0	0	0	direvisi	Subdirektorat Berlayar	Tertib
					6. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	5	5	100	512.500.000		5	434.899.998	100	84,86	dilaksanakan bulan Juli, September, Oktober, November 2022	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Sarana	
					7. Pembangunan Kapal Patroli	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal		14	14	100	123.468.505.000		14	67.502.130.156	100,0	54,67	Kapal Kls V (MYC 21-22) (10 UNIT) selesai, Kapal Kls IV (MYC 21-22) (4 UNIT) selesai, Kapal Kls III (MYC 2022-2023) UM , Kapal Kls IV (MYC 22-23) UM	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana
					8. Pengadaan AIS (Monitoring System Kapal)	Mengurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Kapal	20	20	100	7.450.000.000		0	0	0,0	0	0	Automatic Adjustment	Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana
					Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP	
		1. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Mengurangi Gangguan Keamanan di Pelabuhan dan di Kapal																

Pelabuhan yg sudah terlayani
Daftar Pelabuhan Yang Disinggahi Kapal Angkutan Laut
Tahun 2022

No.	Nama Pelabuhan Untuk Angkutan Laut Sesuai RIPN
1	Adault
2	Agats
3	Air Buaya
4	Amahai
5	Amamapare
6	Ambalau
7	Ambo
8	Ambon
9	Ampana
10	Ampenan
11	Amurang
12	Anggrek
13	Ansus
14	Anyer Lor
15	Arwala / Sutilarang
16	Asiki
17	Atapupu
18	Atsy
19	Awerange
20	Baa
21	Babang
22	Badas
23	Bade
24	Bagan Siapi-api
25	Baing
26	Bajoe
27	Balauring
28	Balikpapan
29	Banabungi Pasarwajo
30	Banda Naira
31	Banemo
32	Banggai
33	Banjarmasin
34	Bantaeng/ Bonthain
35	Banten
36	Banyu Wangi/ Boom
37	Baranusa
38	Barus
39	Bastiong
40	Bataka
41	Batam/Batu Ampar
42	Batang
43	Batu Atas
44	Batu Enam

Pelabuhan yg sudah terlayani

45	Batu Goyang/Kalar-Kalar
46	Batu Merah
47	Batu Panjang
48	Baturube
49	Batutua
50	Bau-Bau/Murhum
51	Bawean
52	Bayun
53	Belang - Minahasa tenggara
54	Belang-Belang
55	Belawan
56	Belinyu
57	Belopa
58	Bemo
59	Benete
60	Bengkalis
61	Benjina
62	Benoa
63	Beo
64	Bere - Bere
65	Biak
66	Biaro
67	Bicoli
68	Bima
69	Binanatu
70	Binongko
71	Bintuhan/Linau
72	Bintuni
73	Biringkasi
74	Bisui
75	Bitung
76	Biu
77	Boepinang
78	Bojonegara
79	Boom Baru/Palembang
80	Branta
81	Brebes
82	Brondong
83	Buano
84	Budong-Budong
85	Buhias
86	Bukide
87	Bula - Maluku Tengah
88	Bula - Seram Bagian Timur
89	Buleleng (Sangsit)
90	Buli
91	Bulukumba/Lappe'e
92	Bumbulan
93	Bungku

Pelabuhan yg sudah terlayani

94	Bunta
95	Bunyu
96	Calabai
97	Calang
98	Carik
99	Carocok Painan
100	Celukun Bawang
101	Cirebon
102	Cituis
103	Dabo Singkep
104	Dama - Halmahera Utara
105	Damar
106	Dapalan
107	Daruba
108	Dawai
109	Dawelor
110	Depapre
111	Dobo
112	Dofa
113	Donggala
114	Dorosagu
115	Dumai
116	Eci
117	Elat
118	Ende
119	Eray
120	Ereke
121	Essang
122	Fak-fak
123	Falabisahaya
124	Fani
125	Fogi
126	Galela
127	Galesong/Takalar
128	Garongkong
129	Geser
130	Gilimanuk
131	Gita/Payahe
132	Gorom
133	Gorontalo
134	Gresik
135	Gudang Arang
136	Gunung Sitoli
137	Hatu Piru
138	Hila/Romang
139	Idi
140	Ilwaki
141	Inawatan
142	Indari

Pelabuhan yg sudah terlayani

143	Indramayu/Losarang
144	Ippi
145	Jailolo
146	Jampea
147	Jayapura
148	Jeneponto
149	Jepara
150	Juwana
151	Kabare
152	Kahakitang
153	Kaimana
154	Kairatu
155	Kaiwatu/Moa
156	Kakorotan
157	Kalabahi
158	Kalama
159	Kalaotoa
160	Kalbut
161	Kaledupa
162	Kalianda
163	Kalianget
164	Kalibaru
165	Kangean
166	Kao
167	Karang Agung
168	Karangantu
169	Karatung
170	Karimata
171	Karimun Jawa
172	Kasipute
173	Kawaluso
174	Kawio
175	Kayuadi
176	Kedi/Loloda
177	Kempo
178	Kendal
179	Kendari/Bungkutoko
180	Kendawangan
181	Kep. Seribu (P. Pramuka)
182	Keramaian
183	Kereng Bengkirai
184	Kertapati
185	Kesui
186	Ketapang (Kalbar)
187	Ketapang (Jatim)
188	Kintap
189	Kisar
190	Kobisadar
191	Koititi

Pelabuhan yg sudah terlayani

192	Kokas
193	Kolaka
194	Kolbano
195	Kolonedale
196	Komodo
197	Korido
198	Kota Agung/Batu Balai
199	Kota Baru
200	Kresek/Kronjo
201	Kroing
202	Kuala Enok
203	Kuala Gaung
204	Kuala Jelay
205	Kuala Langsa
206	Kuala Mendahara
207	Kuala Pembuang
208	Kuala Semboja/Sebulu
209	Kuala Tanjung
210	Kuala Tungkal
211	Kumai
212	Kur
213	Kwandang
214	Labuan Amuk/Tanahampo
215	Labuan Bajo
216	Labuha
217	Labuhan - Pandeglang
218	Labuhan Haji
219	Labuhan Lombok
220	Labuhan Maringgai
221	Labuhan Uki
222	Lahewa
223	Laiwui
224	Lakara
225	Lakor
226	Lamakera
227	Lameluru
228	Lampia
229	Langara
230	Lapuko
231	Larantuka
232	Larat
233	Lasalimu
234	Lawele
235	Legon Bajak
236	Leksula
237	Lembar
238	Leok
239	Lerokis
240	Leti

Pelabuhan yg sudah terlayani

241	Letung
242	Lewoleba
243	Lhok Tuan
244	Lhokseumawe/Kreung Geukeh
245	Liana Banggai
246	Likupang
247	Lipang
248	Lirang
249	Lirung
250	Losseng
251	Lurang
252	Luwuk
253	Maccini Baji
254	Madopolo/Joame
255	Mafa
256	Mahaleta
257	Majene
258	Makalehi
259	Makassar
260	Makian
261	Malahayati
262	Malakoni/P. Enggano
263	Malala
264	Malbufa
265	Malenge
266	Maligano
267	Malili
268	Maloy
269	Mamboro
270	Mamuju
271	Manado
272	Mangarang
273	Manggar
274	Mangoli
275	Manipa
276	Manitingting/Maba
277	Manokwari
278	Mantangisi
279	Manu/Gamunu
280	Marabatuan
281	Marabombang
282	Marampit
283	Marapokot
284	Maritaing
285	Marlasi
286	Marore
287	Marsela
288	Marunda
289	Masalembo

Pelabuhan yg sudah terlayani

290	Matasiri
291	Matui
292	Matutuang
293	Maumbawa
294	Maumere /Lorens Say
295	Maurole
296	Mega
297	Melonguane
298	Menanga
299	Menui
300	Meranti/Dorak
301	Merauke
302	Mesuji (Lampung)
303	Mesuji - Ogan Komering Ilir
304	Meulaboh
305	Miangas
306	Midai
307	Molawe
308	Moor
309	Moti
310	Moutong
311	Muara Angke
312	Muara Baru
313	Muara Padang
314	Muara Sabak
315	Muara Siberut/Simailepet
316	Muko-Muko
317	Munte - Luwu Utara
318	Munte/Likupang Barat
319	Muntok
320	Nabire
321	Naikliu
322	Namlea
323	Namrole
324	Natal / Sikara-kara
325	Ndao
326	Ngalipaeng
327	Nipah Panjang
328	Nunukan/Tunon Taka
329	Nusa Penida (Toyapakeh)
330	Ogoamas
331	Oransbari
332	Oswald Siahaan/Labuhan Angin
333	P. Banyak
334	P. Bonerate
335	P. Gebe
336	P. Jinato
337	P. Kalukalukuang
338	P. Raas

Pelabuhan yg sudah terlayani

339	P. Sailus
340	P. Sapuka
341	P. Tabuan
342	Padang Bai
343	Pagimana
344	Palabuhanratu
345	Paleleh
346	Paloh/Sakura
347	Palopo/Tg. Ringgit
348	Palue
349	Pam
350	Pamanukan-Blanakan
351	Pamatata
352	Panarukan
353	Pangkal Balam
354	Pangkalan Brandan
355	Pangkalan Bun
356	Pangkalan Dodek
357	Pangkalan Susu
358	Panipahan
359	Paniti
360	Panjang
361	Pantai Cermin
362	Pantoloan
363	Para
364	Pare-Pare
365	Parigi
366	Pasang Kayu
367	Pasapat
368	Pasipalele
369	Pasokan
370	Pasuruan
371	Patani
372	Patimban
373	Pattirobajo
374	Pegatan Mendawai
375	Pehe
376	Pekajang
377	Pekalongan
378	Pekanbaru
379	Pelaihari/Swarangan
380	Pelita
381	Pemalang
382	Pemenang
383	Penajam Paser
384	Petta
385	Pigaraja
386	Pomako
387	Pomalaa/Dawi-dawi

Pelabuhan yg sudah terlayani

388	Pontianak
389	Poom
390	Poopongan
391	Popolii
392	Poso
393	Pota
394	Probolinggo
395	Pulang Pisau
396	Pulau Baai
397	Pulau Ende
398	Pulau Kayoa
399	Pulau Laut
400	Pulau Salura
401	Pulau Sambu
402	Pulau Tello
403	Pulau Teor
404	Raha
405	Raijua
406	Ranai
407	Rangga Ilung
408	Ransiki
409	Rembang/Sluke
410	Rembang/Tasik Agung
411	Rengat/Kuala Cinaku
412	Reo
413	Sabang
414	Sadai
415	Sagea
416	Saketa
417	Salakan
418	Samarinda
419	Sampang
420	Sampit
421	Samuda
422	Sanana
423	Sangatta
424	Sangkulirang
425	Saonek
426	Saparua/Haria
427	Sape
428	Sapeken
429	Sapudi
430	Sarmi
431	Satui
432	Saukorem
433	Saumlaki
434	Sausapor
435	Sawang
436	Seba

Pelabuhan yg sudah terlayani

437	Sebuku
438	Sedanau
439	Seget
440	Segun
441	Sei Berombang
442	Sei Kolak Kijang
443	Seira
444	Selat Lampa
445	Selat Panjang
446	Selayar/Benteng/Rauf Rahman
447	Senayang
448	Serasan
449	Serongga
450	Serui
451	Serwaru
452	Sesayap
453	Sibolga
454	Sigli
455	Sikabalan/Pokai
456	Sikakap
457	Sikeli
458	Sinabang
459	Sinaboi
460	Singkawang
461	Singkil
462	Sinjai/Larea-rea
463	Sintete
464	Sirombu
465	Siuban
466	Soasio/Goto
467	Sofifi
468	Sorong
469	Subaim/Wasile
470	Subi
471	Sukadana
472	Sukamara
473	Sunda Kelapa
474	Sungai Guntung
475	Sungai Lumpur
476	Sungai Nyamuk/Sebatik
477	Sungai Pakning
478	Susoh
479	Taberfane
480	Taddan
481	Tagulandang
482	Tahuna
483	Talaga Raya
484	Talang Duku
485	Tangkiang

Pelabuhan yg sudah terlayani

486	Taniwel
487	Tanjung Api-Api
488	Tanjung Balai Karimun
489	Tanjung Batu - Berau
490	Tanjung Batu - Kotabaru
491	Tanjung Batu Kundur
492	Tanjung Beringin
493	Tanjung Buton
494	Tanjung Emas
495	Tanjung Intan
496	Tanjung Laut
497	Tanjung Medang
498	Tanjung Pandan
499	Tanjung Perak
500	Tanjung Pinang
501	Tanjung Pura
502	Tanjung Redeb
503	Tanjung Santan
504	Tanjung Selor
505	Tanjung Silopo/Polewali
506	Tanjung Tiram - Tg Balai Asahan
507	Tanjung Tiram - Tg Balai Karimun
508	Tanjung Uban / Teluk Sasah
509	Tanjung Wangi
510	Tapaktuan
511	Tarakan/Malundung
512	Tarempa
513	Tegal
514	Telaga Biru
515	Teluk Air / Padang Tikar
516	Teluk Bayur
517	Teluk Betung
518	Teluk Dalam
519	Teluk Leidong
520	Teluk Melano/Teluk Batang
521	Tembilahan
522	Teminabuan
523	Tenau/ Kupang
524	Tepa
525	Tepeleo
526	Ternate/A.Yani
527	Terong/Waiwerang
528	Tg. Balai Asahan/Teluk Nibung
529	Tg. Priok
530	Tg. Sidupa
531	Tifure
532	Tikong
533	Tilamuta
534	Tinombo

Pelabuhan yg sudah terlayani

535	Tobelo
536	Toboali
537	Toli-toli
538	Torosik
539	Toyando
540	Tual
541	Tuapejat
542	Tuhaha
543	Tulehu
544	Tutu Kembong
545	Ujung Jampea
546	Ulu Siau
547	Una-Una
548	Upisera
549	Wahai
550	Waigama
551	Waikelo
552	Waingapu
553	Waisai
554	Waisarisa
555	Waiwadan
556	Waiwole
557	Waiwuring
558	Wakai
559	Wamengkoli
560	Wanci
561	Wani
562	Waren
563	Wasior
564	Watunohu
565	Waworada
566	Wayabula
567	Wayaua
568	Weda
569	Windesi
570	Wini
571	Wolu
572	Wonreli
573	Wulandoni
574	Wulur
575	Wuring
576	Yaba

Jumlah pelabuhan
yang digunakan untuk
angkutan laut

636

Pelabuhan yg sudah terlayani

Jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut	576
Jumlah pelabuhan yang belum dilayani angkutan laut	60
Rasio konektivitas	0,91

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
1	Air Bangis	Belum beroperasi karena sedang dalam pembangunan akses jalan darat menuju Pelabuhan Air Bangis yang dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat. Sumber data : Sumbarsatu.com/berita/27245-pelabuhan-teluk-tapang-beroperasi-2023-air-bangis-jadi-pusat-industri-terbesar .
2	Bagan Asahan	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
3	Banda Besar	Tidak terdapat data dan informasi, termasuk dalam SIMPEL.
4	Batanjung	Status pelabuhan pengumpul (PP). Pembangunan belum selesai. Sumber data: https://www.tabengan.com/bacaberita/54321/pelabuhan-batanjung-mangkrak/ . Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
5	Darume	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep Halmahera dsk.
6	Dompak	Status pengumpan regional (PR). Pembangunan belum selesai. https://kumparan.com/batamnews/pelabuhan-dompak-tanjungpinang-proyek-ratusan-miliar-yang-kini-mangkrak-1vDyKLRJaHD/full Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
7	Giliketapang	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
8	Glimandangin	Tidak terdapat data dan informasi, termasuk dalam SIMPEL. Pemprov Jatim telah membangun pelabuhan ini pada tahun 2019. Tahun 2021 telah digunakan untuk angkutan penyeberangan lokal Kepulauan Madura dsk.
9	Janggerbun	Tidak terdapat data dan informasi, termasuk dalam SIMPEL.
10	Kadatua	Digunakan sebagai pelabuhan penyeberangan, berdasarkan Kepmenhub No. KM 266 TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Katatua Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Banabungi, Kecamatan Katatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
11	Kataloka	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Pulau Seram Timur

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		dsk.
12	Kilo	Sedang proses penyelesaian survey investigasi design (SID) pembangunan pelabuhan. Sumber data : https://www.suarantb.com/pembangunan-pelabuhan-kilo-masuk-program-prioritas-di-kemenhub/
13	Kobror	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
14	Kotabunan	Kondisi dermaga tidak layak dioperasikan, karena beton rusak dan kedalaman air sudah dangkal. Sumber data : https://mongondow.co/2019/06/puluhan-tahun-dermaga-kelas-iii-kotabunan-tak-beroperasi/ Tahun 2021 telah dilelang pembangunan faspel. Sumber data : https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/76485114/pengumumanlelang
15	Lagundi	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
16	Loleo Jaya	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep. Halmahera dsk.
17	Maidi/Lifofa	Status pelabuhan lokal (PL). Hanya dilayani oleh angkutan lokal Kep. Tidore dsk.
18	Malarko	Terdapat studi DED Tahun 2019, belum operasional. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
19	Mangga Dua	Berfungsi sebagai pelabuhan speed boat (armada semut) di Ternate. Sumber data : https://indotimur.com/ternate/ksop-armada-semut-mangga-dua-tingkatkan-pengawasan
20	Mansinam	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Terletak di Pulau Mansinam Papua Barat, dapat ditempuh 10 menit menggunakan kapal motor/speed boat dari Pelabuhan Manokwari.
21	Mataritip	Masih dalam proses penyelesaian pembangunan jalan akses masuk pelabuhan. Selain itu masih ada proses pembebasan lahan di lokasi pelabuhan. Sumber data: https://kaltim.tribunnews.com/2021/07/31/proyek-

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		pelabuhan-mantaritip-di-berau-ditarget-rampung-4-tahun-lagi-tunggu-anggaran-pusat-dan-bankeu?page=2
22	Mempawah	Belum operasional Kondisi alur pelayaran yang sempit dan banyak mengandung pasir sehingga sering terjadi longsor dan pendangkalan. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
23	Menggala	Sudah ada studi sid, namun perlu adanya pengerukan alur masuk ke pelabuhan. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
24	Moru	Dermaga pelabuhan Moru diperuntukan bagi terminal peti kemas. Pembangunan telah selesai tahun 2018, namun belum beroperasi karena terdapat kendala akses jalan darat Kalabahi – Moru. Sumber data : https://tribuanapos.net/2020/06/29/dprd-alor-geram-delapan-tahun-pelabuhan-peti-kemas-moru-belum-beroperasi/
25	Mumugu	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas penunjang seperti alat bongkar muat. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Rencana tahun 2022 akan dilayani kapal tol laut.
26	Nunbaun Sabu (Namosain)	Saat ini digunakan sebagai dermaga pelayaran rakyat dan melayani perairan Rote dsk. Sumber data : https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/nunbaun-sabu-namosain.html
27	Oepoli	Pemprov NTT sedang melaksanakan penyusunan masterplan pembangunan pelabuhan Oepoli. Sumber data : http://pengadaan.info/detail/4772131-master-plan-pembangunan-pelabuhan-laut-oepoli
28	P. Mules	Belum operasional. Sumber data : Dit Kepelabuhanan.
29	P. Sebesi	Saat ini digunakan sebagai dermaga pelayaran rakyat dan melayani perairan Pulau Sebesi dsk. Kapal yang melayari antara lain Kapal Pelayaran Rakyat (Pera) Banawa Nusantara 73 bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI. Sumber data : https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kapal-pera-jadi-moda-transportasi-gratis-rute-dermaga-

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		bom-pulau-sebesi
30	Palipi	Sedang dilakukan rehabilitasi dermaga trestle. Sumber data : https://sulbar.tribunnews.com/2021/12/21/proyek-pelabuhan-palipi-majene-kembali-dikerjakan-lokasi-pembangunan-tanpa-papan-proyek
31	Pangandaran/Bojongsalawe	Belum beroperasi. Karena masih memerlukan izin operasional yang hingga saat ini belum terbit. Salah satu syarat izin operasional, pelabuhan harus dilakukan izin uji sandar kapal pada dermaga. Pada tanggal 5 Maret 2021 telah dilakukan uji sandar kapal menggunakan kapal negara navigasi KN. Prajapati. Sumber data : jabar.inews.id/berita/pelabuhan-bojongsalawe-pangandaran-belum-beroperasi-tunggu-terbit-izin-operasional .
32	Papela	Saat ini digunakan sebagai dermaga pelayaran lokal dan melayani angkutan penyeberangan Pulau Rote dsk. Sumber data : https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/papela.html
33	Parit Rempak	Pelabuhan lokal. Tahun 2019, pembangunannya diambil alih Ditjen Hubdat untuk angkutan penyeberangan. Sumber data : https://www.beritatrans.com/artikel/141113/Ditjen-Hubdat-Ambil-Alih-Pembangunan-Pelabuhan-Parit-Rempak/
34	Parlimbungan Ketek	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Tahun 2020 Kemen PUPR sedang melanjutkan pembangunan akses jalan nasional ke pelabuhan Parlimbungan Ketek. Sumber data : https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/61371064/pengumuman anlelang
35	Pasean	Pelabuhan Pasean merupakan pelabuhan lokal milik pemerintah Kabupaten Pamekasan. Digunakan untuk angkutan lokal Kep. Madura dsk. Sumber data : https://www.researchgate.net/publication/328993237_UP_AYA_MEMBERDAYAKAN_PELABUHAN_PASEAN_PA_MEKASAN
36	Pawi	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
37	Pota	Status pelabuhan lokal (PL). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Kendala jalan akses ke pelabuhan dari jalan utama kondisinya kurang baik. Sumber data : https://www.pojokbebas.com/pembangunan-pelabuhan-pota-mandek-sp-ntt-serbu-kemenhub/
38	Pulau Kampai	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
39	Pulau Owi	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
40	Pulau Seluan	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
41	Rainis	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
42	Riung	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
43	Sebalang	Status pelabuhan pengumpang regional (PR). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Belum ada akses jalan ke pelabuhan Sebalang. Sumber data : https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-pemkab-lamsel-dan-ksop-panjang-perjuangkan-infrastruktur-jalan-pelabuhan-sebalang
44	Sepo	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
45	Sibadeh	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
46	Sibigo	Status pelabuhan lokal (PL). Dermaga Kayu 15 x 5 m

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
		Dermaga beton rusak karena gempa Aceh. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
47	Siompu	Digunakan sebagai pelabuhan penyeberangan, berdasarkan Kepmenhub No. KM 265 TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Siompu Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan Yang Berlokasi Di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
48	Siwa/Bangsalae	Selama ini difungsikan sebagai pelabuhan angkutan penyeberangan Siwa-Tobaku. Sumber data : https://telisik.id/news/pelabuhan-penyeberangan-tobaku-siwa-sepi-penumpang
49	Sungsang	Difungsikan sebagai pelabuhan lokal perikanan. Kedalaman hanya 3,5 m ketika air surut. Sumber data : https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2556/di-tanjung-carat-kapal-besar-bisa-merapat
50	Tana Paser/Pondong	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Rencana tahun 2022 dilayani kapal angkutan laut perintis.
51	Tanjung Berakit	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Dermaga ponton Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
52	Tanjung Moch	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Masih dalam pembangunan fasilitas pelabuhan. Sumber data : https://pontas.id/2021/04/09/pelabuhan-tanjung-moco-mandek-ksop-salahkan-bk-ftz-tanjungpinang/
53	Tanjung Pakis	Baru terbit konsesi perusahaan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan pada tahun 2020.
54	Tanjung Sarang Elang	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
55	Tanjung Satai	Status pelabuhan pengumpan regional (PR). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).

**Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut
Tahun 2022**

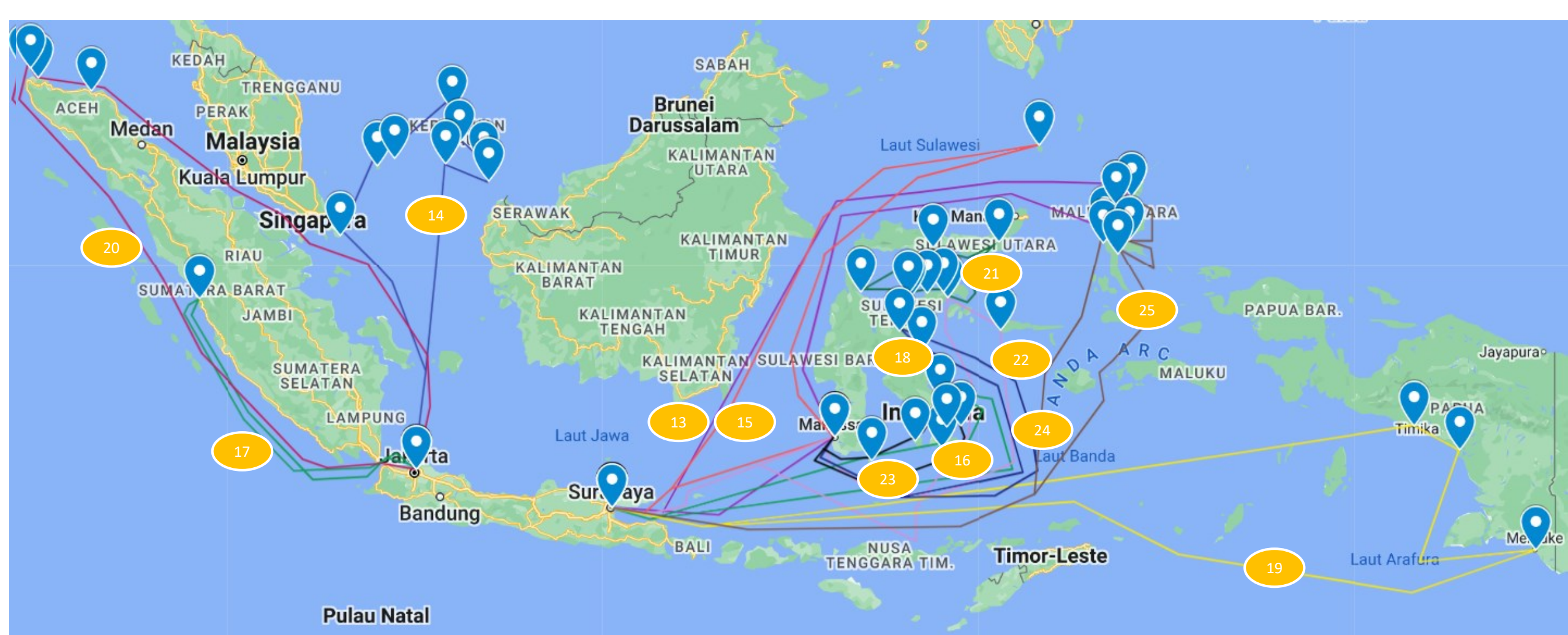
No.	Nama Pelabuhan	Keterangan
56	Teluk Sigintung/Seruyan	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Terkendala akses jalan. Sumber data : https://www.borneonews.co.id/berita/202463-bupati-seruyan-harapkandukungan-akses-jalan-ke-pelabuhan-teluk-segintung
57	Teluk Tapang	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Pembangunan belum selesai. Sumber data : https://padangkita.com/kejar-target-operasi-2022-pembangunan-pelabuhan-teluk-tapang-berlanjut/
58	Tobilota	Status pelabuhan lokal (PL). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Pembangunan belum selesai. Sumber data : https://nusabungapos.com/progres-pembangunan-pelabuhan-tobilota-telah-100-persen-edipurnomotinggal-finishing-dan-serah-terima/1639/lintas-ntt/
59	Ujung Jabung	Pelabuhan Pengumpan Pengumpul (PP). Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL). Pembangunan belum selesai. Sumber data : https://dishub.jambiprov.go.id/2021/09/09/bahas-pelabuhan-ujung-jabung/
60	P. Sabutung	Status pelabuhan lokal (PL). Belum tersedia fasilitas pokok seperti dermaga. Sumber Data : Sistem Informasi Pelabuhan (SIMPEL).
	Pelabuhan lokal sudah operasional	20 pelabuhan
	Tidak ada dermaganya	16 pelabuhan

Target rasio konekt 2023 = 596 / 636 = 0,94 (tambahan 20 pelabuhan warna hijau)

Target rasio konekt 2024 = 605 / 636 = 0,95 (tambahan 9 pelabuhan : Teluk Sigintung (Seruyan), Pota, Parlimbungan Ketek, Pangandaran (Bojongsalawe), Mansinam, Mataritip, Mempawah, Moru, Palipi).



1.	Bitung-Ulu Siau-Tagulandang-Tahuna-Marore-Mianga-Marampit-Lirung-Melangoane-Mangarang-Bitung	7.	Makassar-Awerange/Barru-Garongkong-Tanjung Silopo/Polewali-Mamuju-Belang-Belang-Nunukan-Makassar
2.	Tanjung Perak-Wanci-Namrole-Pulau Obi-Tanjung Perak	8.	Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
3.	Tanjung Perak-Rote-Sabu-Tanjung Perak	9.	Sorong-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Sorong
4.	Tanjung Priok-Bengkalis-Meranti/Dorak-Belawan-Lhokseumawe/Krueng Geukeh-Malahayati/Krueng Raya-Tanjung Priok	10.	Tanjung Perak-Piru-Wayaloar-Malbufa-Babang-Saketa-Gimea-Bula-Tanjung Perak
5.	Teluk Bayur-Gunung Sitoli-Sinabang-Sikakap-Bengkulu/Pulau Baai-Teluk Bayur	11.	Tanjung Perak-FakFak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
6.	Tanjung Perak-Ilwaki-Kisar-Leti-Kaiwatu/Moa-Lelang/P. Sermat-Tepa-Larat-Tanjung Perak	12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak



12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak	19.	Tanjung Perak – Makassar – Bobong (Taliabu) – Luwuk – Tanjung Perak
13.	Tanjung Perak-Makassar-Jailolo-Daruba-Galela-Tanjung Perak	20.	Tanjung Perak – Merauke – Agats – Timika (Pomako) – Tanjung Perak
14.	Tanjung Priok-Kijang-Letung-Tarempa-Pulau Laut-Selat Lampa-Subi-Serasan-Midai-Tanjung Priok	21.	Tanjung Priok – Lhokseumawe – Malahayati – Sabang – Tanjung Priok
15.	Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba-Galela-Buli-Maba Pura-Weda-Tanjung Perak	22.	Bitung – Luwuk – Pagimana – Bunta – Mantangisi – Ampa – Parigi/Tinombo – Tilamuta – Bitung
16.	Tanjung Perak-Makassar-Tahuna-Tanjung Perak	23.	Makassar - Bungku – Kolonodale – Makasar
17.	Tanjung Perak-Bau-Bau/Murhum-Kendari/Bungkutoko-Tanjung Perak	24.	Makasar – Ereke – Raha – Sikeli – Selayar– Makassar
18.	Tanjung Priok – Teluk Bayur - Tanjung Priok	25.	Tanjung Perak - Tidore (Soasio) – Morotai – Galela – Maba/Buli – Weda – Tanjung Perak



26.	Tanjung Perak- Wetar -Kisar – Leti - Moa – Sermata - Tapa – Larat - Tanjung Perak	32.	Tanjung Perak – Namlea – Tanjung Perak
27.	Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak	33.	Merauke (Kelapa Lima) – Kimaam – Moor – Bade (Mapi) – Gantentiri (Bovendigul) – Merauke (Klima)
28.	Tanjung Perak – Makassar – Jailolo – Morotai (Daruba) – Tanjung Perak	34.	Tanjung Perak – Sorong – Tanjung Perak
29.	Tanjung Perak – Saumlaki – Dobo – Tanjung Perak	35.	Tanjung Priok – Tanjung Perak – Tanjung Priok
30.	Tanjung Perak – Badas – Bima – Tanjung Perak	36.	Tanjung Priok – Patimban – Kijang – Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa – Subi – Serasan – Midai – Tanjung Priok
31.	Tanjung Perak – Tarakan – Nunukan – Tanjung Perak	37.	Tanjung Priok – Pekanbaru– Tanjung Priok

CAPAIAN ET:BT

NO	NAMA PELABUHAN	STANDAR KINERJA	Laporan ET:BT Tahun 2022												PENCAPAIAN ET:BT Tahun 2022											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelabuhan Lhokseumawe	70																								
2	Pelabuhan Malahayati	-																								
	a. Terminal Konvensional																									
	b. Terminal Petikemas	50	68,18												1,00											
3	Pelabuhan Sabang	80																								
4	Pelabuhan Meulaboh	50																								
5	Pelabuhan Kuala Langsa	65																								
6	Pelabuhan Belawan																									
	a. Belawan Lama	45				46,32	46,52		46,13	52,23		47,86	50,13	47,86			1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
	b. Ujung Baru	70				63,77	60,85		66,56	78,80		65,42	59,98	65,42			0,91	0,87		0,91	1,00		0,93	0,86	0,93	
	c. Citra	60				58,27	52,31		55,46	53,43		54,04	60,13	54,04			0,97	0,87		1,00	0,89		0,90	1,00	0,90	
	d. I K D	60				64,20	64,05		61,44	63,37		68,75	75,94	68,75			1,00	1,00		1,07	1,00		1,00	1,00	1,00	
	e. TPKDB/TPK B	68				78,25	83,78		81,53	82,54		81,26	79,73	81,26			1,00	1,00		1,15	1,00		1,00	1,00	1,00	
	f. B I C T/TPK A	68				76,27	71,75		77,90	64,80			74,61				1,00	1,00		1,15	0,95			1,00		
7	Pelabuhan Pangkalan Susu (pertamina) PLTU	-																								
8	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan	50																								
9	Pelabuhan Kuala Tanjung																									
	a. Dermaga C	70	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00									
	b. Terminal Multipurpose	70	50,00	53,00	56,00				51,00						0,71	0,76	0,80				1,00					
10	Pelabuhan Sibolga	70	31,00	0,00	43,00	36,88		39,87	43	46,00	76,20	45,85	34,91	41,96	0,44	0,00	0,61	0,53		1,76	0,61	0,66	1,00	0,66		0,60
11	Pelabuhan Gunung Sitoli	50	75,17			68,79	73,00		77,83						1,00			1,00	1,00		1,00					
12	Pelabuhan Dumai																									
	a. Dermaga A (Cargo)	70							37,29	36,61										0,53	0,52					
	b. Dermaga B (CPO)	80							83,33	83,47										1,00	1,00					
	c. Dermaga C (Multipurpose)	70							65,44	55,21										0,93	0,79					
13	Pelabuhan Pekanbaru	50					0,00		50,00	50,00		50,00	50,00	54,26						1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
14	Pelabuhan Kuala Enok	-																								
15	Pelabuhan Tanjung Buton								0											0,00						
16	Pelabuhan Tembilaan	50	22,00	26,00		24,39	25,54		21,78			22,46	20,99		0,44	0,52		0,49	0,51		0,44		0,45	0,42		
17	Pelabuhan Kuala Cinaku	50				30,13	29,08		35,52	36,21	39,90						0,60	0,58		0,71	0,72	0,80				
18	Pelabuhan Bagan Siapi-api	75																								
19	Pelabuhan Bengkalis	50																								
20	Pelabuhan Selat Panjang	50																								
21	Pelabuhan Tanjung Pinang	70				25,85	19,58						29,58	23,90				0,37	0,28				0,42	0,34		
22	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	50	22,08	19,87		22,36	17,90								0,44	0,90		0,45	0,36							
23	Pelabuhan Kijang	50	20,44	21,84	22,66	19,58	18,46		17,22	24,38	15,39				0,41	0,44	0,45	0,39	0,37		0,34	0,49	0,31			
24	Pelabuhan Talang Dukuh																									
	a. Terminal Multipurpose	50				43,42	37,11		47,05									0,87	0,74		0,94					
	b. Terminal Petikemas	50				65,96	60,11		61,75									1,00	1,00		1,00					
	c. Terminal Curah Kering	65				0,00	0,00		0,00									0,00	0,00		0,00					
25	Pelabuhan Kuala Tungkal	50							0,00	0,00											0,00	0,00				
26	Pelabuhan Muara Sabak	50	26,81	0,00	28,18	30,21	20,15	49,35	14,08	27,60	52,76	33,89	67,18		0,54	0,00	0,56	0,60	0,40	0,99	0,28	0,55	1,00	0,68	1,00	
27	Pelabuhan Pangkal Balam																									
	a. Terminal Pangkal Balam	70																								
	b. Terminal Belinyu	90																								
28	Pelabuhan Tanjung Pandan																									
	a. Terminal Tanjung Pandan	50							33,06	29,47		33,35									1,00	0,59		0,67		
	b. Terminal Tanjung Batu	50							0,00	0,00											0,00	0,00				
29	Pelabuhan Muntok	-																								
30	Pelabuhan Teluk Bayur																									
	a. Terminal Multipurpose	55																								
	b. Terminal Petikemas	60																								
	c. Terminal Curah Kering	60																								
	d. Terminal Curah Cair	70																								
31	Pelabuhan Pulau Baai																									
	a. Terminal Multipurpose	60	59,25	57,95		62,90	50,59		0,00			52,69			0,99	0,98		1,00	0,84		0,00			0,88		
	b. Terminal Curah Cair/Curah Kering	70	59,25	57,95		62,90	50,59		0,00			52,69			0,85	0,98		0,90	0,72		0,00			0,75		
32	Pelabuhan Palembang																									
	a. Terminal Multipurpose	50	66,79												1,00											
	b. Terminal Petikemas	50	58,00												1,00											
33	Pelabuhan Panjang																									
	a. Terminal Multipurpose	60	64,69	68,36								70,48			1,00	1,00							1,00			
	b. Terminal Petikemas	60	67,37	65,10								75,69			1,00	1,00							1,00			
	c. Terminal Curah Kering	60	72,46	65,75								72,94			1,00	1,00							1,00			

[illegible]

[illegible]

CAPAIA (WT)

NO	NAMA PELABUHAN	STANDAR KINERJA	Laporan (WT) Tahun 2022												PENCAPAIAN (WT) Tahun 2022											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelabuhan Lhokseumawe	1																								
2	Pelabuhan Malahayati																									
	a. Terminal Konvensional	1	0.08			0,02	0,18		0,33						1,00			1,00	1,00		1,00					
	b. Terminal Peti Kemas	1																								
3	Pelabuhan Sabang	1																								
4	Pelabuhan Meulaboh	1																								
5	Pelabuhan Kuala Langsa	2																								
6	Pelabuhan Belawan																									
	a. Belawan Lama	1				0,00	0,00		0,00	0,00			0,0001	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	1,00	0,00
	b. Ujung Baru	1				0,07	0,13		0,07	0,00			0,06	0,00				1,00	1,00		1,00	0,00		1,00	1,00	0,00
	c. Citra	1				0,00	0,00		0,02	0,00			0,0001	0,00				0,00	0,00		1,00	0,00		1,00		0,00
	d. I K D	1				0,00	0,00		0,00	0,00			0,0001	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		1,00		0,00
	e. B I C T /TPK A	1				0,04	0,01		0,10	0,00		0,02	0,08	0,00				1,00	1,00		1,00	0,00		1,00		0,00
	f. TPKDB/TPK B	1				0,03	0,01		0,05	0,00			0,02	0,00				1,00	1,00		1,00	0,00		1,00		0,00
7	Pelabuhan Pangkalan Susu (pertamina)	1																								
	PLTU	1																								
8	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan	-																								
9	Pelabuhan Kuala Tanjung																									
	a. Dermaga C	1	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00									
	b. Terminal Multipurpose	1	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00					0,00				
10	Pelabuhan Sibolga	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Pelabuhan Gunung Sitoli	-	0,00			0,00	0,00		0						0,00			0,00	0,00		0,00					
12	Pelabuhan Dumai																									
	a. Dermaga A (Cargo)	1							0,00												0,00					
	b. Dermaga B (CPO)	1							0,00												0,00					
	c. Dermaga C (Multipurpose)	1							0,00												0,00					
13	Pelabuhan Pekanbaru	1				0,00			1,00	1,00		1,00	1,00	0,06				0,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
14	Pelabuhan Kuala Enok	1																								
15	Pelabuhan Tanjung Buton								0,00												0,00					
16	Pelabuhan Tembilahan	1	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
17	Pelabuhan Kuala Cinaku	-				0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00				
18	Pelabuhan Bagan Siapi-api	2																								
19	Pelabuhan Bengkalis	1																								
20	Pelabuhan Selat Panjang	-																								
21	Pelabuhan Tanjung Pinang	-				0,00	0,00											0,00	0,00							
22	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	1	0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00							
23	Pelabuhan Kijang	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
24	Pelabuhan Talang Duku	-																								
	a. Terminal Multipurpose	1				0,05	0,14		0,14									1,00	1,00		1,00					
	b. Terminal Petikemas	1				0,105	0,15		0,00									1,00	1,00		0,00					
	c. Terminal Curah Kering	1				0,00	0,00		0,05									0,00	0,00		1,00					
25	Pelabuhan Kuala Tungkal	1																								
26	Pelabuhan Muara Sabak	1	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,14		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
27	Pelabuhan Pangkal Balam																									
	a. Terminal Pangkal Balam	1																								
	b. Terminal Belinyu	1																								
28	Pelabuhan Tanjung Pandan																									
	a. Terminal Tanjung Pandan	1							0,24	0,21		0,13									1,00	1,00		1,00		
	b. Terminal Tanjung Batu	1							0,00												0,00					
29	Pelabuhan Muntok	-																								
30	Pelabuhan Teluk Bayur																									
	a. Terminal Multipurpose	1																								
	b. Terminal Petikemas	1																								
	c. Terminal Curah Kering	1																								
	d. Terminal Curah Cair	1																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPAIAN (AT)

NO	NAMA PELABUHAN	STANDAR KINERJA	Laporan (AT) Tahun 2022												PENCAPAIAN (AT) Tahun 2022											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelabuhan Lhokseumawe	1																								
2	Pelabuhan Malahayati																									
	a. Terminal Konvensional	1	0.91			1,05	0,88		0,66	0		0,62	0,73		1,00			0,95	1,00		1,00	0,00	1,00	1,00		
	b. Terminal Peti Kemas	1																								
3	Pelabuhan Sabang	1																								
4	Pelabuhan Meulaboh	1																								
5	Pelabuhan Kuala Langsa	3																								
6	Pelabuhan Belawan																									
	a. Belawan Lama	1,5				1,29	1,38		1,31	1,31		1,36	1,09	1,36				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	b. Ujung Baru	1,5				1,18	1,32		1,26	1,14		1,25	1,23	1,25				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	c. Citra	1,5				1,36	1,27		1,35	1,27		1,24	1,26	1,24				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	d. I K D	1,5				1,45	1,40		1,32	1,33		1,35	1,28	1,35				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	e. TPKDB/TPK B	1,5				1,17	1,14		1,14	1,18		1,17	1,11	1,17				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	f. B I C T/TPK A	1,5				1,14	1,26		1,13	1,32			1,09	1,25				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Pelabuhan Pangkalan Susu (PERTAMINA)	1																								
	PLTU	1																								
8	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan	2																								
9	Pelabuhan Kuala Tanjung																									
	a. Dermaga C	1	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00									
	b. Terminal Multipurpose	2	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00									
10	Pelabuhan Sibolga	1	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	Pelabuhan Gunung Sitoli	-	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
12	Pelabuhan Dumai																									
	a. Dermaga A (Cargo)	6							3,76	2,57											1,00	1,00				
	b. Dermaga B (CPO)	6							4,27	4,49											1,00	1,00				
	c. Dermaga C (Multipurpose)	6							2,42	2,50											1,00	1,00				
13	Pelabuhan Pekanbaru	11				0,00			11,00	11,00		11,00	11,00	10,22				0,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
14	Pelabuhan Kuala Enok	3																								
15	Pelabuhan Tanjung Buton								0,00												0,00					
16	Pelabuhan Tembilahan	3	3,25	3,25		3,25	3,25		3,25			0,00	0,00		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92			0,00	0,00	
17	Pelabuhan Kuala Cinaku	-				0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00				
18	Pelabuhan Bagan Siapi-api	4																								
19	Pelabuhan Bengkalis	2																								
20	Pelabuhan Selat Panjang	-																								
21	Pelabuhan Tanjung Pinang	1				0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00		
22	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	1	0.21	0.22		0.15	0.21								1,00	1,00		1,00	1,00							
23	Pelabuhan Kijang	1	1,70	1,73	1,79	1,74	1,73		1,78	1,88	0,90				0,59	0,98	0,97	0,57	0,58		0,58	0,53	1,00			
24	Pelabuhan Talang Dukuh																									
	a. Terminal Multipurpose	30				1,11	10,37		0,39									1,00	1,00		1,00					
	b. Terminal Petikemas	30				0,53	0,42		0,53									1,00	1,00		1,00					
	c. Terminal Curah Kering	30							0,00												1,00					
25	Pelabuhan Kuala Tungkal	1							0,00	0,00											0,00	0,00				
26	Pelabuhan Muara Sabak	1	3,33	0,00	0,00	5,46	0,00	2,54	0,00	0,00	0,57	0,33	1,95		0,30	0,00	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,00	0,65	1,00	0,51	
27	Pelabuhan Pangkal Balam																									
	a. Terminal Pangkal Balam	1,5																								
	b. Terminal Belinyu	1,5																								
28	Pelabuhan Tanjung Pandan																									
	a. Terminal Tanjung Pandan	1							0,55	0,54		0,46									1,00	1,00		1,00		
	b. Terminal Tanjung Batu	1							0,00												1,00					
29	Pelabuhan Muntok	-																								
30	Pelabuhan Teluk Bayur																									
	a. Terminal Multipurpose	1																								
	b. Terminal Petikemas	1																								
	c. Terminal Curah Kering	1																								
	d. Terminal Curah Cair	1																								

[illegible]

[illegible]

87	Pelabuhan Banda Naira	-																								
88	Pelabuhan Ternate	1	0,11			3,73	1,56		0,00	1,51		0,00			1,00			0,27	0,64		0,00	0,66				
89	Pelabuhan Sorong	-																								
	a. Terminal Sorong	2	1,95			1,95	1,92		1,88	74,00					1,00			1,00	1,00		1,00	0,03				
	b. Terminal Arar	2	2,95			1,91	0,00		2,28	1,86					0,68			1,00	0,00		1,00	1,00				
90	Pelabuhan Manokwari	1																								
91	Pelabuhan Fak-fak	1																								
92	Pelabuhan Jayapura																									
	a. Terminal Konvensional	1,5				1,25	1,49		1,25	1,16								1,00	1,00		1,00	1,00				
	b. Terminal Petikemas Jayapura	1,5				1,25	1,49		1,25	1,16								1,00	1,00		1,00	1,00				
93	Pelabuhan Biak	1,5																								
94	Pelabuhan Merauke	2																								
	Total Capaian AT														26,55	12,91	5,03	39,58	30,91	2,39	35,10	23,22	10,59	31,00	19,51	11,00

0,70	0,56	0,50	0,78	0,69	0,60	0,67	0,75	0,96	0,79	0,85	0,92
70%	56%	50%	78%	69%	60%	67%	75%	96%	79%	85%	92%
TW I	59%			TW II	69%		TW III	80%		TW IV	85%
											73%

NB :
Approach Time (AT) waktu kapal saat pelaksanaan pemanduan sehingga apabila dibawah standar kinerja yang ditetapkan artinya Kinerjanya Bagus dan Sebaliknya
Satuan Jam